

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

Jl. DR. Cipto Mangunkusumo,
Sekupang, Batam - 29428
Telp.: 0778 - 322189
Fax.: 0778 - 327927
E-mail : upt_batam@postel.go.id
Website : www.postel.go.id

LAPORAN KINERJA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM TAHUN 2025



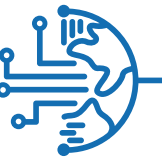
KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA **BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM TAHUN 2025**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan lebih transparan dalam menyajikan program kerja. Laporan ini berisi capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Tahun 2025.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 174 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 telah berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika juga berganti

menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam adalah melakukan pelayanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR	95%	100%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)	100%	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	150%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	124%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	109%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	86.95	86.19
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100

Pada sasaran Kegiatan 1 “Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi”

1. IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 %.

2. IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

3. IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 95 %



4. IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 75 %

5. IK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 85 %

6. IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 %

7. IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

8. IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

9. IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

10. IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Tercapai 150 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

11. IK-11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Tercapai 124 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

12. IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Tercapai 109 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

13. IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %

Pada Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien”

1) IK-1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025

Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan atas Pengelolaan Anggaran selama Tahun 2025 yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yang capai adalah 86.19 dari target yang ditetapkan sebesar 86.95.

2) IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yang capai adalah 100 dari target yang ditetapkan sebesar 97.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

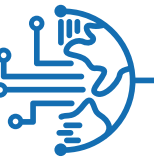
Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sampai dengan akhir Desember 2025 dengan detail realisasi pada DIPA Tahun 2025 dengan Kode Satker Lama (653970) sebesar Rp. 4.955.509.661,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.955.599.000,- dan DIPA Tahun 2025 dengan Kode Satker Baru (694708) sebesar Rp. 6.827.372.570,- (99.12%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.888.051.000,-.





Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2025

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	50,00	94,44								
2	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota			80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00
3	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	80,00	100,00								
5	Persentase jumlah ISR yang termonitor	70,00	80,70								
6	Persentase hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90,00	100,00								
7	Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85,00	95,00	95,00	100,00	95,00	100,00	95,00	100,00		
8	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	97,00	100,00	98,00	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00
9	Persentase penertiban spektrum frekuensi radio	70,00	100,00								
10	Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi			90,00	100,00	93,00	100,00	93,00	100,00		
11	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital									75,00	100,00
12	Persentase % Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT									85,00	100,00
13	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif									80,00	100,00
14	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan									100,00	100,00
15	Monitoring Sertifikat alat/Perangkat Telekomunikasi	3,00	3,00								
16	Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	1,00	1,00								
17	Persentase pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik	80,00	100,00								
18	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat					100,00	100,00	100,00	100,00		
19	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik									100,00	150,00
20	Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100,00	120,00								
21	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT					100,00	243,00	100,00	425,00		



No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
22	Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100,00	100,00								
23	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL					100,00	154,80	100,00	100,00		
24	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio									100,00	100,00
25	Persentase pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan	90,00	504,33								
26	Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC					100,00	181,00				
27	Persentase (%) Sosialisasi/ Bimbingan Teknis SRC/LRC							100,00	286,00		
28	Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN					100,00	628,00	100,00	333,00		
29	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTSIKLAN)									100,00	100,00
30	Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90,00	92,61								
31	Pelayanan Publik Terkait Konsultasi Penggunaan SFR, UNAR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Maritim Nelayan			100,00	194,50						
32	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) program MOTS-IKLAN					100,00	100,00				
33	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR							100,00	100,00		
34	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)									100,00	124,00
35	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)									100,00	109,00
36	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)									100,00	100,00
37	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86,00	95,68								
38	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI			87,00	89,97	87,00	90,66				
39	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Tahun 2024							90,66	91,99		
40	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025									86,95	86,19
41	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)					80,00	100,00	100,00	100,00	97,00	100,00



Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Tahun 2025, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan

rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas instansi.

Laporan Kinerja ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan / atau Perangkat Telekomunikasi, Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan / atau Perangkat Telekomunikasi, Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik serta Sub Bagian Umum di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas II Batam. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam tahun 2025, dapat dilaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 dan Rencana Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Batam, Februari 2026
Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II Batam



Rosyid Susilo Nugroho



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv

BAB I PENDAHULUAN	17
LATAR BELAKANG	18
MAKSUD DAN TUJUAN	18
STRUKTUR ORGANISASI	19
POTENSI DAN PERAN STRATEGIS	21
SISTEMATIKA PELAPORAN	24

BAB II PERJANJIAN KINERJA	25
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	26
SASARAN KEGIATAN	26
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL	31
IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	31
IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	44
IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	58
IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	65
IK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	72
IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	77
IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	83
IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	99
IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	105
IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	111
IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	116
IK-12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	121
IK-13 Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> <i>ISR Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	126
SASARAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	132
IK-1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	132
IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	142
KINERJA LAINNYA	144

BAB IV PENUTUP	157
-----------------------------	------------

DOKUMENTASI	158
--------------------------	------------

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025	iii
Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2025	vi
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi	30
Tabel 5. Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	32
Tabel 6. Data Capaian Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	33
Tabel 7. Target Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	34
Tabel 8. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dengan UPT Lainnya	37
Tabel 9. Efisiensi Anggaran Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio	42
Tabel 10. Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio	44
Tabel 11. Capaian Kumulatif Tiap Bulan <i>Open shelter</i> dan <i>Remote site</i>	47
Tabel 12. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Radio Siaran FM	47
Tabel 13. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Televisi Digital	48
Tabel 14. Kanal Radio FM di Wilayah Kepulauan Riau	51
Tabel 15. Pengukuran TV Digital di Wilayah Kepulauan Riau	52
Tabel 16. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio Dengan UPT Lainnya	53
Tabel 17. Efisiensi Anggaran Pemeriksaan Stasiun Radio	57
Tabel 18. Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	58
Tabel 19. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Dengan UPT Lainnya	61
Tabel 20. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	65
Tabel 21. Capaian Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota	68
Tabel 22. Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	72
Tabel 23. Capaian Nilai SLA di Balai Monitor SFR Kelas II Batam	73
Tabel 24. Capaian dalam 5 Tahun (2021-2025)	73
Tabel 25. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio dengan UPT Lainnya	76
Tabel 26. Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif	77
Tabel 27. Hasil Penanganan Sanksi Denda Administratif	79
Tabel 28. Capaian Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	83
Tabel 29. Perbandingan Kecepatan Internet dengan Nasional	86
Tabel 30. Perbandingan Kecepatan Internet Dengan Negara Tetangga	87
Tabel 31. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kota Batam	88
Tabel 32. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kota Tanjung Pinang	89





Daftar Tabel

Tabel 33. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Bintan	91
Tabel 34. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Karimun	92
Tabel 35. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Lingga	94
Tabel 36. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Natuna	95
Tabel 37. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Anambas	97
Tabel 38. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	99
Tabel 39. Pelaksanaan UNAR di Balai Monitor SFR Kelas II Batam	100
Tabel 40. Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun (2021-2025)	100
Tabel 41. Jumlah Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN di Balai Monitor SFR Kelas II Batam	101
Tabel 42. Capaian Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC IKRAN dan Sosialisasi MOTS dalam 5 Tahun (2021-2025)	101
Tabel 43. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dengan UPT Lainnya	104
Tabel 44. Capaian Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	105
Tabel 45. Penyampaian/Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan Surat Tagihan (ST) Tahun 2025	106
Tabel 46. Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (2021-2025)	106
Tabel 47. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dengan UPT Lainnya	110
Tabel 48. Capaian Kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik	111
Tabel 49. Rekap Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025	112
Tabel 50. Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dalam 5 Tahun (2021-2025)	112
Tabel 51. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik dengan UPT Lainnya	115
Tabel 52. Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	116
Tabel 53. Capaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dalam 5 Tahun (2021-2025)	118
Tabel 54. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dengan UPT Lainnya	120
Tabel 55. Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	121
Tabel 56. Capaian Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dalam 5 Tahun (2021-2025)	123
Tabel 57. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dengan UPT Lainnya	125
Tabel 58. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> <i>ISR Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	126
Tabel 59. Mekanisme Perhitungan Capaian Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> <i>ISR Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	127



Daftar Tabel

Tabel 60. Capaian Pembinaan Data Koordinat	127
Tabel 61. Data Pembinaan Koordinat MDRS Kabupaten/Kota	130
Tabel 62. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam	132
Tabel 63. Capaian Target Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas II Batam	133
Tabel 64. Rincian Program Kerja Balai Monitor SFR Kelas II Batam	134
Tabel 65. Komposisi Belanja Balai Monitor SFR Kelas II Batam	135
Tabel 66. Komposisi Belanja Awal DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)	135
Tabel 67. Revisi DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)	136
Tabel 68. Komposisi Belanja Akhir DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)	136
Tabel 69. Komposisi Belanja Awal DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708)	138
Tabel 70. Revisi DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708)	138
Tabel 71. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan UPT Lainnya	139
Tabel 72. Efisiensi Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam	142
Tabel 73. Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	142
Tabel 74. Formulasi Perhitungan Nilai UAKPA Tahun 2025	142
Tabel 75. <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan UPT Lainnya	143
Tabel 76. Total Surat Masuk, Surat Keluar, dan Surat Tugas Tahun 2025	144
Tabel 77. Neraca BMN Balmon SFR Kelas II Batam Tahun 2025	145
Tabel 78. Data Tanah Dan Bangunan Lokasi 1	145
Tabel 79. Data Tanah Dan Bangunan Lokasi 2	146
Tabel 80. Data Slave Stasiun Tahun 2025	146
Tabel 81. Data Kendaraan Operasional Monitoring	146
Tabel 82. Data Kendaraan Operasional Roda Empat	147
Tabel 83. Data Kendaraan Operasional Roda Dua	148
Tabel 84. Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai	149
Tabel 85. Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai	149
Tabel 86. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	150
Tabel 87. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	150
Tabel 88. Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan	152
Tabel 89. Data PPNPN	152
Tabel 90. Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Balmon Batam	152



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Batam	21
Gambar 2. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau	22
Gambar 3. Pengukuran Kualitas Layanan Penyelenggara Jaringan Bergerak Secara Keseluruhan	84
Gambar 4. Rata-Rata Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Pada Provinsi Kepulauan Riau	84
Gambar 5. Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Penyelenggara Jaringan Seluler Setiap Operator Seluler	85
Gambar 6. Kecepatan internet nasional. Sumber : Ookla Research TM	85
Gambar 7. Kecepatan internet Malaysia. Sumber : Ookla Research TM	86
Gambar 8. Kecepatan internet Singapura. Sumber : Ookla Research TM	87
Gambar 9. Rasio Kesuksesan Youtube Dan <i>Ping</i>	87
Gambar 10. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kota Batam	88
Gambar 11. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kota Batam	89
Gambar 12. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kota Tanjung Pinang	90
Gambar 13. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kota Tanjung Pinang	90
Gambar 14. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Bintan	91
Gambar 15. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kabupaten Bintan	92
Gambar 16. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Karimun	93
Gambar 17. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kabupaten Karimun	93
Gambar 18. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Lingga	94
Gambar 19. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kabupaten Lingga	95
Gambar 20. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Natuna	96
Gambar 21. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kabupaten Natuna	97
Gambar 22. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Anambas	97
Gambar 23. Rasio Kesuksesan Unduh, <i>Browsing</i> , Youtube Dan <i>Ping</i> Setiap Operator Seluler di Kabupaten Anambas	98
Gambar 24. Nilai Capaian IKPA pada Aplikasi MONEVPA	134
Gambar 25. Nilai Capaian Kinerja pada Aplikasi e-monev SMART	134
Gambar 26. Hasil Penginputan pada Aplikasi e-Zico	149



Daftar Grafik

Grafik 1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	31
Grafik 2. Capaian OCC Pita Frekuensi Radio Per Kabupaten/Kota	34
Grafik 3. Capaian Izin Stasiun Radio Termonitor Per Kabupaten/Kota	35
Grafik 4. Capaian Izin Stasiun Radio Teridentifikasi Per Kabupaten/Kota	35
Grafik 5. Label Legalitas	36
Grafik 6. Data Monitoring Wilayah Perbatasan 2025	37
Grafik 7. Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio	44
Grafik 8. Target Pemeriksaan <i>Microwave Link</i>	48
Grafik 9. Hasil Pemeriksaan <i>Microwave Link</i>	61
Grafik 10. Rekapitulasi Pemeriksaan Stasiun Radio Berdasarkan Kabupaten/Kota	49
Grafik 11. Hasil Pengukuran Siaran Radio FM Berdasarkan Kabupaten/Kota	49
Grafik 12. Capaian Pengukuran Radio FM Berdasarkan Status	50
Grafik 13. Capaian Pengukuran FM Berdasarkan Jumlah Stasiun Terukur	51
Grafik 14. Capaian Pengukuran TV Digital	52
Grafik 15. Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	58
Grafik 16. Total Jumlah Aduan Gangguan Per Tahun	60
Grafik 17. Jumlah Penanganan Gangguan di Wilayah Kabupaten/Kota	60
Grafik 18. Klasifikasi Dinas Yang Terganggu	61
Grafik 19. Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	65
Grafik 20. Capaian Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota	67
Grafik 21. Jumlah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	68
Grafik 22. Rekapitulasi Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	68
Grafik 23. Capaian dalam 5 Tahun (2021-2025)	74
Grafik 24. Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif	77
Grafik 25. Jumlah Pelaku Usaha Per Tahun	79
Grafik 26. Total Denda Per Tahun	79
Grafik 27. Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun (2021-2025)	100
Grafik 28. Capaian Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC IKRAN dan Sosialisasi MOTS dalam 5 Tahun (2021-2025)	101
Grafik 29. Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (2021-2025)	107
Grafik 30. Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dalam 5 Tahun (2021-2025)	112
Grafik 31. Hasil Survei IKM/IPKP Berdasarkan Usia dan Jenis Layanan	117
Grafik 32. Hasil Survei IKM/IPKP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir	118
Grafik 33. Capaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dalam 5 Tahun (2021-2025)	118
Grafik 34. Hasil Survei IIPP/IPAK Berdasarkan Usia dan Jenis Layanan	122
Grafik 35. Hasil Survei IIPP/IPAK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir	122
Grafik 36. Capaian Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dalam 5 Tahun (2021-2025)	123
Grafik 37. Data Pembenahan Koordinat Semester I	128
Grafik 38. Data Pembenahan Koordinat yang Telah Dilaporkan	128
Grafik 39. Data Pembenahan Koordinat Semester II	129
Grafik 40. Data Pembenahan Koordinat MDRS	129
Grafik 41. Data Pembenahan Koordinat MDRS Kabupaten/Kota	130
Grafik 42. Status MDRS Pengguna Sistem Komunikasi <i>Microwave Link</i>	130
Grafik 43. Rencana Penyerapan Anggaran DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970) Tahun 2025	137
Grafik 44. Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970) TA. 2025	137
Grafik 45. Rencana Penyerapan Anggaran DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708) Tahun 2025	138
Grafik 46. Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan Kode Satuan Kerja Baru (694708) TA. 2025	139
Grafik 47. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	150
Grafik 48. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	151
Grafik 49. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	151



Bab I

Pendahuluan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



Latar Belakang

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring perkembangan teknologi informatika, spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika tertib, teratur dan efisien dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian

spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan kinerja akuntabilitas dapat diupayakan langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam disusun sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam atas pelaksanaan tugas dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam ke depannya.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Struktur Organisasi

Didalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi yang diemban, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025, yang menyatakan bahwa susunan organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi radio serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio;
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio;

Dengan demikian tugas dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Tim Kerja Monitoring dan evaluasi spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

Tim Kerja Monitoring dan evaluasi spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi mempunyai lingkup tugas :

- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio, dan pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio serta pemenuhan standarisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya;
- Pemantauan dan evaluasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya;
- Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- Pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, pemenuhan standarisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta telekomunikasi khusus;
- Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban SFR/APT dan penanganan gangguan SFR;



- h. Pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio, kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, serta penyelesaian piutang denda administratif.

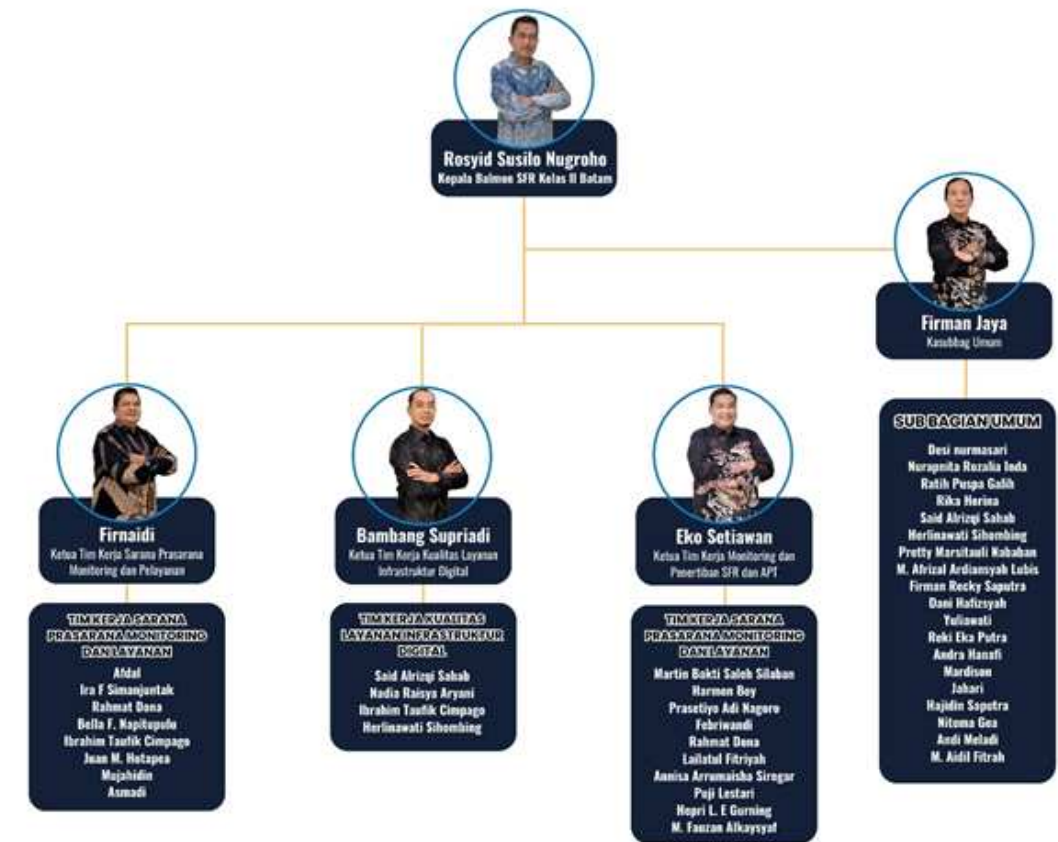
3. Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

- Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital mempunyai lingkup tugas :
- Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
 - Analisis data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
 - Pelaksanaan pembaharuan data kualitas layanan infrastruktur digital;
 - Melakukan pemantauan terhadap pembangunan dan penyediaan infrastruktur digital;
 - Melakukan pemantauan gangguan layanan telekomunikasi;
 - Pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link* & Data Seluler;
 - Verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi).

4. Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan

Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan mempunyai lingkup tugas :

- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Penanganan piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio dan/atau kualitas layanan infrastruktur digital;
- Pelaksanaan ujian amatir radio dan sertifikasi ijin komunikasi radio perikanan;
- Pelaksanaan konsultasi perizinan bidang spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.



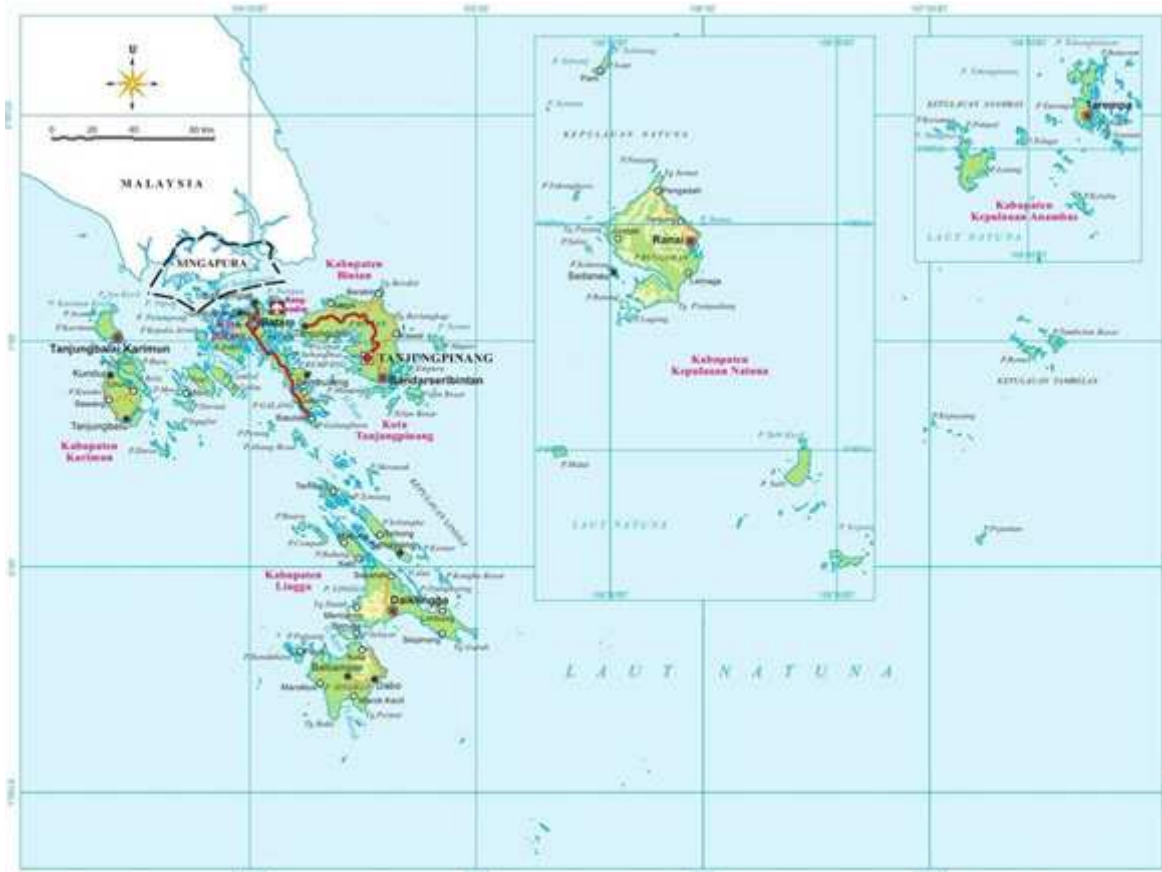
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Batam

Potensi dan Peran Strategis

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, berkedudukan di kota Batam dengan alamat: Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, kelurahan Tanjung Pinggir, kecamatan Sekupang, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29428, telepon (0778) 322189 / 322095, faksimile (0778) 327927. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam memiliki Wilayah kerja di provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada koordinat 04° 15' LU – 0° 45' LS dan 103° 11' BT – 109° 10' BT serta letak geografis yang strategis (antara Laut Natuna Utara dan Selat

Malaka) serta berbatasan dengan beberapa daerah dan negara tetangga yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi, provinsi Riau, dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan negara Singapura, negara Malaysia bagian barat dan provinsi Riau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur dan provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 2. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi. Terkait dengan hal itu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi di lapangan, masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia yang sangat berdekatan sehingga masih merupakan lingkup wilayah layanan yang

sama untuk dinas dan/atau service suatu stasiun radio serta pintu masuk alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Provinsi Kepulauan Riau sehingga diperlukan tingkat pengawasan yang lebih efektif guna sesuai dengan regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam cukup terbatas sehingga diperlukan pengembangan kompetensi bagi pegawai.
3. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama dan berpenduduk, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam



- sangat bergantung pada transportasi laut dan udara.
4. Sebagian pengguna spektrum frekuensi radio masih ada yang belum mengetahui dan memahami peraturan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Pos dan Informatika sehingga diperlukan sosialisasi ke masyarakat.

Analisa SWOT

1. Strength (Kekuatan)

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengawasan, pengendalian dan pelayanan publik;
- c. Kondisi wilayah kerja yang relatif aman dan kondusif;
- d. Tersedianya informasi pengguna frekuensi radio meliputi parameter teknis, jumlah pengguna, dan data administrasi yang sesuai dengan Izin Stasiun Radio yang telah ditetapkan di wilayah Kepulauan Riau
- e. Tersedianya informasi data kepadatan pendudukan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam;
- f. Mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Weakness (kelemahan)

- a. Bentuk geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau sehingga memerlukan waktu, sarana dan prasarana transportasi untuk menuju suatu wilayah;
- b. Sumber daya manusia yang dimiliki masih memerlukan pengembangan kompetensi untuk menghadapi tantangan era digital;
- c. Infrastruktur televisi digital belum sepenuhnya menjangkau wilayah

- layanan Kepulauan Riau 1, 2, 3, dan 4;
- d. Masih ditemukan pengguna frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio, tidak sesuai parameter teknis, dan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat.

3. Opportunity (Peluang)

- a. Kanal spektrum frekuensi radio di propinsi kepulauan riau masih cukup banyak;
- b. Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan telekomunikasi digital sangat tinggi
- c. Kemungkinan memperoleh frekuensi lebih banyak untuk kebutuhan ekonomi digital sangat besar;
- d. Pengembangan teknologi dan layanan baru membutuhkan tambahan kebutuhan alokasi spektrum frekuensi radio;
- e. Pengembangan daerah layanan operator seluler untuk mencakup wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil) menggunakan frekuensi radio *Microwave Link* point to point masih sangat diperlukan;
- f. Dengan digantikannya televisi analog ke televisi digital maka akan terjadi penghematan kanal frekuensi radio yang sebelumnya satu kanal frekuensi hanya untuk satu televisi sekarang dapat digunakan oleh enam atau lebih stasiun televisi siaran pada satu kanal yang sama;
- g. Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tetangga (Singapura dan Malaysia) dapat menciptakan hubungan Trilateral antar negara khususnya di bidang pemanfaatan penggunaan spektrum frekuensi radio.

4. Threat (Ancaman)

- a. Balai Monitor SFR Kelas II Batam memiliki 6 stasiun monitoring di 2 Kota dan 3 Kabupaten saja, sehingga belum bisa



mencakup seluruh kota/kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Sebagai Wilayah yang berbatasan dengan negara lain (Singapura dan Malaysia), wilayah Kepulauan Riau mempunyai kanal yang terbatas dan beririsan dengan negara tetangga serta berpotensi terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio;
- c. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. Masuknya alat dan/atau perangkat telekomunikasi ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam yang belum tersertifikasi.

Isu Strategis (Strategic Issues)

Sebagai propinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam juga menghadapi isu-isu strategis yang terkait dengan penanganan frekuensi radio antara lain yaitu :

1. Interferensi Frekuensi : Interferensi frekuensi dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dapat mengganggu kualitas siaran radio dan komunikasi di Batam.
2. Keterbatasan Kanal : Keterbatasan kanal radio di perbatasan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengalokasikan frekuensi untuk siaran radio dan komunikasi lainnya.
3. Pengawasan Spektrum Frekuensi : Pengawasan spektrum frekuensi yang lemah dapat memungkinkan penggunaan frekuensi ilegal dan mengganggu keamanan komunikasi.
4. Kerjasama Regional : Kerjasama dengan Singapura dan Malaysia sangat penting untuk mengatasi isu-isu terkait frekuensi radio dan meningkatkan kualitas komunikasi di kawasan perbatasan.
5. Pengembangan Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi

dan mengurangi ketergantungan pada satelit.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah, seperti memperkuat pengawasan spektrum frekuensi, meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga, dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi.

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam meliputi:

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Bab II **Perjanjian Kinerja**



Rencana Strategis Tahun 2025–2029

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan pedoman lima tahunan untuk transformasi digital nasional, berfokus pada konektivitas inklusif, ekosistem digital memberdayakan, serta ruang digital aman sesuai RPJMN 2025–2029.

Untuk itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Infrastruktur Digital di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Pos dan Informatika mendukung sepenuhnya rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

Sasaran Kegiatan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Infrastruktur Digital di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Pos dan Informatika mendukung sepenuhnya program Kementerian Komunikasi dan Digital pada periode 2025–2029 yang telah disusun merupakan sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Untuk mengukur dan mencapai kinerja pertama ini, dilanjutkan dengan melaksanakan indikator kinerja dengan melaksanakan, yaitu :

- a. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- b. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

- c. Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR
- d. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital
- e. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT
- f. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif
- g. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan
- h. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)
- i. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio
- j. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik
- k. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)
- l. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)
- m. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi *Site* *ISR Microwave Link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Untuk mengukur dan mencapai kinerja ketiga ini, dilanjutkan dengan melaksanakan indikator kinerja, dengan melaksanakan, yaitu :

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025
- b. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam memiliki peran

dalam mencapai beberapa target Sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital tahun 2025 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> <i>ISR Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	86.95
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja anggaran tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11.843.650.000 yang terdiri dari anggaran DIPA

Tahun 2025 dengan Kode Satker Lama (653970) sebesar Rp. 4.955.599.000,- dan DIPA Tahun 2025 dengan Kode Satker Baru (694708) sebesar Rp. 6.888.051.000,-.



Bab III

Akuntabilitas Kinerja



Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja 2025 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam.

Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tahun 2025 seperti tabel di bawah.

Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR	95%	100%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%
		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)	100%	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	150%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	124%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	109%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR <i>Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	86.95	86.19
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100



SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

Berdasarkan rencana sasaran 1, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam berupaya meningkatkan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi pada tahun 2025 dengan cara, yaitu:

- Melakukan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/ Kota di wilayah Kepulauan Riau tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kepadatan frekuensi di wilayah kabupaten tersebut, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital.
- Melakukan pemeriksaan stasiun radio pada *Microwave Link*, pengguna *big user*, melakukan pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital dan melakukan monitoring perangkat.

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang handal agar tidak terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*Harmful Interference*) bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

d. Melakukan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

e. Untuk menjamin Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT diperlukan pemeliharaan rutin, berkala, dan berkesinambungan sehingga dapat memudahkan dan menunjang tugas operasional monitoring frekuensi radio.

IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaa Spektrum Frekuensi Radio

Target indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/

Kota pada tahun 2025 adalah 80% dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.



Grafik 1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%

1.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas milik negara yang pemanfaatannya wajib dikendalikan dan diawasi secara berkelanjutan untuk menjamin ketertiban penggunaan serta menjaga kualitas layanan komunikasi publik. Di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam yang memiliki karakteristik perkotaan, industri, dan perbatasan internasional, kepadatan penggunaan pita frekuensi serta potensi interferensi lintas negara menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penggunaan frekuensi tanpa izin, ketidaksesuaian parameter teknis terhadap Izin Stasiun Radio (ISR), serta potensi gangguan terhadap layanan publik dan layanan strategis seperti pelayaran dan penerbangan apabila tidak diawasi secara sistematis.

Untuk menjawab akar permasalahan tersebut, diperlukan indikator yang mampu mengukur cakupan monitoring wilayah sekaligus memastikan tindak lanjut administratif atas setiap temuan pelanggaran. Tanpa mekanisme monitoring dan pengeanaan sanksi yang terukur,

pengawasan spektrum berpotensi bersifat reaktif dan tidak merata di seluruh kabupaten/kota wilayah kerja, sehingga terdapat gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal berupa tertib spektrum dan kepatuhan penuh terhadap regulasi.

Maksud penyusunan indikator Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Pengeanaan Sanksi terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota adalah untuk menyediakan alat ukur kinerja yang terstruktur dalam memastikan pelaksanaan monitoring dan penegakan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan secara terencana, terukur, dan selaras dengan Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2025.

Tujuan indikator ini adalah untuk menjamin terlaksananya monitoring penggunaan spektrum di seluruh kabupaten/kota wilayah kerja serta memastikan setiap temuan pelanggaran ditindaklanjuti melalui pembinaan atau sanksi administratif sesuai ketentuan. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Metode Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Termonitor}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Wilayah Kerja UPT}}$$

Data bersumber dari laporan kegiatan Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota selama tahun berjalan yang diverifikasi melalui dokumentasi hasil pengawasan dan tindak lanjut administratif. Dengan demikian, indikator ini mendukung pengendalian spektrum yang efektif, peningkatan kepatuhan ISR, serta perlindungan kualitas layanan komunikasi publik dan kepentingan nasional di wilayah perbatasan.

1.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Pengeanaan Sanksi terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio. Monitoring yang terstruktur dan tindak lanjut administratif atas setiap temuan pelanggaran mendorong tertib penggunaan frekuensi sesuai ISR dan parameter teknis, sehingga menurunkan potensi interferensi serta meningkatkan stabilitas layanan komunikasi publik. Dampak ini dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan telekomunikasi, operator

penyelenggara jaringan, serta instansi strategis seperti pelayaran dan penerbangan yang memerlukan keandalan komunikasi radio tanpa gangguan.

Secara tidak langsung, pengendalian spektrum frekuensi radio yang efektif mendukung keberlanjutan kualitas jaringan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi digital di wilayah kerja Balmon Batam, termasuk Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Stabilitas layanan komunikasi memperkuat kepercayaan pelaku usaha, mendukung kelancaran logistik dan industri, serta berkontribusi terhadap peningkatan akses informasi dan layanan publik berbasis digital. Dengan demikian, monitoring dan penegakan sanksi atas penggunaan spektrum frekuensi radio bukan sekadar kegiatan operasional, melainkan prasyarat penting bagi terjaganya kualitas layanan, perlindungan kepentingan nasional di wilayah perbatasan, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.



Kegiatan Posko Monitoring Idul Fitri 1446 H Tahun 2025



1.3 Tabulasi Data Capaian Capaian Kumulatif

Tabel 6. Data Capaian Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Total ISR Target	Total ISR Termonitor	Total Target Teridentifikasi	Total Teridentifikasi
1	Kota Batam	256	371	6.522	8.152
2	Kabupaten Bintan	57	76	1.726	2.157
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	47	73	98	122
4	Kabupaten Karimun	32	54	1.497	1.871
5	Kota Tanjung Pinang	24	39	1.082	1.352
6	Kabupaten Natuna	20	33	286	358
7	Kabupaten Lingga	5	9	32	40
TOTAL		441	655	11.243	14.052

Pita Penugasan

Tabel 7. Target Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

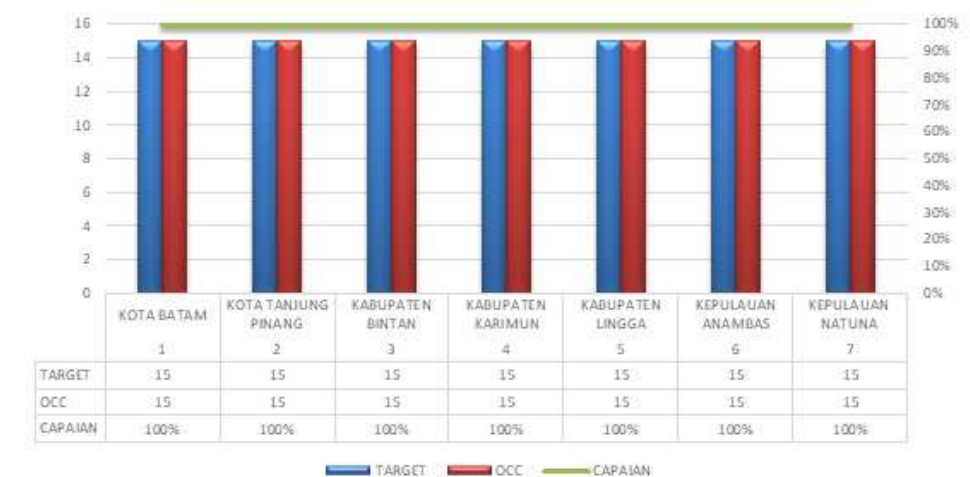
No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 – 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 – 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 – 174
4	DRM, DAB *INS05	174 – 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 – 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 – 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 – 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 – 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 – 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 – 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 – 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 – 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 – 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 – 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 – 2400

Identifikasi Hasil

1. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/ Kota

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dilaksanakan melalui observasi dan identifikasi pada minimal 15 pita frekuensi radio di seluruh 7 kabupaten/kota, yaitu Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten

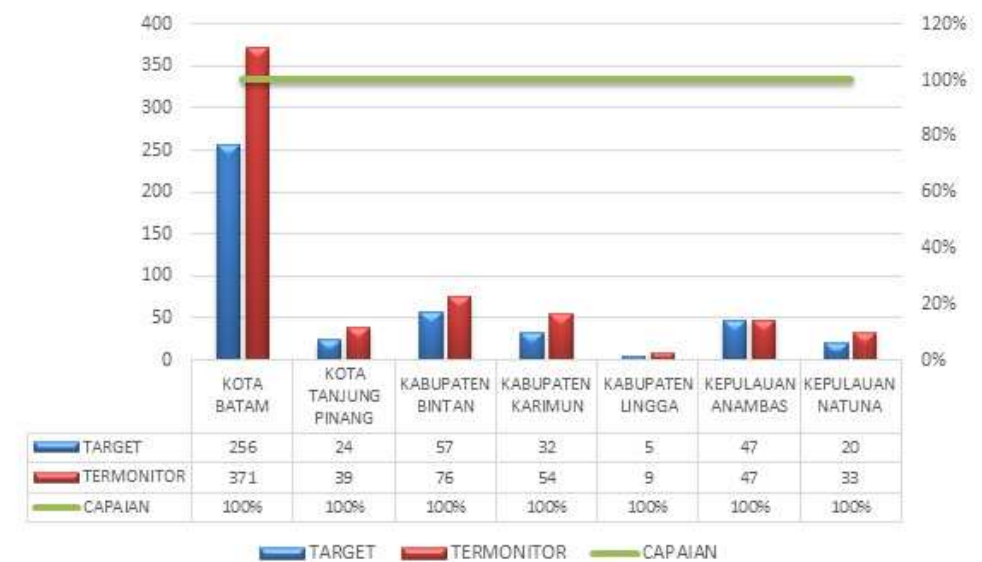
Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan data *cut off* 10 Desember 2025, seluruh 7 kabupaten/kota telah termonitor (100%), dengan pelaksanaan observasi pada 15 pita frekuensi di masing-masing wilayah, sehingga capaian monitoring kabupaten/kota memenuhi target PK UPT 2025 secara penuh.



Grafik 2. Capaian OCC Pita Frekuensi Radio Per Kabupaten/Kota

Dalam aspek pemantauan Izin Stasiun Radio (ISR), dari target 441 ISR pada 7 kabupaten/kota, telah berhasil dimonitor sebanyak 655 ISR, melampaui target minimal 60% yang ditetapkan. Secara rinci, Kota Batam memonitor 371 ISR dari target 256, Bintan 76 dari 57, Karimun 54 dari 32,

Kota Tanjung Pinang 39 dari 24, Natuna 33 dari 20, Kepulauan Anambas 73 dari 47, dan Lingga 9 dari 5. Capaian ini menunjukkan intensitas monitoring yang tidak hanya memenuhi target minimal, tetapi juga melebihi target yang ditetapkan dalam PK.



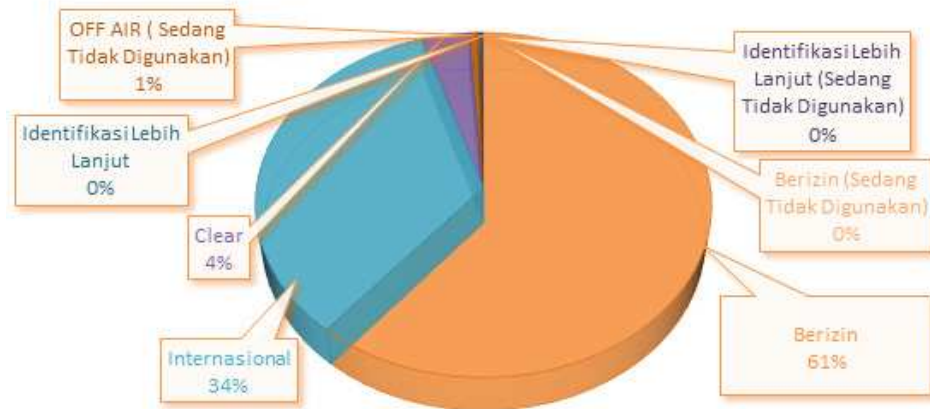
Grafik 3. Capaian Izin Stasiun Radio Termonitor Per Kabupaten/Kota

Selanjutnya, dari total 11.243 penggunaan frekuensi radio yang termonitor, telah teridentifikasi sebanyak 14.052 penggunaan frekuensi radio atau sebesar 100% terhadap target identifikasi yang ditetapkan per wilayah. Secara agregat, komposisi hasil identifikasi menunjukkan 8.345 penggunaan berizin (61,04%), 2.853 penggunaan internasional (34,19%), 304 clear (3,64%), 58 off air (0,7%), dan

30 memerlukan identifikasi lebih lanjut (0,18%). Berdasarkan keseluruhan parameter tersebut—cakupan kabupaten/kota, monitoring ISR, dan identifikasi hasil monitoring Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 tercapai sebesar 100%, sesuai dan melampaui target Perjanjian Kinerja UPT.



Grafik 4. Capaian Izin Stasiun Radio Teridentifikasi Per Kabupaten/Kota

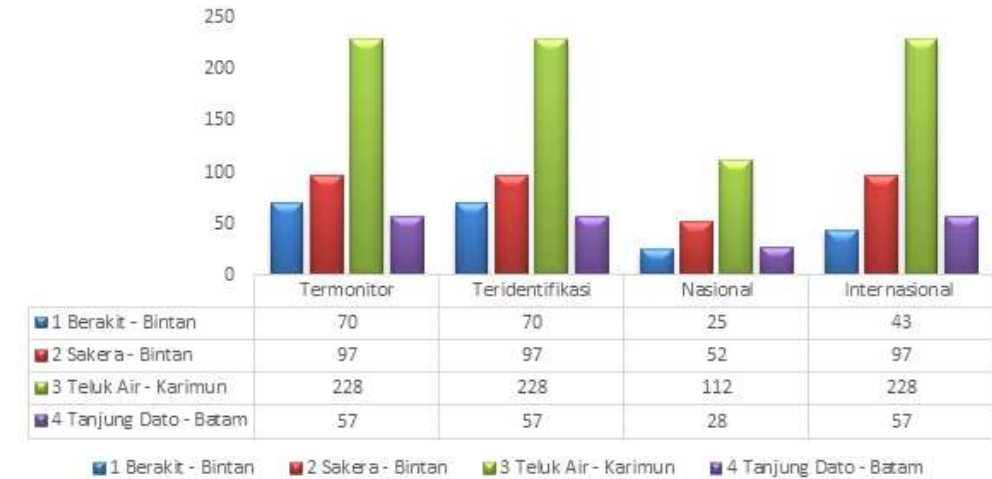
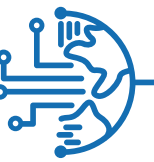


Grafik 5. Label Legalitas

2. Monitoring Pita Frekuensi Radio Wilayah Perbatasan

Kegiatan Monitoring Wilayah Perbatasan dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian spektrum frekuensi radio dalam rangka menjaga kedaulatan spektrum nasional dan mendukung koordinasi frekuensi bilateral maupun regional dengan negara tetangga. Berdasarkan data *cut off* 10 Desember 2025, telah dilakukan monitoring pada titik-titik representatif wilayah perbatasan dengan total 704 pancaran spektrum frekuensi radio termonitor dan seluruhnya berhasil teridentifikasi (100%). Capaian ini memenuhi target bahwa 100% hasil monitoring spektrum frekuensi radio yang berasal dari negara lain maupun domestik harus teridentifikasi.

Dari 704 pancaran yang termonitor, komposisi layanan meliputi dinas *Broadcast* sebanyak 445 pancaran, *Land Mobile (public)* 201 pancaran, *Other Services* 25 pancaran, *Aeronautical* 15 pancaran, serta layanan *Maritime*, *Satellite*, dan *Land Mobile (private)* masing-masing 6 pancaran. Berdasarkan pita frekuensi, dominasi terdeteksi pada VHF sebanyak 365 pancaran, UHF 318 pancaran, dan SHF 21 pancaran. Dari aspek legalitas, teridentifikasi 394 pancaran bersumber internasional, 281 pancaran berizin nasional, dan 29 pancaran clear. Data ini menunjukkan intensitas pancaran lintas batas yang signifikan di wilayah perairan perbatasan Batam, Bintan, dan sekitarnya, sehingga monitoring berkala menjadi krusial untuk menjaga stabilitas spektrum dan mencegah interferensi lintas negara.



Grafik 6. Data Monitoring Wilayah Perbatasan Tahun 2025

Capaian 100% identifikasi pada wilayah perbatasan menunjukkan efektivitas pelaksanaan monitoring berbasis lokasi representatif pengguna spektrum kedua negara, khususnya pada layanan siaran (FM dan DVB-T) serta layanan seluler (LTE dan GSM). Kegiatan ini tidak hanya mendukung pemenuhan target PK UPT 2025, tetapi juga menjadi instrumen strategis

dalam perlindungan kepentingan nasional di bidang spektrum frekuensi radio serta menjaga kualitas layanan komunikasi masyarakat dan layanan strategis seperti pelayaran dan penerbangan di wilayah perbatasan.

3. Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

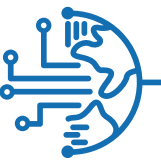
Tabel 8. Benchmark Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dengan UPT Lainnya

Indikator Kinerja	Balmon Batam		Balmon Mataram		Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	80%	100%	Presentase Capaian Balmon Batam dan Balmon Mataram sama – sama 100%

1.4 Analisa yang terkait indikator kinerja secara umum dan holistik

Secara nasional, pengawasan spektrum frekuensi radio di Indonesia terus diperkuat seiring meningkatnya kepadatan penggunaan spektrum untuk layanan seluler, penyiaran, radio komunikasi, hingga layanan keselamatan (maritim dan aeronautika). Tren peningkatan kebutuhan konektivitas digital mendorong perlunya monitoring yang lebih intensif, terukur, dan berbasis data untuk memastikan kepatuhan

terhadap izin (ISR) dan parameter teknis, sekaligus mencegah terjadinya interferensi yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, capaian monitoring kabupaten/kota yang merata serta kemampuan identifikasi penggunaan frekuensi yang tinggi merupakan indikator bahwa tata kelola pengawasan spektrum telah berkembang dari sekadar respon gangguan menuju pengendalian yang lebih preventif dan sistematis.



Dalam praktik regional dan internasional, negara-negara maju umumnya telah mengadopsi pendekatan pengawasan spektrum yang terintegrasi dan semakin *real-time* melalui jejaring sensor tetap, pemanfaatan analitik berbasis data, serta mekanisme inspeksi dan penegakan yang berbasis risiko. Pendekatan tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan berbiaya efisien, termasuk untuk mendeteksi anomali pancaran, pemanfaatan pita tanpa izin, dan potensi gangguan lintas layanan. Sebaliknya, banyak negara berkembang masih menghadapi keterbatasan cakupan infrastruktur monitoring, jumlah SDM teknis, dan tantangan geografis, sehingga pengawasan cenderung mengandalkan operasi lapangan periodik dengan prioritas wilayah. Tantangan ini semakin kompleks untuk negara kepulauan atau wilayah luas, karena penyebaran lokasi pemancar, akses transportasi, serta potensi pancaran lintas batas memerlukan strategi pengawasan berlapis antara monitoring jarak jauh dan operasi lapangan.

Posisi Indonesia berada pada spektrum yang progresif, dengan kerangka regulasi dan sistem nasional pengawasan yang semakin terkonsolidasi, namun masih menghadapi tantangan pemerataan kualitas pengawasan di wilayah terpencil dan perbatasan. Dalam konteks Balmon Batam, kompleksitas tersebut lebih menonjol karena wilayah kerja mencakup kawasan industri, kepulauan, dan perbatasan internasional yang memiliki intensitas pancaran lintas negara relatif tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan capaian indikator tidak hanya ditentukan oleh luas cakupan monitoring, tetapi juga oleh kemampuan identifikasi pancaran secara akurat, konsistensi tindak lanjut administratif, serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan berikutnya.

Benchmarking strategi yang relevan dengan konteks nasional menunjukkan bahwa faktor pembeda utama adalah integrasi sistem pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan sistem nasional seperti SMFR, ROL, dan APSTARD memungkinkan pelaksanaan monitoring yang lebih terarah, termasuk penentuan target ISR aktif, pemilihan pita prioritas, serta pemetaan potensi pelanggaran secara lebih cepat. Pendekatan operasi tematik berbasis risiko interferensi—misalnya fokus pada pita padat, wilayah industri, pelabuhan, bandara, dan titik perbatasan—selaras dengan praktik internasional yang mengutamakan risk-based monitoring. Selain itu, penguatan integrasi data hasil monitoring untuk mendukung kebijakan penataan frekuensi dan pembinaan kepatuhan menjadi inovasi penting agar pengawasan tidak berhenti pada *output* kegiatan, tetapi menghasilkan *outcome* pengendalian spektrum yang berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian target indikator pada tahun berjalan didorong oleh beberapa strategi kunci, yaitu perencanaan monitoring berbasis data ISR dan kepadatan spektrum, pelaksanaan monitoring lintas wilayah yang terkoordinasi, optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan operator). Kompetensi teknis petugas dan disiplin dokumentasi hasil monitoring turut memastikan validitas data dan keterlacakan tindak lanjut. Dengan demikian, keberhasilan indikator ini tidak semata ditentukan oleh jumlah kegiatan monitoring, melainkan oleh kualitas pelaksanaan, pemerataan wilayah, ketepatan identifikasi, serta konsistensi pemanfaatan hasil monitoring untuk pembinaan dan peneraan sanksi administratif dalam kerangka pengendalian spektrum frekuensi radio.

1.5 Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian

Target Dan Upaya Percepatan/Perbaikan Berdasarkan realisasi tahun berjalan, target Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota telah tercapai 100% sesuai Perjanjian Kinerja UPT 2025, bahkan pada beberapa parameter seperti jumlah ISR termonitor dan penggunaan frekuensi teridentifikasi melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala operasional yang perlu dicatat sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Wilayah kerja Balmon Batam yang mencakup kawasan kepulauan dan perbatasan internasional menghadapi tantangan geografis berupa jarak antar pulau, keterbatasan akses transportasi laut, serta faktor cuaca yang mempengaruhi jadwal operasi lapangan. Selain itu, kepadatan penggunaan spektrum di wilayah industri dan perairan perbatasan menuntut intensitas monitoring yang lebih tinggi dibanding wilayah daratan biasa, sementara jumlah personel dan perangkat monitoring harus dioptimalkan secara efisien.

Kendala tersebut berdampak pada kebutuhan prioritas wilayah dan pita frekuensi tertentu, sehingga pelaksanaan monitoring harus disusun berbasis risiko interferensi dan kepadatan penggunaan. Dalam beberapa periode, penjadwalan ulang kegiatan lapangan diperlukan untuk menyesuaikan kondisi cuaca atau ketersediaan akses ke lokasi pemancar. Selain itu, dinamika penggunaan spektrum termasuk pancaran lintas negara menuntut peningkatan ketelitian identifikasi dan koordinasi teknis yang lebih intensif. Kondisi ini berpotensi membatasi frekuensi kunjungan fisik pada wilayah tertentu apabila tidak diimbangi dengan strategi pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan, telah dilakukan optimalisasi penggunaan

sistem monitoring nasional seperti SMFR dan ROL untuk memperkuat pemantauan berbasis data tanpa selalu bergantung pada kunjungan fisik. Pendekatan monitoring berbasis risiko interferensi diterapkan untuk menentukan lokasi prioritas, khususnya pada wilayah perbatasan dan kawasan dengan kepadatan spektrum tinggi. Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta operator penyelenggara jaringan juga diperkuat untuk mempercepat tindak lanjut temuan dan menjaga kepatuhan penggunaan spektrum. Meskipun terdapat kendala operasional, masyarakat tetap merasakan manfaat berupa terjaganya kualitas layanan komunikasi utama serta penanganan cepat terhadap potensi gangguan kritis, sehingga indikator ini tetap memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas layanan dan ketertiban spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, target kinerja tahun berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) UPT Tahun 2025 pada prinsipnya telah tercapai, khususnya terkait capaian minimal 80% kabupaten/kota termonitor, pemantauan minimal 15 pita frekuensi prioritas, pemantauan penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR) melalui sistem, serta penindaklanjutan temuan pelanggaran dengan sanksi administratif. Namun demikian, dalam proses pencapaiannya masih terdapat sejumlah kendala operasional yang memengaruhi intensitas dan pemerataan pelaksanaan monitoring di seluruh wilayah kerja Balmon Batam.

Kendala utama yang dihadapi antara lain kondisi geografis wilayah kerja yang terdiri atas pulau-pulau dan wilayah perbatasan dengan tingkat aksesibilitas yang berbeda-beda, dipengaruhi pula oleh faktor cuaca



dan keterbatasan sarana transportasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan monitoring yang harus digunakan secara bergantian, serta keterbatasan waktu pelaksanaan operasi lapangan, berdampak pada keterbatasan frekuensi kunjungan monitoring di beberapa wilayah tertentu. Kondisi tersebut menuntut adanya prioritas wilayah berisiko tinggi, sehingga cakupan monitoring di wilayah dengan risiko relatif rendah dilakukan dengan intensitas yang lebih terbatas.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan Balmon Kelas II Batam telah dan terus melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh melalui SMFR, ROL, dan APSTARD, penerapan pendekatan monitoring berbasis tingkat risiko interferensi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan operator penyelenggara jaringan. Penjadwalan ulang dan pemfokusan operasi pada wilayah prioritas juga dilakukan untuk memastikan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan, dampak positif tetap dirasakan oleh masyarakat melalui terjaganya kualitas layanan komunikasi pada wilayah utama serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang bersifat kritis dan mendesak secara tepat waktu.

1.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dan rekap kinerja indikator IK-1 dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional dalam pengendalian spektrum di wilayah kerja Balmon SFR Kelas II Batam. Data capaian kabupaten/kota termonitor, ISR termonitor, serta hasil identifikasi penggunaan frekuensi menjadi input utama untuk penetapan wilayah prioritas dan penyusunan operasi Montib tematik berbasis risiko interferensi, termasuk pada kawasan

industri, pelabuhan/bandara, serta titik-titik strategis perbatasan internasional. Selain itu, hasil identifikasi penggunaan spektrum (berizin, internasional, clear, off air, dan yang memerlukan identifikasi lanjutan) digunakan sebagai bahan koordinasi dengan penyelenggara jaringan, pemerintah daerah, dan instansi terkait, sekaligus menjadi referensi teknis untuk pembinaan kepatuhan ISR serta penanganan potensi gangguan layanan publik.

Tindak lanjut konkret atas temuan monitoring dilakukan melalui mekanisme verifikasi lanjutan, penyampaian rekomendasi teknis, serta penegakan kepatuhan melalui pembinaan dan/atau pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan terhadap setiap temuan pelanggaran. Hasil monitoring juga dimanfaatkan untuk pemutakhiran basis data pengawasan (SMFR/ROL) agar data ISR aktif dan profil penggunaan spektrum semakin valid, sehingga proses monitoring berikutnya lebih tepat sasaran dan mengurangi kebutuhan survei ulang. Untuk wilayah perbatasan, hasil monitoring pancaran lintas negara dimanfaatkan sebagai bahan pemetaan intensitas pancaran, penguatan kewaspadaan spektrum pada pita dominan, serta mendukung langkah-langkah pengendalian spektrum dalam rangka perlindungan kepentingan nasional.

Rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan antara lain penguatan perencanaan operasi berbasis data (risk-based planning), peningkatan pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh melalui SMFR dan pemantauan ISR melalui ROL, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk percepatan tindak lanjut temuan. Apabila pada periode tertentu indikator ini mengalami penyesuaian dalam dokumen PK, tindak lanjut atas hasil rekomendasi tetap dilaksanakan dan dicatat sebagai kinerja

lainnya hasil tindak lanjut rekomendasi kinerja tahun sebelumnya, sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam pengendalian spektrum frekuensi radio.

1.7 Rekomendasi Perbaikan

Meskipun capaian indikator Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tahun 2025 telah memenuhi target, evaluasi pelaksanaan menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pemerataan intensitas monitoring dan peningkatan kualitas analisis hasil pengawasan. Beberapa wilayah kepulauan dan titik perbatasan masih memerlukan frekuensi monitoring yang lebih konsisten untuk mengantisipasi dinamika pancaran lintas negara dan pertumbuhan penggunaan spektrum. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya perlu dilakukan penajaman prioritas wilayah berbasis tingkat risiko interferensi, kepadatan pita frekuensi, serta histori temuan pelanggaran, sehingga alokasi waktu dan sumber daya dapat lebih tepat sasaran.

Dari sisi operasional, diperlukan peningkatan integrasi data antara sistem SMFR, ROL, dan hasil identifikasi lapangan untuk membentuk basis data pengawasan yang lebih komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan secara preventif. Penguatan analisis tren gangguan dan kepatuhan ISR perlu menjadi bagian dari perencanaan monitoring tahunan, sehingga kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat rutin, tetapi mampu mengantisipasi potensi pelanggaran sebelum berdampak pada layanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi teknis petugas dalam pemanfaatan perangkat ukur digital dan analitik data spektrum menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemeriksaan.

Rekomendasi ini selaras dengan kebijakan nasional DJID dalam memperkuat

pengendalian spektrum, meningkatkan kepatuhan penggunaan frekuensi, serta menjaga kualitas layanan komunikasi publik, khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan, indikator ini diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian kuantitatif 100%, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan, efektivitas tindak lanjut sanksi administratif, serta kontribusi nyata terhadap stabilitas layanan dan kepentingan nasional di bidang spektrum frekuensi radio.

1.8 Efisiensi

Pencapaian indikator Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tahun 2025 dilakukan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa penambahan personel maupun sarana utama. Secara kuantitatif, pelaksanaan monitoring terhadap 7 kabupaten/kota, 15 pita frekuensi penugasan, serta 655 ISR termonitor dilaksanakan dengan komposisi tim yang relatif tetap pada setiap kegiatan operasi lapangan. Melalui penggabungan fungsi monitoring, identifikasi, dan penertiban dalam satu rangkaian kegiatan Montib, jumlah ISR yang dimonitor mampu melampaui target 441 ISR atau mencapai 142,63% dari target dengan jumlah tim yang sama. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas per kegiatan monitoring dibandingkan tahun sebelumnya.

Efisiensi waktu dicapai melalui penyusunan rute operasi berbasis klaster wilayah dan kepadatan spektrum, sehingga dalam satu kali perjalanan lapangan dapat mencakup beberapa titik pemancar sekaligus. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan kunjungan terpisah ke lokasi yang berdekatan dan mempercepat waktu respons terhadap laporan gangguan spektrum. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem SMFR dan ROL sebagai dasar pra-analisis



memungkinkan sebagian proses identifikasi dilakukan sebelum kegiatan lapangan, sehingga durasi pemeriksaan di lokasi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan.

Efisiensi pemanfaatan sarana dan sistem juga tercermin dari capaian 14.052 penggunaan frekuensi teridentifikasi dari target 11.243 penggunaan, yang diperoleh melalui integrasi data monitoring jarak jauh dan observasi lapangan secara terpadu.

Pendekatan ini mengurangi kebutuhan survei ulang akibat ketidakakuratan data serta meminimalkan kunjungan berulang ke lokasi yang sama. Optimalisasi sarana dan sistem yang telah tersedia tersebut menunjukkan bahwa peningkatan capaian indikator diperoleh melalui penyempurnaan proses kerja dan pemanfaatan teknologi, bukan melalui penambahan sumber daya baru, serta tetap menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel.

Tabel 9. Efisiensi Anggaran Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio	412.692.000	412.691.112	888

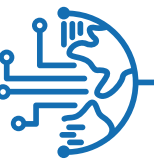
1.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Pelaksanaan indikator Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Pengenaan Sanksi terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dilandasi oleh penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai fondasi budaya kerja ASN. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari komitmen Tim Montib dalam menjaga kualitas layanan komunikasi masyarakat serta memastikan layanan strategis seperti pelayaran, penerbangan, dan layanan publik tidak terganggu akibat interferensi spektrum. Setiap kegiatan monitoring dan identifikasi pancaran dilakukan dengan tujuan utama melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin keberlangsungan konektivitas yang andal.

Nilai Akuntabel diwujudkan melalui pencatatan seluruh hasil monitoring,

identifikasi, dan tindak lanjut sanksi administratif dalam sistem resmi seperti SMFR dan ROL, serta penyusunan laporan kegiatan yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Seluruh proses pengawasan dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, sehingga setiap temuan memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas. Nilai Kompeten menjadi salah satu faktor dominan dalam keberhasilan indikator ini, ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas teknis petugas dalam pengoperasian perangkat monitoring, analisis data frekuensi, serta pemahaman regulasi ISR dan ketentuan teknis penggunaan spektrum.

Nilai Harmonis dan Kolaboratif tercermin dari koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, operator penyelenggara jaringan, serta lintas Balmon dalam pengawasan wilayah perbatasan. Sinergi tersebut



memungkinkan penanganan potensi pelanggaran dan interferensi dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Sementara itu, nilai Loyal tercermin dari konsistensi pelaksanaan monitoring dalam mendukung agenda prioritas nasional pengendalian spektrum dan transformasi digital. Nilai Adaptif diwujudkan melalui kemampuan tim menyesuaikan metode monitoring terhadap perkembangan teknologi perangkat radio, kepadatan spektrum di kawasan industri, serta dinamika pancaran lintas negara di wilayah perbatasan.

Secara keseluruhan, penerapan nilai BerAKHLAK dengan penekanan pada Kompeten dan Kolaboratif sebagai faktor kunci menjadi penggerak utama keberhasilan pencapaian indikator kinerja. Budaya kerja tersebut memastikan bahwa kegiatan monitoring dan penegakan sanksi tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga menjaga kualitas pengawasan, ketertiban spektrum, serta keberlanjutan layanan komunikasi bagi masyarakat dan kepentingan nasional.





IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Target indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio di Kab/Kota pada tahun 2025 adalah 80% pada pemeriksaan melalui *remote site*



Grafik 7. Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%

2.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya wajib sesuai dengan ketentuan perizinan serta parameter teknis yang tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR). Setiap stasiun radio, baik *microwave link*, siaran Radio FM, maupun Televisi Digital, harus beroperasi sesuai karakteristik teknis yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya interferensi, degradasi kualitas layanan, maupun gangguan terhadap layanan publik dan

dan target pemeriksaan melalui inspeksi (*open shelter*) sekurang – kurangnya 60% dari data target pemeriksaan yang telah ditetapkan dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.

keselamatan. Dalam praktiknya, terdapat potensi ketidaksesuaian parameter teknis, perubahan konfigurasi perangkat tanpa pelaporan, serta risiko interferensi lintas negara di wilayah perbatasan Batam. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme pemeriksaan yang sistematis, terencana, dan terdokumentasi melalui Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD) dan Report Online (ROL).

Indikator Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio disusun sebagai instrumen



pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa target pemeriksaan *remote site* dan inspeksi (*open shelter*) dilaksanakan sesuai ketentuan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Indikator ini memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna layanan komunikasi melalui terjaganya kualitas dan stabilitas jaringan, bagi penyelenggara jaringan dan penyiaran melalui kepastian kepatuhan teknis, serta bagi instansi strategis seperti pelayaran, penerbangan, dan keselamatan publik melalui pengendalian pancaran radio yang sesuai standar.

Maksud penetapan indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio adalah untuk mengukur tingkat pelaksanaan pemeriksaan teknis dan tindak lanjut pelanggaran terhadap stasiun radio yang menjadi target tahunan, sehingga pengawasan kepatuhan terhadap ISR dan parameter teknis dapat dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berbasis data

Tujuan dari indikator ini adalah memastikan seluruh stasiun radio yang menjadi target pemeriksaan telah diverifikasi kesesuaian teknis dan administrasinya, termasuk tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan, guna meningkatkan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, menjaga kualitas layanan komunikasi publik, serta mendukung kebijakan nasional pengendalian dan optimalisasi spektrum.

Data bersumber dari laporan kegiatan pemeriksaan *remote site* dan inspeksi (*open shelter*) yang dicatat dalam APSTARD dan ROL, diverifikasi melalui berita acara pemeriksaan serta dokumen tindak lanjut, dan dihitung selama periode tahun berjalan sesuai mekanisme pelaporan yang ditetapkan.

2.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan komunikasi publik. Melalui pemeriksaan *remote site Microwave Link*, inspeksi *open shelter*, serta pengukuran parameter teknis siaran Radio FM dan TV Digital, kesesuaian teknis antara ISR dan kondisi lapangan dapat diverifikasi secara objektif. Hal ini menurunkan potensi interferensi, meminimalkan gangguan layanan, serta memastikan parameter teknis seperti frekuensi, *bandwidth*, daya pancar, dan deviasi sesuai dengan ketentuan. Dampak tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan komunikasi yang lebih stabil, jernih, dan bebas gangguan.

Dari aspek keselamatan dan kepatuhan, pemeriksaan stasiun radio berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan frekuensi dan penggunaan perangkat yang tidak sesuai izin. Di wilayah perbatasan seperti Batam dan sekitarnya, kegiatan ini juga berkontribusi dalam pengendalian pancaran lintas negara yang berpotensi mengganggu kedaulatan spektrum nasional. Dengan meningkatnya kepatuhan ISR, risiko gangguan terhadap layanan strategis seperti pelayaran, penerbangan, dan sistem komunikasi darurat dapat ditekan secara signifikan.

Secara tidak langsung, keberlanjutan kualitas jaringan yang terjaga melalui pemeriksaan teknis mendukung aktivitas ekonomi digital dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap infrastruktur telekomunikasi daerah. Stabilitas jaringan menjadi prasyarat penting bagi operasional industri, UMKM berbasis daring, serta layanan publik berbasis digital. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengawasan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pertumbuhan



ekonomi daerah dan perlindungan kepentingan nasional di bidang spektrum.

2.3 Tabulasi

1. Pemeriksaan Stasiun Radio
Kegiatan pemeriksaan stasiun radio terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

pemeriksaan *Microwave Link* melalui metode *remote site* dan inspeksi *open shelter* serta pengukuran stasiun radio melalui pengukuran parameter teknis dan karakteristik radio siaran FM dan TV siaran Digital.

Perhitungan untuk Capaian :

$$\text{Metode Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah yang dilakukan pemeriksaan Stasiun Radio+Data Tindaklanjutan temuan@pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi}}{\text{Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling+total@data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio}} \times 100\%$$

% *Remote site* diperoleh dari perhitungan :

$$\% \text{ Remote site} = \frac{\text{Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site}}{\text{Total target data yang diperiksa}} \times 100\%$$

% Inspeksi diperoleh dari perhitungan :

$$\% \text{ Open shelter} = \frac{\text{Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site}}{\text{Total target data yang diperiksa}} \times 100\%$$

% Stasiun Siaran diperoleh dari perhitungan :

$$\% \text{ Stasiun Siaran} = \frac{\text{Jumlah stasiun siaran radio FM+Jumlah stasiun siaran TV Digital Terrestrial yang dilakukan pengukuran}}{\text{Target pengukuran stasiun siaran radio FM+Target pengukuran stasiun siaran TV Digital Terrestrial}} \times 100\%$$

Pemeriksaan *microwave link* perlu dilakukan untuk memastikan sistem transmisi beroperasi secara optimal, andal, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan *microwave link* dilakukan dengan mengakses NOC (*Network*

Operation Center) dan NMS (*Network Management System*) melalui *Remote Site* dan *Open Shelter* untuk mengetahui perkembangan data BTS seluler serta pemakaian frekuensi *point to point* di wilayah layanan Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan *microwave*



link diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama terkait dengan akurasi hasil analisa teknis penetapan frekuensi radio dan mencegah potensi interferensi di lapangan.

2. Capaian Kumulatif Tiap Bulan
 - a. Pemeriksaan *Microwave Link*

Tabel 11. Capaian Kumulatif Tiap Bulan *Open Shelter* dan *Remote Site*

<i>Open Shelter</i>		<i>Remote Site</i>	
Bulan	Capaian (%)	Bulan	Capaian (%)
Januari	0%	Januari	11.90%
Februari	0%	Februari	11.90%
Maret	0%	Maret	11.90%
April	88.23%	April	11.90%
Mei	91.17%	Mei	36.72%
Juni	91.17%	Juni	85.37%
Juli	91.17%	Juli	85.37%
Agustus	98.82%	Agustus	85.37%
September	98.82%	September	85.37%
Oktober	100%	Oktober	100%
November	100%	November	100%
Desember	100%	Desember	100%

- b. Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM

Tabel 12. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Radio Siaran FM

Bulan	Capaian	Target	Capaian (%)
Jan	0	0	0
Februari	16	36	44.44
Maret	18	36	50
April	18	36	50
Mei	21	36	58.33
Juni	21	36	58.33
Juli	23	36	63.89
Ags	23	36	63.89
Sep	33	36	91.67
Okt	36	36	100
Nov	36	36	100
Des	36	36	100



c. Pengukuran Televisi Digital

Tabel 13. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Televisi Digital

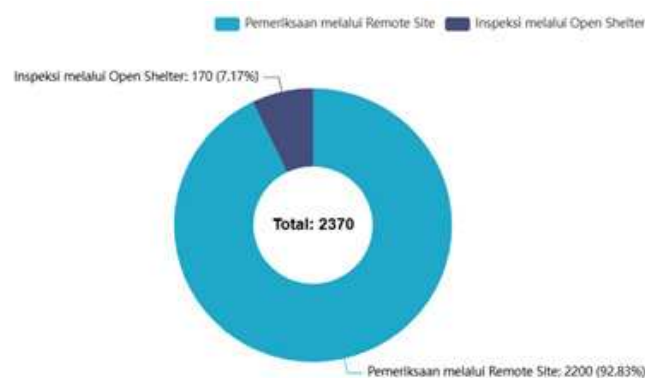
Bulan	Capaian	Target	Capaian (%)
Jan	0	0	0
Februari	1	8	12.5
Maret	1	8	12.5
April	1	8	12.5
Mei	5	8	62.5
Juni	5	8	62.5
Juli	6	8	75
Ags	6	8	75
Sep	7	8	87.5
Okt	8	8	100
Nov	8	8	100
Des	8	8	100

3. Identifikasi Hasil

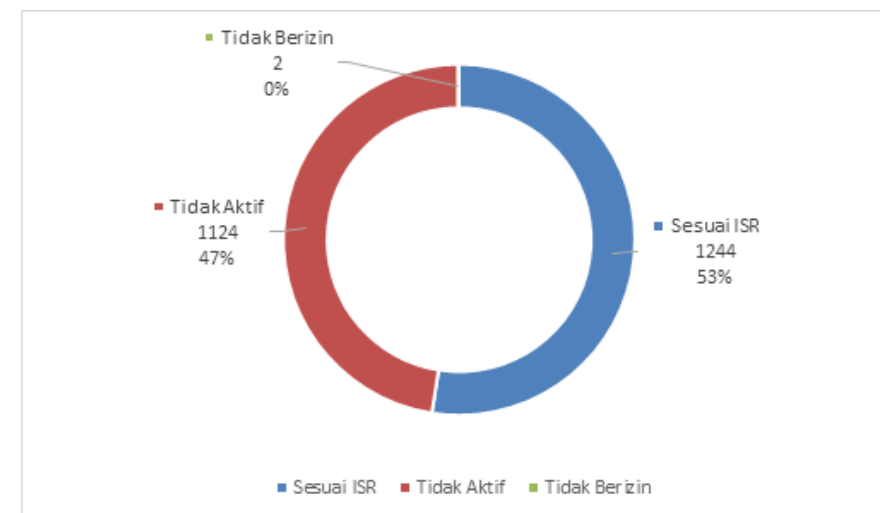
Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri dari pemeriksaan *microwave link* dan pengukuran stasiun siaran. Pemeriksaan *microwave link* terbagi menjadi pemeriksaan *microwave link* secara *remote site* dan *open shelter* yang masing – masing mempunyai target

jumlah yang diperiksa berdasarkan aplikasi pelaporan APSTARD. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan pemeriksaan *microwave link* dengan hasil sebagai berikut:

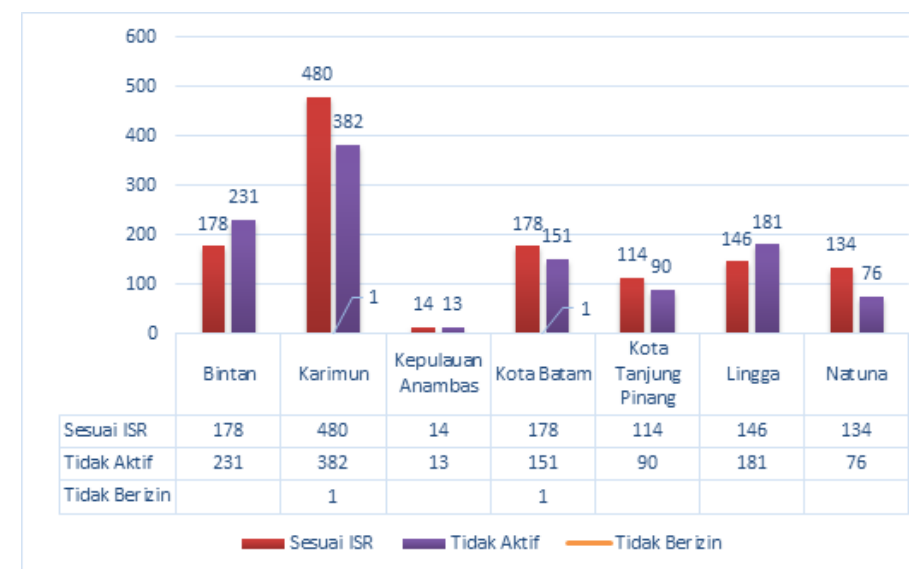
a. Pemeriksaan *Microwave Link*



Grafik 8. Target Pemeriksaan *Microwave Link*



Grafik 9. Hasil Pemeriksaan *Microwave Link*



Grafik 10. Rekapitulasi Pemeriksaan Stasiun Radio Berdasarkan Kabupaten/Kota

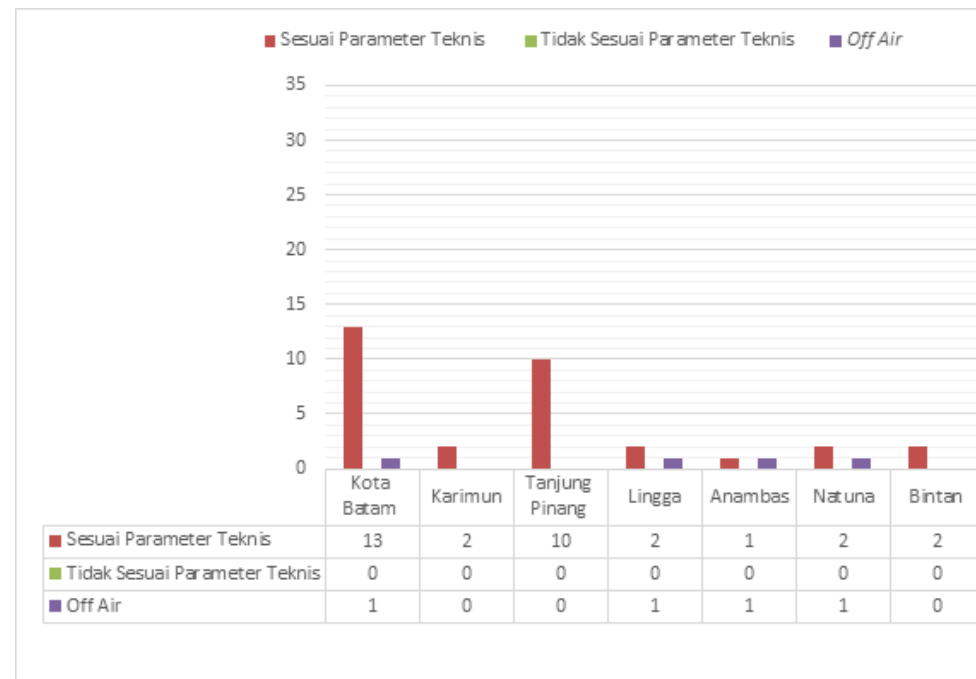
Capaian target pemeriksaan stasiun radio *remote site* dan *open site* adalah sebagai sistem komunikasi *Microwave Link* baik secara berikut :

$$\% \text{ Remote Site} = \frac{\text{Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site}}{\text{Total target data yang diperiksa}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Remote Site} = \frac{2202}{2202} \times 100\% = 100\%$$

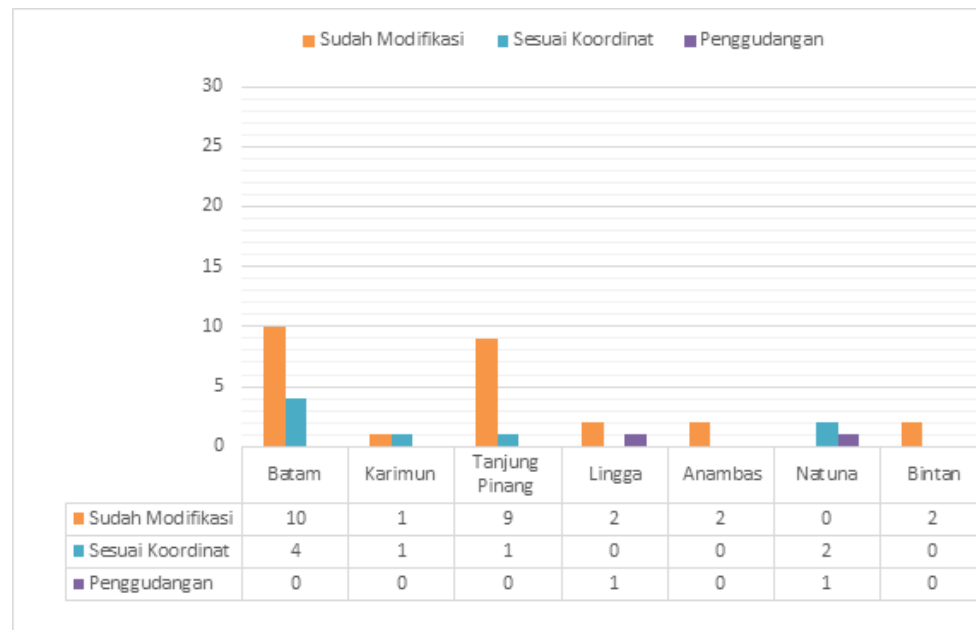
$$\% \text{ Open Shelter} = \frac{\text{Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site}}{\text{Total target data yang diperiksa}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Open Shelter} = \frac{170}{60\% \times 170} \times 100\% = 166.7\%$$



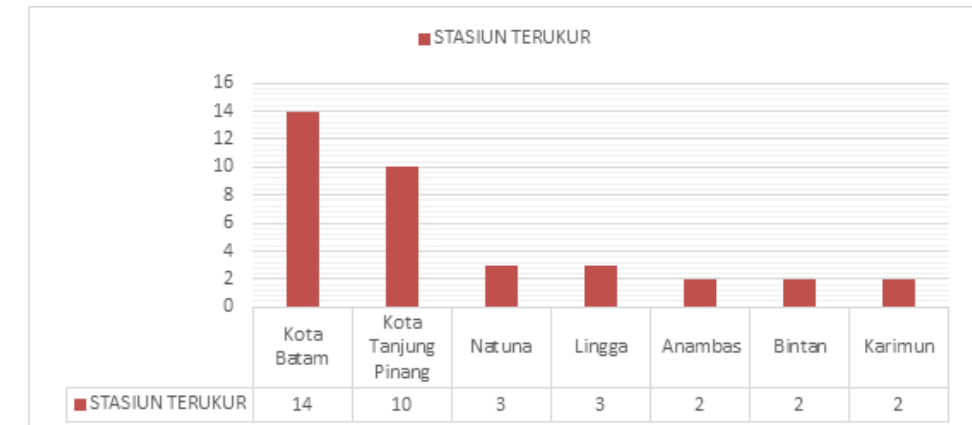
b. Pengukuran Stasiun Siaran



Grafik 11. Hasil Pengukuran Siaran Radio FM Berdasarkan Kabupaten/Kota



Grafik 12. Capaian Pengukuran Radio FM Berdasarkan Status



Grafik 13. Capaian Pengukuran FM Berdasarkan Jumlah Stasiun Terukur

Tabel 14. Kanal Radio FM di Wilayah Kepulauan Riau

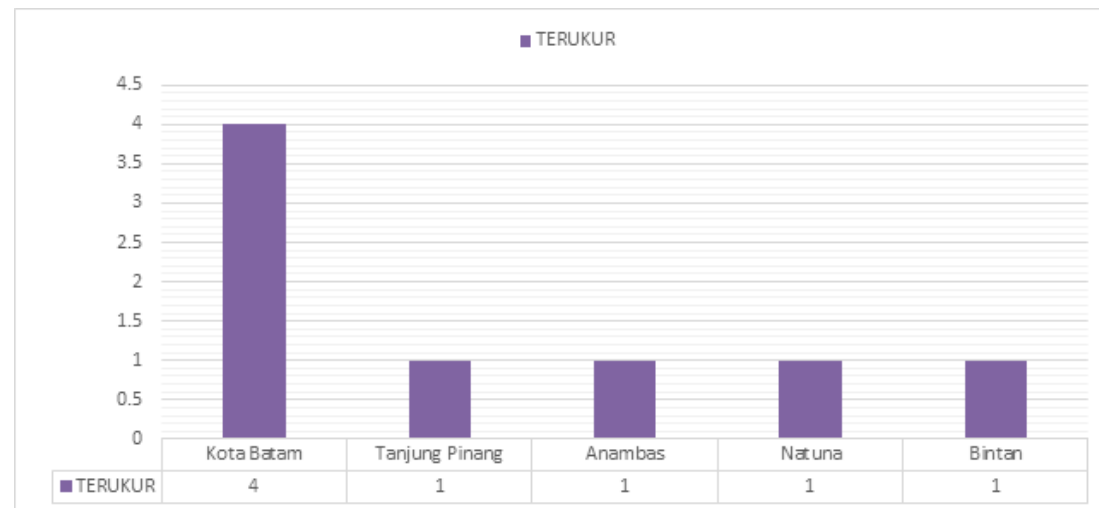
Kabupaten / Kota	Wilayah Layanan	Kanal	Persentase Kanal Terisi	Jumlah Kanal Sesuai Master Plan FM													
				1	15	34	42	132	140	148	157	166	172	176	180	185	190
Batam	Kota Batam	15	93%	1	15	34	42	132	140	148	157	166	172	176	180	185	190
Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang	12	83%	5	11	46	95	45	90	101	106	138	157	164	178		
Bintan	Tanjung Uban	2	0%	58	104												
Karimun	Karimun	3	100%	160	178	181											
	Moro	3	0%	29	96	163											
	Buru	3	0%	21	88	155											
	Kundur	3	0%	17	84	153											
Lingga	Singkep	10	10%	19	27	70	78	86	94	113	145	155	182				
	Lingga	3	33%	5	72	139											
	Senayang	2	0%	68	135												
Natuna	Ranai	6	50%	50	60	117	177	184	194								
Anambas	Terempa	3	67%	9	58	100											
= Kanal Tidak Terisi																	
= Kanal Terisi																	



c. Pengukuran Televisi Digital

Tabel 15. Pengukuran TV Digital di Wilayah Kepulauan Riau

No	WILAYAH LAYANAN	NAMA PENYELENGGARA LAYANAN MULTIPLEKSING	KANAL	STATUS	HASIL PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS MULTIPLEXER	JUMLAH PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN		
					FREKUENSI (MHz)	HD	SD	TOTAL
1	Kepulauan Riau-1	SURYA CITRA PESONA MEDIA, PT.	42	ON AIR	642	4	0	4
2	Kepulauan Riau-1	SURYA CITRA PESONA MEDIA, PT.	42	ON AIR	642	4	0	4
3	Kepulauan Riau-1	RCTI SEPULUH, PT.	44	ON AIR	658	5	1	6
4	Kepulauan Riau-1	TRANS TV BATAM KENDARI, PT.	46	ON AIR	674	5	1	6
5	Kepulauan Riau-1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	47	ON AIR	690	7	3	10
6	Kepulauan Riau-1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	48	ON AIR	690	5	0	5
7	Kepulauan Riau-3	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	43	ON AIR	650	3	3	6
8	Kepulauan Riau-2	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	45	ON AIR	666	4	0	4



Grafik 14. Capaian Pengukuran TV Digital



4. Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Tabel 16. Benchmark Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio Dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Presentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Balmon Batam	100	100	Presentase Capaian Balmon Batam dan Balmon Mataram sama – sama 100%
	Balmon Mataram	100	100	

2.4 Analisa yang terkait indikator kinerja secara umum dan holistik

Secara nasional, pengawasan dan pemeriksaan stasiun radio di Indonesia menghadapi dinamika peningkatan jumlah stasiun, perkembangan teknologi perangkat, serta meningkatnya kepadatan spektrum pada pita seluler, *Microwave Link*, dan siaran. Pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran yang pesat mendorong kebutuhan verifikasi teknis yang lebih intensif untuk memastikan kesesuaian parameter operasional dengan Izin Stasiun Radio (ISR). Dalam konteks tersebut, indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas pengawasan lapangan serta konsistensi tindak lanjut terhadap pelanggaran teknis. Capaian pemeriksaan yang optimal berkontribusi langsung pada peningkatan kepatuhan ISR, stabilitas jaringan komunikasi, dan pencegahan interferensi yang berpotensi mengganggu layanan publik.

Apabila dibandingkan dengan praktik regional dan internasional, negara maju pada umumnya telah menerapkan pendekatan inspeksi berbasis risiko (*risk-based inspection*) yang terintegrasi dengan sistem monitoring spektrum *real-time* dan basis data

perizinan elektronik. Pemeriksaan lapangan difokuskan pada stasiun dengan profil risiko tinggi atau histori pelanggaran, sementara stasiun dengan tingkat kepatuhan tinggi diawasi melalui sistem pemantauan jarak jauh. Negara berkembang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur monitoring dan sumber daya manusia, sehingga cakupan pemeriksaan belum sepenuhnya optimal. Indonesia berada pada posisi transisi, dimana kerangka regulasi dan sistem perizinan telah relatif memadai, namun penguatan integrasi data, pemanfaatan analisis risiko, dan digitalisasi proses pemeriksaan masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai standar praktik terbaik internasional.

Dalam konteks tersebut, strategi yang diterapkan melalui integrasi data ISR dengan sistem monitoring spektrum, pemanfaatan Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD), serta pelaporan elektronik melalui ROL menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan indikator. Pendekatan pemeriksaan berbasis risiko interferensi, prioritas wilayah perbatasan, serta penggabungan kegiatan pemeriksaan dengan monitoring dan penertiban merupakan inovasi operasional yang meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Selain itu, perencanaan pemeriksaan berbasis data *sampling* yang ditetapkan



Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital memastikan bahwa pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam pengendalian kualitas spektrum.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah stasiun yang diperiksa, tetapi oleh kualitas verifikasi teknis, konsistensi tindak lanjut temuan pelanggaran, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan sebagai dasar penataan dan optimalisasi penggunaan spektrum. Dengan demikian, indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio berkontribusi secara langsung terhadap sasaran strategis DJID dalam menjaga kualitas layanan publik, meningkatkan kepatuhan regulasi, serta memperkuat pengamanan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

2.5 Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target Dan Upaya Percepatan/Perbaikan

Berdasarkan capaian tahun berjalan, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio secara umum dapat memenuhi target utama yang ditetapkan dalam PK UPT 2025, khususnya untuk kategori *remote site Microwave Link* dan pengukuran stasiunsiaran prioritas. Namun demikian, pada beberapa segmen pemeriksaan *open shelter* dan pengukuran stasiun dengan lokasi geografis sulit, terdapat dinamika pelaksanaan yang memerlukan penyesuaian teknis di lapangan. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah stasiun aktif dibandingkan kapasitas tim pemeriksa, serta adanya kebutuhan koordinasi jadwal dengan pengelola stasiun yang tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.

Secara operasional, wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam yang mencakup kawasan kepulauan dan wilayah perbatasan menimbulkan tantangan tersendiri, baik dari sisi akses transportasi maupun kondisi cuaca yang memengaruhi mobilisasi tim pemeriksa. Keterbatasan jumlah personel pemeriksa yang harus menangani beberapa jenis kegiatan sekaligus—monitoring, pemeriksaan, serta penertiban—juga berdampak pada perlunya prioritasasi stasiun berbasis tingkat risiko dan histori pelanggaran. Kondisi ini mengakibatkan beberapa pemeriksaan harus dijadwalkan ulang atau difokuskan terlebih dahulu pada stasiun dengan potensi dampak gangguan yang lebih besar terhadap layanan publik.

Sebagai langkah percepatan dan perbaikan, Balmon Batam melakukan penjadwalan pemeriksaan berbasis risiko dan lokasi, optimalisasi pemanfaatan data ISR serta hasil monitoring spektrum sebagai pra-analisis sebelum inspeksi lapangan, serta penguatan koordinasi dengan pemilik dan pengelola stasiun untuk memastikan kesiapan lokasi dan dokumen teknis pada saat pemeriksaan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital seperti APSTARD dan ROL meningkatkan efisiensi pelaporan dan validasi hasil pemeriksaan, sehingga waktu tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran dapat dipercepat. Meskipun terdapat kendala operasional, pelaksanaan indikator ini tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas layanan komunikasi utama dan memastikan penanganan cepat terhadap stasiun yang berpotensi mengganggu keselamatan publik maupun kualitas jaringan.



2.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio dimanfaatkan secara langsung sebagai dasar pembinaan dan penegakan kepatuhan terhadap Izin Stasiun Radio (ISR) serta parameter teknis operasional. Setiap temuan ketidaksesuaian, baik terkait frekuensi, *bandwidth*, daya pancar, koordinat, maupun legalitas perangkat, ditindaklanjuti melalui penyampaian rekomendasi teknis kepada pemilik atau pengelola stasiun. Dalam hal ditemukan pelanggaran yang signifikan, dilakukan penerbitan surat teguran dan/atau Berita Acara Penghentian sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, stasiun yang belum memenuhi ketentuan dijadwalkan untuk pemantauan ulang guna memastikan bahwa tindakan korektif telah dilaksanakan secara memadai.

Laporan kinerja pemeriksaan juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana pemeriksaan tahun berikutnya, khususnya untuk mengidentifikasi wilayah, jenis layanan, dan kategori stasiun yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Data historis temuan pelanggaran serta tingkat kepatuhan menjadi dasar dalam penetapan prioritas pemeriksaan berbasis risiko. Hasil pemeriksaan turut menjadi referensi dalam koordinasi lintas fungsi pengawasan, termasuk kegiatan monitoring dan penertiban, sehingga tercipta kesinambungan antara deteksi potensi gangguan dan verifikasi teknis lapangan.

Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya, seperti peningkatan integrasi data ISR dengan hasil monitoring spektrum dan

penyempurnaan metode penjadwalan pemeriksaan, telah diimplementasikan pada tahun berjalan. Pemanfaatan aplikasi APSTARD dan sistem pelaporan elektronik memperkuat akuntabilitas serta ketertelusuran setiap kegiatan pemeriksaan. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi menjadi instrumen manajerial dalam siklus perbaikan berkelanjutan pengawasan kepatuhan stasiun radio

2.7 Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, peningkatan capaian indikator Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio perlu diarahkan pada penguatan kualitas dan pemerataan cakupan pemeriksaan. Meskipun target utama dapat tercapai, masih terdapat keterbatasan pada pemeriksaan di wilayah kepulauan dan stasiun dengan akses terbatas, serta intensitas pemeriksaan terhadap stasiun berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perencanaan tahun berikutnya perlu memperkuat pendekatan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan histori pelanggaran, kepadatan spektrum, lokasi perbatasan, dan jenis layanan yang berdampak langsung terhadap keselamatan publik.

Secara operasional, diperlukan peningkatan integrasi data ISR, hasil monitoring spektrum, serta histori tindak lanjut pelanggaran sebagai dasar penetapan prioritas pemeriksaan. Penguatan koordinasi jadwal dengan pemilik atau pengelola stasiun juga perlu dilakukan lebih awal untuk meminimalkan penundaan kegiatan lapangan. Selain itu, digitalisasi proses pencatatan dan analisis hasil



pemeriksaan perlu terus dikembangkan agar proses evaluasi teknis lebih cepat dan akurat, serta mengurangi kebutuhan pemeriksaan ulang akibat ketidaksesuaian data.

Rekomendasi ini selaras dengan kebijakan nasional DJID dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan spektrum dan menjaga kualitas layanan publik. Dengan mengedepankan pencegahan pelanggaran melalui pembinaan dan verifikasi teknis yang lebih sistematis, pelaksanaan indikator di tahun berikutnya diharapkan tidak hanya meningkatkan persentase pemeriksaan secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat efektivitas pengendalian spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

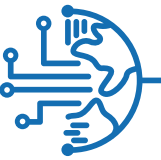
2.8 Efisiensi

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio pada tahun berjalan menunjukkan peningkatan capaian melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa penambahan signifikan jumlah personel. Dengan komposisi rata-rata 2-3 personel per tim pemeriksaan, Balmon Batam mampu meningkatkan jumlah stasiun yang diperiksa dibandingkan tahun sebelumnya melalui penggabungan kegiatan pemeriksaan dengan monitoring dan penertiban dalam satu rangkaian operasi lapangan. Pola kerja terpadu tersebut memungkinkan peningkatan produktivitas per tim, sehingga cakupan

pemeriksaan dapat diperluas dengan struktur organisasi yang relatif tetap.

Dari sisi waktu pelaksanaan, dilakukan optimalisasi rute kunjungan antar lokasi stasiun berdasarkan klaster wilayah dan kedekatan geografis, sehingga waktu perjalanan dapat ditekan dan frekuensi kunjungan dalam satu periode kegiatan meningkat. Koordinasi awal dengan pengelola stasiun sebelum pelaksanaan inspeksi juga mengurangi waktu tunggu di lokasi serta meminimalkan penjadwalan ulang. Selain itu, pemanfaatan data ISR dan hasil monitoring spektrum sebagai pra-analisis sebelum pemeriksaan lapangan membantu memfokuskan pemeriksaan pada parameter yang berpotensi bermasalah, sehingga proses verifikasi teknis menjadi lebih efisien.

Pemanfaatan sistem digital seperti APSTARD dan ROL turut meningkatkan efisiensi proses pencatatan, pelaporan, dan validasi hasil pemeriksaan. Dokumentasi elektronik yang terintegrasi mengurangi kebutuhan pengumpulan ulang data serta meminimalkan risiko duplikasi pemeriksaan akibat ketidaksesuaian informasi. Dengan demikian, peningkatan capaian indikator diperoleh melalui optimalisasi proses kerja, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi, bukan semata-mata melalui penambahan sumber daya baru.



Tabel 17. Efisiensi Anggaran Pemeriksaan Stasiun Radio

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	Rp 859.190.000	Rp 859.188.835	Rp 1.165

2.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dilaksanakan dengan mengedepankan nilai Berorientasi Pelayanan sebagai landasan utama. Setiap kegiatan pemeriksaan diarahkan untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan komunikasi masyarakat, termasuk layanan strategis seperti pelayaran, penerbangan, dan layanan publik lainnya yang sangat bergantung pada keandalan spektrum frekuensi radio. Nilai Loyal juga tercermin melalui konsistensi dukungan terhadap agenda nasional pengendalian spektrum dan transformasi digital, dengan memastikan setiap stasiun beroperasi sesuai izin dan parameter teknis yang ditetapkan.

Nilai Akuntabel diwujudkan melalui pendokumentasian setiap kegiatan pemeriksaan dalam bentuk berita acara, laporan hasil pemeriksaan, serta pencatatan elektronik melalui sistem APSTARD dan ROL yang dapat ditelusuri dan diverifikasi. Hal ini memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan memiliki dasar hukum dan administrasi yang sah. Sementara itu, nilai Kompeten menjadi faktor kunci keberhasilan indikator ini, di mana petugas secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan teknis dalam pengukuran parameter stasiun, penggunaan perangkat ukur, analisis data frekuensi,

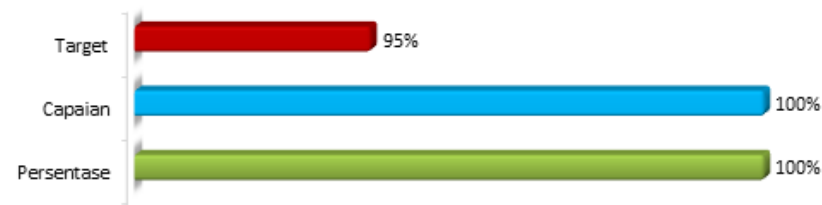
serta pemahaman regulasi ISR guna memastikan hasil pemeriksaan akurat dan profesional.

Dalam pelaksanaannya, nilai Harmonis dan Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi aktif dengan pemilik atau pengelola stasiun, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lintas fungsi pengawasan di lingkungan Balmon, khususnya dalam menangani stasiun di wilayah perbatasan. Nilai Adaptif tercermin dari kemampuan tim menyesuaikan metode pemeriksaan terhadap perkembangan teknologi perangkat, migrasi sistem penyiaran digital, serta kepadatan spektrum di wilayah perkotaan dan kepulauan. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai BerAKHLAK—terutama Kompeten dan Kolaboratif—menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas pengawasan stasiun radio dan memastikan keberlanjutan pencapaian indikator kinerja secara profesional dan berintegritas



IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

IK-3 Target indikator kinerja Penanganan Gangguan SFR pada tahun 2025 adalah 95%



Grafik 15. Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 18. Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	100%	98%	100%	99%	100%	100%	100%	95%	100%

3.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

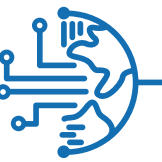
Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan fungsi strategis negara dalam menjamin keberlangsungan layanan komunikasi publik yang andal, aman, dan bebas interferensi. Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas milik negara harus dikelola secara tertib dan responsif, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Batam yang memiliki kepadatan penggunaan frekuensi serta potensi interferensi lintas negara. Gangguan spektrum, baik yang bersifat teknis maupun akibat penggunaan tanpa izin, dapat berdampak langsung pada kualitas layanan telekomunikasi,

dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.

penyiaran, keselamatan pelayaran dan penerbangan, serta layanan publik lainnya. Oleh karena itu, indikator Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR diperlukan untuk memastikan bahwa setiap laporan gangguan dapat ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan sesuai standar operasional.

Maksud dari indikator ini adalah untuk mengukur efektivitas dan ketepatan respons Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dalam menangani laporan gangguan selama periode tahun berjalan.

Tujuannya adalah memastikan seluruh gangguan yang dilaporkan dapat



diselesaikan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam PK UPT 2025, sehingga stabilitas jaringan komunikasi tetap terjaga dan kepentingan nasional di bidang pengendalian spektrum terlindungi. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur penyelesaian kasus secara administratif, tetapi mencerminkan komitmen institusi dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Pengukuran capaian dilakukan dengan rumus:

$$\text{Persentase Penanganan Gangguan SFR} = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}} \times 100\%$$

3.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR berdampak langsung pada peningkatan stabilitas dan kualitas layanan komunikasi publik, khususnya di wilayah dengan kepadatan spektrum tinggi dan kawasan perbatasan. Respon yang cepat dan terukur terhadap laporan gangguan mampu menekan potensi interferensi berkepanjangan, menjaga keandalan jaringan telekomunikasi, serta memastikan layanan strategis seperti pelayaran, penerbangan, dan komunikasi darurat tetap berfungsi optimal. Dari perspektif ekonomi daerah, stabilitas jaringan komunikasi turut mendukung aktivitas industri, perdagangan, dan layanan digital yang berkembang di Batam dan sekitarnya, sehingga indikator ini menjadi prasyarat penting dalam menjaga iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap kualitas infrastruktur digital.

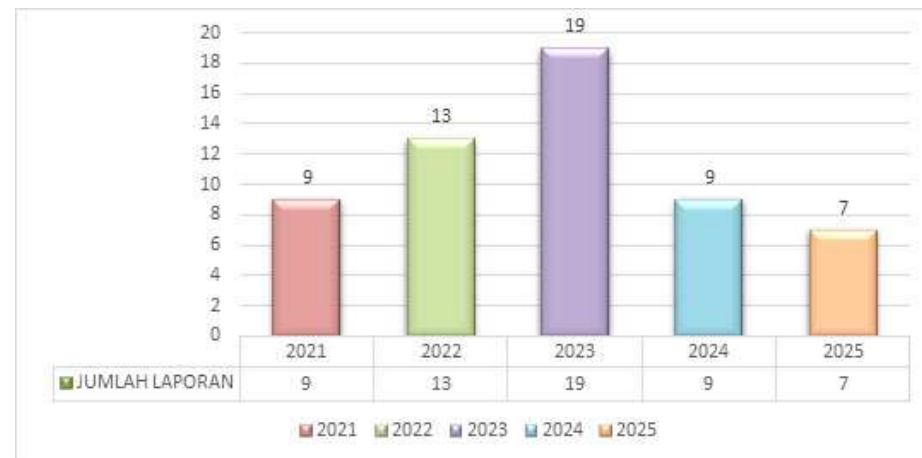
Melalui formula tersebut, indikator ini mencerminkan proporsi gangguan yang berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap seluruh gangguan yang terjadi dalam periode tahun berjalan. Semakin tinggi persentase capaian, semakin menunjukkan efektivitas respon, kualitas penyelesaian teknis, serta kontribusi nyata terhadap terjaganya kualitas layanan publik dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

Secara SWOT, kekuatan utama terletak pada kompetensi teknis petugas, sistem monitoring nasional, dan dukungan regulasi yang jelas; sementara kelemahan berkaitan dengan tantangan geografis kepulauan dan keterbatasan sumber daya lapangan. Peluang muncul dari integrasi sistem digital dan pendekatan respons berbasis risiko, sedangkan ancaman berasal dari kepadatan spektrum, perkembangan teknologi yang cepat, serta potensi interferensi lintas negara. Dalam perspektif *Balanced Scorecard*, indikator ini memperkuat kepuasan *stakeholder* melalui layanan responsif, meningkatkan efektivitas proses internal penanganan gangguan, mendorong peningkatan kompetensi SDM, serta memperkuat tata kelola pengawasan spektrum secara akuntabel. Dengan demikian, indikator ini berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis DJID dalam menjaga kualitas layanan publik dan pengamanan spektrum nasional.

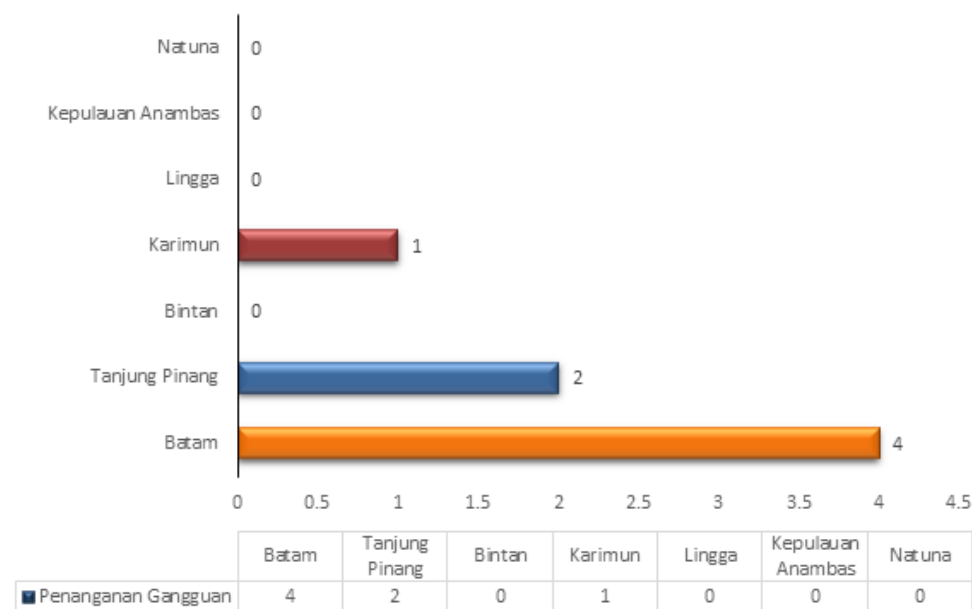


3.3 Tabulasi

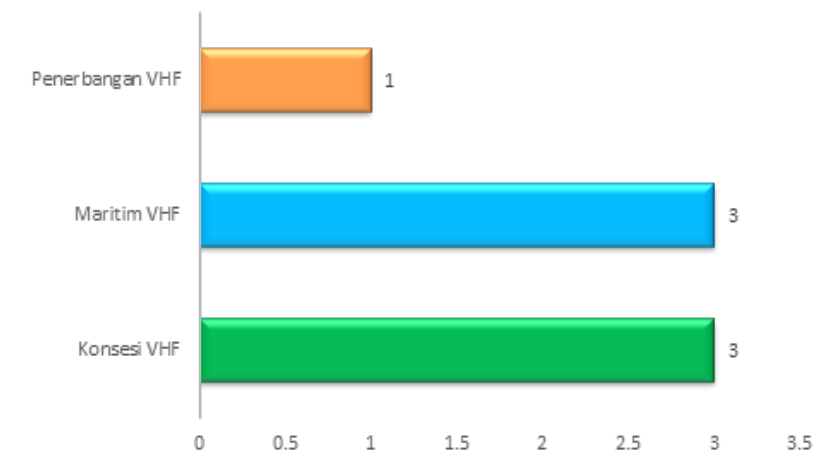
1. Identifikasi Hasil



Grafik 16. Total Jumlah Aduan Gangguan Per Tahun



Grafik 17. Jumlah Penanganan Gangguan di Wilayah Kabupaten/Kota



Grafik 18. Klasifikasi Dinas Yang Terganggu

2. Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Tabel 19. Benchmark Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Penanganan Gangguan SFR	Balmon Batam	100	100	Presentase Capaian Balmon Batam dan Balmon Mataram sama – sama 100%
	Balmon Mataram	100	100	

3.4 Analisa Yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum Dan Holistik

Secara nasional, meningkatnya penetrasi layanan telekomunikasi, ekspansi jaringan *Microwave Link*, serta migrasi ke sistem siaran digital menyebabkan kompleksitas potensi gangguan spektrum semakin tinggi. Di wilayah industri dan perbatasan seperti Batam, kepadatan penggunaan frekuensi dan potensi interferensi lintas negara menuntut sistem respons yang cepat, terukur, dan terintegrasi. Dibandingkan dengan negara maju yang telah menerapkan monitoring spektrum berbasis *real-time* dan sistem respon otomatis terpusat, Indonesia masih mengembangkan integrasi sistem monitoring dan pelaporan

nasional. Namun demikian, dukungan sistem seperti SMFR dan ROL telah memperkuat koordinasi antara pusat dan UPT dalam mempercepat deteksi serta penyelesaian gangguan.

Keberhasilan capaian indikator ini ditentukan oleh perencanaan respons berbasis data monitoring, kompetensi teknis petugas dalam identifikasi sumber gangguan, serta koordinasi aktif dengan operator dan instansi terkait. Pendekatan berbasis risiko yang memprioritaskan gangguan berdampak tinggi terhadap layanan publik dan keselamatan menjadi strategi kunci dalam menjaga stabilitas jaringan. Dengan demikian, indikator penanganan gangguan tidak hanya



mencerminkan penyelesaian kasus secara administratif, tetapi menunjukkan efektivitas sistem pengendalian spektrum dalam menjamin kualitas layanan komunikasi dan perlindungan kepentingan nasional.

3.5 Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target Dan Upaya Percepatan/Perbaikan

Secara umum target penanganan gangguan spektrum tahun berjalan dapat tercapai sesuai PK UPT 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kendala operasional berupa kondisi geografis wilayah kepulauan dan perbatasan yang memerlukan waktu mobilisasi lebih panjang, kepadatan spektrum di kawasan industri yang meningkatkan kompleksitas identifikasi sumber gangguan, serta keterbatasan personel yang harus menangani kegiatan monitoring dan penanganan gangguan secara bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi waktu respons awal dan memerlukan prioritas terhadap gangguan yang berdampak langsung pada layanan publik.

Sebagai upaya percepatan, dilakukan optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh untuk identifikasi awal sumber gangguan, penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penentuan prioritas penanganan, serta penguatan koordinasi dengan operator dan instansi terkait guna mempercepat akses lokasi dan validasi teknis. Meskipun terdapat dinamika operasional, langkah-langkah tersebut memastikan gangguan kritis dapat ditangani secara tepat waktu sehingga kualitas layanan komunikasi masyarakat tetap terjaga.

3.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil penanganan gangguan spektrum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan teknis, pembinaan kepada pengguna frekuensi, serta penegakan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Setiap gangguan yang telah diselesaikan didokumentasikan dalam sistem pelaporan resmi sebagai bahan evaluasi pola gangguan, identifikasi wilayah rawan interferensi, dan penentuan langkah preventif selanjutnya. Temuan yang bersifat berulang atau berdampak luas menjadi prioritas untuk dilakukan monitoring lanjutan dan koordinasi intensif dengan operator serta instansi terkait.

Laporan kinerja juga digunakan sebagai referensi dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya, khususnya dalam memperkuat pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kecepatan respons. Rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya, seperti optimalisasi sistem monitoring dan penguatan koordinasi lintas fungsi, telah diimplementasikan dan terbukti mendukung penyelesaian gangguan secara lebih efektif. Dengan demikian, laporan kinerja berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam siklus perbaikan berkelanjutan pengendalian spektrum frekuensi radio.

3.7 Rekomendasi Perbaikan di Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kualitas penanganan gangguan spektrum pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan pendekatan berbasis risiko dengan memprioritaskan wilayah kepadatan spektrum tinggi, kawasan industri, serta area perbatasan yang memiliki potensi interferensi lintas negara. Selain itu, integrasi data hasil monitoring, histori gangguan, dan data ISR perlu

terus ditingkatkan guna mempercepat proses identifikasi sumber gangguan dan meminimalkan waktu respons di lapangan.

Secara operasional, peningkatan kapasitas teknis petugas dalam analisis gangguan kompleks serta optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh menjadi langkah penting dalam menjaga konsistensi capaian indikator. Rekomendasi ini selaras dengan kebijakan nasional pengendalian spektrum yang menekankan pencegahan gangguan melalui deteksi dini, respons cepat, dan koordinasi lintas instansi, sehingga kualitas layanan komunikasi publik dapat terjaga secara berkelanjutan.

3.8 Efisiensi

Pencapaian indikator penanganan gangguan spektrum dilakukan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa penambahan signifikan personel, dengan pola kerja terpadu antara monitoring dan respons gangguan dalam satu rangkaian kegiatan operasional. Pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh untuk identifikasi awal sumber gangguan serta koordinasi awal dengan operator memungkinkan penurunan waktu respons dan mengurangi kebutuhan kunjungan ulang ke lokasi yang sama. Optimalisasi rute dan prioritas berbasis risiko turut meningkatkan efektivitas penanganan, sehingga capaian indikator diperoleh melalui efisiensi proses kerja dan pemanfaatan teknologi, bukan melalui ekspansi sumber daya.

3.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Core value dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio wajib

berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK.

- Berorientasi Pelayanan:** Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui respons cepat terhadap laporan gangguan spektrum, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam menjaga kualitas layanan komunikasi serta keselamatan layanan strategis seperti pelayaran dan penerbangan.
- Akuntabel:** Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan mendokumentasikan setiap proses penanganan gangguan secara transparan melalui sistem pelaporan resmi, bekerja secara jujur dan disiplin, serta menggunakan sarana dan perangkat negara secara efektif dan efisien dalam setiap kegiatan operasional.
- Kompeten:** Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas teknis dalam analisis sumber interferensi, penguasaan perangkat ukur spektrum, serta peningkatan metode *troubleshooting* guna menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kepadatan spektrum yang terus berubah.
- Harmonis:** Saling peduli dan menghargai perbedaan dalam berkoordinasi dengan operator, pemerintah daerah, dan instansi terkait, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan penanganan gangguan.
- Loyal:** Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan



memastikan pengamanan spektrum sebagai sumber daya strategis nasional, serta menjaga nama baik instansi dalam setiap proses penanganan gangguan.

6. **Adaptif:** Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan teknologi serta dinamika kepadatan spektrum, cepat menyesuaikan metode kerja,

dan proaktif dalam mengantisipasi potensi gangguan.

7. **Kolaboratif:** Membangun kerja sama yang sinergis dengan operator penyelenggara jaringan, aparat penegak hukum, dan lintas fungsi pengawasan untuk menghasilkan penyelesaian gangguan yang efektif dan bernilai tambah bagi masyarakat.



IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Target indikator kinerja Monitoring Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau

Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kab/Kota pada tahun 2025 adalah 75% dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.



Grafik 19. Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 20. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

4.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) yang beredar dan digunakan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam wajib memenuhi standar teknis serta memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap standar teknis menjadi krusial karena perangkat yang tidak tersertifikasi atau tidak sesuai spesifikasi berpotensi menimbulkan interferensi, menurunkan kualitas layanan komunikasi, serta mengganggu layanan strategis seperti pelayaran, penerbangan, dan keselamatan publik.

Perkembangan teknologi perangkat yang sangat cepat serta distribusi perangkat lintas wilayah—terutama di kawasan perbatasan—meningkatkan risiko beredarnya perangkat yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, indikator Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis APT diperlukan sebagai instrumen pengendalian yang terukur untuk memastikan perangkat yang digunakan telah sesuai standar dan legalitas sertifikasi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi terhadap standar teknis



dan sertifikasi yang berlaku, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas pengawasan perangkat di wilayah kerja Balmon Batam. Pengukuran dilakukan melalui verifikasi kesesuaian tipe perangkat, pencocokan dengan database sertifikasi resmi, serta pencatatan hasil monitoring dalam sistem pengawasan selama tahun berjalan.

Tujuan indikator ini adalah memastikan perangkat yang beredar dan digunakan memenuhi standar teknis, meningkatkan kualitas dan stabilitas layanan telekomunikasi, serta melindungi masyarakat dan penyelenggara jaringan dari risiko gangguan akibat perangkat tidak sesuai standar. Persentase tingkat kepatuhan dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \text{Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti}}{\text{Perangkat termonitor}} \times 100\%$$

dengan sumber data berasal dari hasil monitoring lapangan, verifikasi dokumen sertifikasi, serta rekapitulasi laporan pada sistem pengawasan resmi. Melalui indikator ini, pengendalian mutu perangkat telekomunikasi dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional pengawasan spektrum dan perangkat telekomunikasi.

4.2 Dampak

Analisa Dampak (Outcome)

Pencapaian indikator Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan stabilitas layanan komunikasi di wilayah kerja Balmon Batam. Perangkat yang memenuhi standar teknis dan tersertifikasi mengurangi potensi interferensi, meningkatkan keandalan jaringan, serta menjamin keselamatan penggunaan frekuensi pada layanan strategis seperti pelayaran dan penerbangan. Dari sisi ekonomi daerah, kepatuhan perangkat turut mendukung keberlanjutan layanan telekomunikasi yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi digital, perdagangan lintas batas, dan operasional industri di

kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Di wilayah perbatasan, pengendalian perangkat yang tidak sesuai standar juga berperan dalam menjaga kedaulatan spektrum dan mencegah gangguan lintas negara.

Analisa SWOT

Dari aspek kekuatan, Indonesia memiliki kerangka regulasi sertifikasi perangkat yang jelas serta sistem basis data sertifikasi yang terintegrasi secara nasional, didukung kompetensi teknis petugas pengawasan. Namun demikian, kelemahan masih terdapat pada keterbatasan jangkauan pengawasan fisik terhadap distribusi perangkat, serta dinamika peredaran perangkat yang sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Peluang yang tersedia antara lain dukungan transformasi digital nasional, peningkatan literasi kepatuhan pelaku usaha, serta integrasi data pengawasan perangkat dengan sistem monitoring spektrum. Adapun ancaman yang dihadapi meliputi masuknya perangkat ilegal melalui jalur perdagangan tidak resmi, perubahan teknologi yang cepat, serta potensi penggunaan perangkat non-standar pada wilayah perbatasan.



Analisa Berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC)

Dari perspektif *stakeholder*, indikator ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan operator melalui peningkatan kualitas layanan dan perlindungan dari perangkat yang tidak sesuai standar. Dari perspektif proses internal, pelaksanaan monitoring dan verifikasi sertifikasi meningkatkan efektivitas proses pengawasan serta konsistensi tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Perspektif pembelajaran dan SDM tercermin pada peningkatan kapasitas teknis petugas dalam melakukan identifikasi tipe perangkat dan validasi sertifikasi. Sementara itu, dari perspektif tata kelola, indikator ini memperkuat akuntabilitas pengendalian perangkat telekomunikasi serta mendukung kepatuhan regulasi secara nasional.

Secara keseluruhan, indikator tingkat kepatuhan APT tidak hanya menghasilkan *output* berupa jumlah perangkat yang diperiksa, tetapi

berkontribusi langsung terhadap *outcome* strategis DJID dalam menjaga kualitas layanan publik, stabilitas spektrum, serta perlindungan kepentingan nasional di sektor telekomunikasi.

4.3 Tabulasi

Indikator Kinerja (IK-4): Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Unit Kerja: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam

1. Monitoring perangkat telekomunikasi
Monitoring alat perangkat telekomunikasi dengan target pelaksanaan sebanyak 6 (enam) kali dari jumlah target kabupaten/kota telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2025 di wilayah Kepulauan Riau sehingga capaian untuk monitoring perangkat telekomunikasi adalah 100%

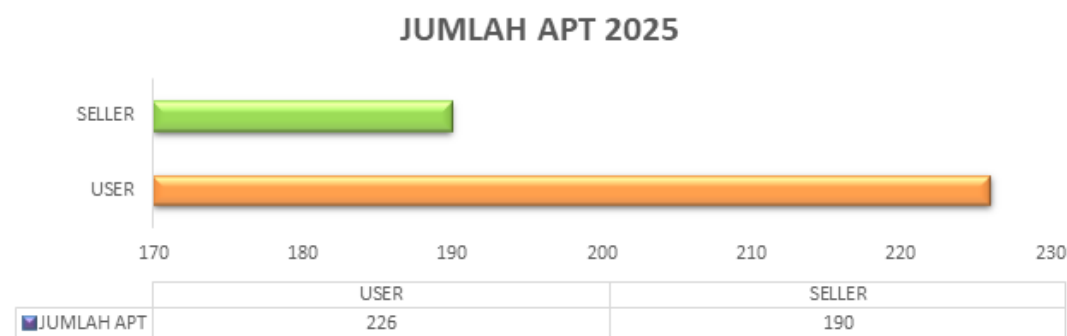


Grafik 20. Capaian Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

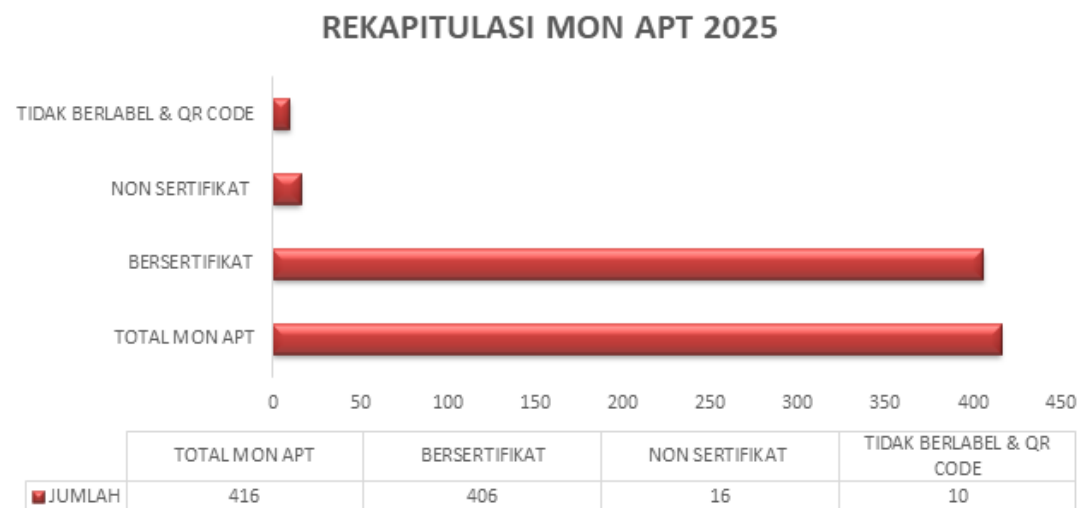


Tabel 21. Capaian Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	TARGET	TOTAL	BERSERTIFIKASI	NON SERTIFIKASI	CAPAIAN
1	Kota Tanjung Pinang	200	121	121	0	100%
2	Kabupaten Bintan		119	119	0	100%
3	Kota Batam		62	55	7	100%
4	Kabupaten Karimun		35	33	2	100%
5	Kabupaten Lingga		30	30	0	100%
6	Kabupaten Kepulauan Anambas		29	29	0	100%
7	Kabupaten Natuna		20	19	1	100%
Total			416	406	10	100%



Grafik 21. Jumlah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi



Grafik 22. Rekapitulasi Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi



4.4 Analisa Yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum Dan Holistik

Secara nasional, peningkatan kepatuhan alat dan perangkat telekomunikasi (APT) menjadi kebutuhan strategis seiring pertumbuhan penggunaan perangkat komunikasi dan akselerasi transformasi digital. Kepatuhan terhadap sertifikasi dan standar teknis perangkat berkontribusi langsung terhadap kualitas jaringan, efisiensi penggunaan spektrum, serta pencegahan interferensi yang dapat mengganggu layanan publik dan komunikasi strategis. Dibandingkan praktik internasional, negara maju telah menerapkan pengawasan berbasis risiko dan sistem digital terintegrasi untuk memantau kepatuhan perangkat secara *real-time*, sedangkan negara berkembang masih menghadapi tantangan pada cakupan pengawasan dan integrasi data. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dan wilayah perbatasan seperti Batam, risiko peredaran perangkat non-standar menjadi tantangan tersendiri sehingga penguatan pengawasan lapangan tetap diperlukan.

Posisi Indonesia menunjukkan bahwa regulasi sertifikasi perangkat dan sistem basis data telah tersedia, namun perlu terus diperkuat pada aspek integrasi data, verifikasi teknis, serta penegakan kepatuhan. Strategi yang mendukung keberhasilan indikator ini meliputi perencanaan pengawasan berbasis data, pemanfaatan integrasi sistem sertifikasi dengan monitoring spektrum, pendekatan berbasis risiko dalam penentuan prioritas pemeriksaan, serta peningkatan kompetensi teknis petugas. Dengan demikian, keberhasilan indikator tidak hanya diukur dari kuantitas pemeriksaan, tetapi dari kualitas verifikasi, konsistensi tindak

lanjut pelanggaran, dan kontribusinya terhadap stabilitas spektrum serta keberlanjutan kualitas layanan telekomunikasi.

4.5 Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target Dan Upaya Percepatan/Perbaikan

Pelaksanaan indikator Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) pada tahun berjalan pada prinsipnya menunjukkan capaian yang baik, namun masih terdapat sejumlah kendala operasional yang mempengaruhi optimalisasi hasil. Tantangan utama meliputi luasnya wilayah pengawasan yang mencakup kawasan perbatasan dan jalur distribusi perdagangan, potensi peredaran perangkat yang masuk melalui mekanisme tidak resmi, serta keterbatasan waktu dan personel untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh titik distribusi. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi perangkat yang cepat juga menuntut pembaruan kapasitas teknis secara berkelanjutan agar verifikasi kesesuaian standar dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan, dilakukan penguatan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan titik distribusi dan jenis perangkat yang memiliki potensi pelanggaran lebih tinggi, optimalisasi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pengawasan peredaran perangkat, serta peningkatan pemanfaatan data sertifikasi dan basis data nasional untuk mendukung validasi awal sebelum pemeriksaan lapangan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan persentase kepatuhan, tetapi juga



memastikan pencegahan pelanggaran dilakukan secara sistematis, sehingga kualitas layanan telekomunikasi tetap terjaga dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna akhir terlindungi.

4.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil capaian indikator Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) dimanfaatkan sebagai dasar perumusan langkah pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap distributor, penyedia, maupun pengguna perangkat telekomunikasi di wilayah kerja. Data hasil pengawasan dan pemeriksaan digunakan untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, jenis perangkat yang berisiko tinggi, serta titik distribusi yang memerlukan intensifikasi pengawasan. Temuan ketidaksesuaian ditindaklanjuti melalui penyampaian rekomendasi teknis, pembinaan administratif, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang bersifat signifikan.

Selain itu, laporan kinerja indikator ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pengawasan tahun berikutnya dengan pendekatan berbasis risiko dan pemetaan wilayah prioritas. Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya, seperti peningkatan integrasi data sertifikasi perangkat dan penguatan koordinasi lintas instansi, telah diimplementasikan pada tahun berjalan melalui pemanfaatan basis data nasional serta peningkatan sinergi dengan unit terkait. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian, tetapi sebagai instrumen pengendalian internal dan perbaikan berkelanjutan dalam menjaga kepatuhan APT secara sistematis dan terukur.

4.7 Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan indikator Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia tanpa penambahan personel maupun sarana baru. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perangkat dilaksanakan dengan komposisi tim yang relatif tetap, namun mampu meningkatkan cakupan objek pengawasan melalui penggabungan kegiatan pemeriksaan perangkat dengan kegiatan monitoring dan penertiban di lokasi yang sama. Pendekatan ini memungkinkan satu tim melakukan lebih dari satu fungsi pengawasan dalam satu rangkaian kegiatan, sehingga jumlah perangkat yang diverifikasi dapat meningkat dengan struktur sumber daya yang sama.

Dari sisi waktu pelaksanaan, efisiensi dicapai melalui penjadwalan kunjungan berbasis klaster wilayah dan pemanfaatan data awal dari sistem sertifikasi perangkat sebagai pra-analisis sebelum pemeriksaan lapangan. Hal ini mengurangi kebutuhan kunjungan ulang akibat ketidaksesuaian data serta mempercepat proses verifikasi teknis di lokasi. Selain itu, pemanfaatan sistem pencatatan digital dan basis data nasional memungkinkan rekapitulasi hasil pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengurangan potensi duplikasi kegiatan dan optimalisasi penggunaan sarana operasional yang telah tersedia. Dengan demikian, peningkatan capaian indikator tidak semata-mata didorong oleh penambahan sumber daya, melainkan oleh perbaikan proses kerja dan pemanfaatan teknologi secara lebih efektif dan terintegrasi.



4.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

- Berorientasi Pelayanan:** Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perangkat telekomunikasi yang legal, aman, dan tidak menimbulkan gangguan spektrum. Pemeriksaan dan pengawasan APT dilaksanakan secara cekatan, solutif, dan dapat diandalkan guna menjaga kualitas layanan komunikasi serta melindungi kepentingan publik dan layanan strategis.
- Akuntabel:** Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan melalui pencatatan hasil pemeriksaan dalam berita acara, laporan resmi, serta sistem pengawasan yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara disiplin, berintegritas, serta memanfaatkan sarana negara secara efektif dan efisien.
- Kompeten:** Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas teknis dalam identifikasi spesifikasi perangkat, validasi sertifikasi, serta pemahaman regulasi APT. Peningkatan kompetensi dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi perangkat yang dinamis serta membantu peningkatan kapasitas tim secara kolektif.

- Harmonis:** Saling peduli dan menghargai perbedaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, membangun komunikasi yang baik dengan pelaku usaha, distributor perangkat, serta pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional.
- Loyal:** Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam pengendalian perangkat telekomunikasi, setia pada kebijakan nasional pengamanan spektrum, serta menjaga nama baik instansi dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan dan penegakan kepatuhan.
- Adaptif:** Terus berinovasi dalam metode pengawasan dengan menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi perangkat, model distribusi digital, serta dinamika pasar. Tim responsif terhadap perubahan regulasi dan perkembangan teknologi komunikasi terbaru.
- Kolaboratif:** Membangun kerja sama sinergis dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, distributor, serta lintas fungsi pengawasan untuk memastikan kepatuhan perangkat secara menyeluruh dan memberikan nilai tambah dalam pengendalian spektrum.





**IK-5 Persentase (%) Terjaganya
Operasional dan Fungsi Monitoring
dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di
UPT**

**Tabel 22. Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi
Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117.65%

5.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) adalah suatu sistem perangkat yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di suatu wilayah baik berupa stasiun tetap, stasiun bergerak maupun perangkat jinjing (handheld). Balai Monitor SFR Kelas II Batam memiliki 6 (enam) stasiun SMFR tetap yang terdiri dari 3 (tiga) Stasiun Mon-DF, 1 (satu) Stasiun Mon dan 2 (dua) stasiun *Transportable*. SMFR bergerak sebanyak 1 (satu) unit serta didukung dengan perangkat handheld (jinjing) baik berupa alat ukur, perangkat monitor maupun perangkat lainnya yang fleksible dan mudah dibawa.

Dari 6 (enam) SMFR Tetap yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas II Batam, terdapat variasi

merek perangkat, jenis perangkat serta tahun pengadaan yang mempengaruhi kondisi serta performa. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan perangkat SMFR.

5.2 Sasaran Kegiatan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam telah melaksanakan *preventive maintenance* secara rutin terhadap perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur setiap bulannya terdiri dari pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dilakukan dengan cara pengecekan rutin baik secara remote maupun *on site*. Untuk kegiatan *on site*, Balai Monitor SFR Kelas II Batam mengunjungi seluruh lokasi stasiun Mon/DF. Adapun jumlah kunjungan adalah sebagai berikut: *Site* Tanjungpinang dan Uban sebanyak 4 kali, *Site* Karimun sebanyak 4



Kali, *Site* Natuna sebanyak 2 kali dan *Site* Kota Batam (*Site* Sekupang dan Nongsa) sebanyak 3 kali. Untuk *Site* Natuna dan Nongsa, Balai Monitor SFR Kelas II Batam melakukan pemeliharaan berupa Instalasi sistem proteksi petir.

Pada tahun 2025 juga telah dilakukan kalibrasi perangkat terhadap alat

monitoring/ukur yakni 2 unit Perangkat *Spectrum Analyzer* merek Anritsu.

5.3 Capaian target

Nilai *Service Level Agreement* (SLA) Perangkat Utama dan Perangkat Pendukung periode Januari sampai Desember 2025 adalah sebesar 117.65% dari target sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Nilai SLA di Balai Monitor SFR Kelas II Batam

No	Bulan	Target	Realisasi
1.	Januari	85%	100%
2.	Februari	85%	100%
3.	Maret	85%	100%
4.	April	85%	100%
5.	Mei	85%	100%
6.	Juni	85%	100%
7.	Juli	85%	100%
8.	Agustus	85%	100%
9.	September	85%	100%
10.	Oktober	85%	100%
11.	November	85%	100%
12.	Desember	85%	100%

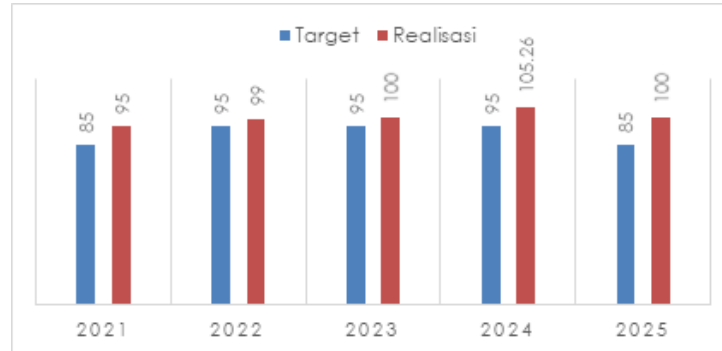
Dengan menggunakan rumus persentase berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Stasiun Monitor Siap Operasional untuk Melakukan Monitoring}}{\text{Total Stasiun Monitoring}} \times 100\%$$

Maka capaian Terjaganya Operasional dan Radio di Balai Monitor SFR Kelas II Batam adalah Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi 117.65%.

Tabel 24. Capaian dalam 5 Tahun (2021-2025)

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	85%	95%
2.	2022	95%	99%
3.	2023	95%	100%
4.	2024	95%	105.26%
5.	2025	85%	100%



Grafik 23. Capaian dalam 5 Tahun (2021-2025)

5.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Berfungsinya Alat perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dipengaruhi oleh pemeliharaan perangkat yang baik serta penambahan beberapa perangkat baru yang akan mendukung kinerja perangkat yang lain, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan monitoring perangkat yang ada sehingga dalam mendukung kelancaran tugas-tugas monitoring dan pengukuran Spektrum Frekuensi Radio maka perlu untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung kegiatan monitoring/pengukuran agar tetap dalam kondisi baik dan terawat.

5.5 Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja sebelumnya

Hasil laporan kinerja sebelumnya terkait berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kondisi operasional perangkat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan monitoring spektrum frekuensi radio. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan identifikasi terhadap perangkat yang memerlukan pemeliharaan berkala maupun perbaikan teknis guna menjaga keandalan dan kesinambungan operasional peralatan monitoring.

Selain itu, hasil laporan kinerja juga digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi pemeliharaan, pengusulan kebutuhan perbaikan/pergantian perangkat, serta pengambilan kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

5.6 Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan kinerja Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Balai Monitor SFR Kelas II Batam maka perlu melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM petugas pemeliharaan dilapangan dan agar kunjungan ke beberapa *site* lebih ditingkatkan agar lebih memantau kondisi *site* dilapangan.

5.7 Efisiensi

Keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas II Batam tahun ini khususnya pada persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT adalah dengan melakukan tata kelola pemeliharaan perangkat yang efektif serta mengupayakan secara maksimal optimalisasi pemanfaatan terhadap keseluruhan perangkat yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas II Batam termasuk dengan melakukan inspeksi *on site* secara berkala dengan jadwal

yang sudah ditentukan sehingga kondisi perangkat dapat diperhatikan secara betul dan juga dilakukan perbaikan sistem penangkal petir guna mengantisipasi cuaca ekstrim pada tahun 2025.

5.6 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Pelaksanaan kegiatan inspeksi/ Pengecekan Perangkat Guna Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio tidak terlepas dari implementasi budaya BerAKHLAK yakni:

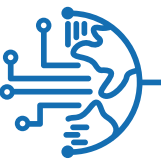
1. Berorientasi Pelayanan.
Dengan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dengan baik maka akan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat utamanya dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
2. Akuntabel.
Dalam proses berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dilakukan oleh *stakeholder* secara jujur dan bertanggung jawab.
3. Kompeten.
Dalam berfungsinya perangkat pendukung SMFR ini didukung oleh *stakeholder* yang senantiasa meningkatkan kemampuannya sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Harmonis.
Dalam kegiatan pengecekan perangkat pendukung SMFR didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif demi tercapainya target organisasi
5. Loyal
Petugas pemeliharaan wajib melaksanakan kegiatan inspeksi maupun perbaikan mandiri

terhadap alat/perangkat monitoring dengan berpedoman pada *Manual Book* serta kaidah-kaidah yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, petugas harus memiliki sikap loyal atau mencintai tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

6. Adaptif
 - a. Dengan bervariasinya perangkat yang dimiliki, petugas pemeliharaan harus memiliki kepekaan serta respons yang cepat apabila terjadi gangguan (*trouble*) pada perangkat.
 - b. Petugas pemeliharaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi, mengingat terdapat beberapa perangkat keluaran terbaru.
7. Kolaboratif
 - a. Melakukan komunikasi secara intens dengan pengguna alat/perangkat monitoring (*user*) apabila diperlukan.
 - b. Mampu mengenali adanya kerusakan sehingga dapat menemukan solusi dengan cepat dan tepat.
 - c. Melakukan pertukaran informasi dengan UPT lain, Ditdal, atau vendor sebagai *second opinion* sebelum dilakukan tindak lanjut.

5.9 Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Telah dilakukan *Benchmark* capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagai sesama unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan monitoring spektrum frekuensi radio. Berdasarkan hasil perbandingan, kedua satuan kerja





memiliki target indikator kinerja yang sama sebesar 85% pada indikator Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio, dengan realisasi masing-masing mencapai 100% atau sebesar 117,65% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan operasional

dan fungsi monitoring telah terlaksana secara optimal. Hasil *Benchmark* ini menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah mencapai 100% pada tahun berikutnya melalui konsistensi pemeliharaan perangkat, kesiapan sarana pendukung, dan penguatan pengawasan teknis secara berkelanjutan.

Tabel 25. *Benchmark* Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Persentase %	Keterangan
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	Balmon Batam	85	100	117,65	Presentase Capaian Balmon Batam dan Balmon Padang sama – sama 100%
	Balmon Padang	85	100	117,65	



IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda

Administratif

Target indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif adalah 80% dari jumlah *invoice*.



Grafik 24. Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 26. Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	100%

6.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Pengenaan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan bagian integral dari sistem pengendalian dan penegakan hukum di bidang spektrum. Spektrum sebagai sumber daya terbatas milik negara wajib digunakan sesuai izin ISR dan parameter teknis yang ditetapkan. Pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara tegas berpotensi menimbulkan gangguan layanan publik, ketidaktertiban penggunaan frekuensi, serta menurunkan tingkat kepatuhan penyelenggara. Oleh karena itu, indikator Persentase Penyelesaian Sanksi Denda diperlukan untuk mengukur efektivitas tindak lanjut penegakan hukum administratif hingga tahap penyelesaian kewajiban.

Indikator ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hasil pemeriksaan dan monitoring spektrum ditindaklanjuti secara konsisten melalui mekanisme penerbitan *invoice*, pengenaan sanksi administratif, serta pemantauan penyelesaian pembayaran sesuai ketentuan. Pengukuran dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah penyelesaian *invoice* denda terhadap total *invoice* yang diterbitkan dalam tahun berjalan, sebagaimana tercantum dalam PK UPT 2025.

Tujuan dari indikator ini adalah meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum terhadap regulasi, memperkuat efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelanggaran, serta menjaga kredibilitas sistem pengawasan spektrum. Selain itu, indikator ini juga



mendukung tertib administrasi dan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor spektrum frekuensi radio, sehingga pengawasan tidak berhenti pada temuan pelanggaran,

tetapi tuntas hingga penyelesaian kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Pengukuran dilakukan dengan metode sebagai berikut:

$$\frac{\text{Inv. Denda yang Terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Denda Belum Terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\text{Inv Denda Administratif}} \times 100\%$$

Melalui metode tersebut, diperoleh persentase capaian yang mencerminkan tingkat efektivitas penyelesaian dan pengelolaan sanksi denda administratif dalam periode pelaporan.

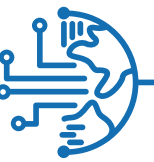
6.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Sanksi Denda Administratif memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio. Dari aspek layanan publik, penyelesaian sanksi memastikan bahwa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan interferensi atau gangguan layanan ditindaklanjuti secara tegas, sehingga kualitas dan stabilitas jaringan komunikasi tetap terjaga. Dari aspek tata kelola dan keuangan negara, penyelesaian invoice denda mencerminkan efektivitas penegakan hukum administratif sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di wilayah perbatasan seperti Batam, penegakan sanksi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum dan melindungi kepentingan nasional dari potensi interferensi lintas negara.

Secara SWOT, kekuatan utama terletak pada regulasi yang jelas, dukungan sistem administrasi berbasis elektronik, serta mekanisme pelaporan yang terstruktur. Kelemahannya masih

terkait pada proses administrasi dan koordinasi dengan pihak pelanggar yang memerlukan waktu hingga penyelesaian pembayaran. Peluang muncul dari penguatan transformasi digital dan integrasi data monitoring, pemeriksaan, serta penagihan dalam satu ekosistem pengawasan. Sementara itu, ancaman berasal dari potensi peningkatan kompleksitas pelanggaran akibat perkembangan teknologi dan dinamika penggunaan spektrum yang semakin padat.

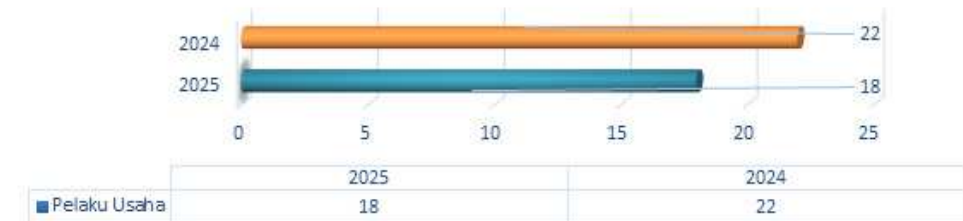
Dalam perspektif *Balanced Scorecard*, dari sisi *stakeholder*, indikator ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan operator terhadap konsistensi penegakan regulasi. Dari perspektif proses internal, penyelesaian sanksi menunjukkan efektivitas siklus pengawasan mulai dari temuan, penetapan pelanggaran, hingga tindak lanjut administratif. Pada perspektif pembelajaran dan SDM, peningkatan kapasitas petugas dalam aspek hukum administratif dan pengelolaan data menjadi faktor penting. Dari sisi tata kelola, indikator ini memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas pengawasan spektrum sebagai bagian dari sistem pengendalian nasional. Dengan demikian, keberhasilan indikator ini tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga memperkuat fondasi kepatuhan dan ketertiban penggunaan spektrum secara berkelanjutan.



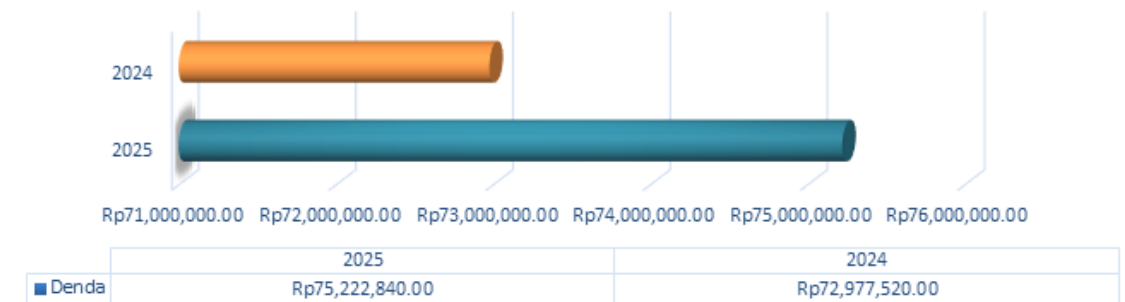
6.3 Tabulasi

Tabel 27. Hasil Penanganan Sanksi Denda Administratif

No	Kegiatan Penertiban	Objek Penertiban	Jumlah Denda Administrasi Terbayar (Rp)	Jumlah Denda Administrasi Belum Terbayar (Rp)	Status SPPD	Keterangan
1	Tibnas Tahap I	ISP (<i>Internet Service Provider</i>)	Rp 30,940,140	Rp -	Sudah Terbayar	Pengenaan Denda di Tingkat UPT
2	Tibnas Tahap II	<i>Microwave Link</i>	Rp 24,948,000	Rp -	Sudah Terbayar	Pengenaan Denda di Tingkat UPT
3	Tibnas Tahap III	Bergerak Darat dan APT	Rp 11,157,300	Rp -	Sudah Terbayar	Pengenaan Denda di Tingkat UPT
4	Tibnas Regional	Bergerak Darat dan APT	Rp 8,177,400	Rp -	Sudah Terbayar	Pengenaan Denda di Tingkat UPT



Grafik 25. Jumlah Pelaku Usaha Per Tahun



Grafik 26. Total Denda Per Tahun

6.4 Analisa Indikator Kinerja Secara Umum & Holistik

Secara nasional, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan instrumen penting dalam menjaga kepatuhan ISR dan ketertiban tata kelola spektrum. Dengan meningkatnya jumlah stasiun radio serta kompleksitas teknologi komunikasi, pengawasan tidak cukup

hanya pada tahap monitoring dan pemeriksaan, tetapi harus berlanjut hingga penyelesaian sanksi secara tuntas. Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang memadai serta dukungan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan proses penagihan dan penyelesaian sanksi terdokumentasi secara akuntabel. Dibandingkan dengan praktik negara maju yang telah menerapkan *enforcement* berbasis



risiko dan sistem terintegrasi *real-time*, Indonesia berada pada tahap penguatan integrasi data dan konsistensi tindak lanjut administratif, sementara negara berkembang lainnya masih menghadapi keterbatasan sistem dan sumber daya dalam proses penegakan sanksi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditentukan oleh konsistensi tindak lanjut atas setiap temuan pelanggaran, integrasi hasil pemeriksaan dengan proses penagihan administratif, serta koordinasi internal yang efektif antara fungsi teknis dan administrasi. Strategi ini sejalan dengan praktik internasional yang menekankan *deterrent effect* sebagai instrumen peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, capaian indikator tidak hanya merefleksikan penyelesaian *invoice* sanksi, tetapi juga menunjukkan efektivitas sistem pengawasan spektrum secara menyeluruh dalam membangun kepatuhan, menjaga kredibilitas regulator, dan mendukung tata kelola spektrum yang berkelanjutan.

6.5 Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target dan Upaya Percepatan/Perbaikan

Secara umum target penyelesaian sanksi denda administratif pada tahun berjalan telah tercapai sesuai PK UPT 2025. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala operasional, antara lain keterbatasan waktu dalam proses administrasi penagihan, perlunya verifikasi data pelanggaran sebelum penerbitan *invoice*, serta koordinasi dengan pihak pelanggar yang memerlukan waktu hingga penyelesaian pembayaran. Selain itu, dinamika perubahan data kepemilikan atau pengelolaan stasiun radio juga berpotensi memperlambat proses tindak lanjut administratif.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan, dilakukan penguatan integrasi data antara hasil pemeriksaan, sistem monitoring, dan proses penagihan administratif, serta peningkatan koordinasi internal agar penerbitan dan pemantauan *invoice* dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pendekatan persuasif melalui pembinaan awal juga diterapkan untuk mendorong kepatuhan sebelum masuk tahap sanksi lanjutan. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah tetap terjaganya kualitas layanan komunikasi serta meningkatnya kepatuhan pengguna spektrum, sehingga sistem pengawasan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

6.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja terkait penyelesaian sanksi denda administratif dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi efektivitas penegakan hukum di bidang spektrum frekuensi radio. Data penyelesaian *invoice* dan tindak lanjut pelanggaran digunakan untuk memetakan tingkat kepatuhan pengguna spektrum, mengidentifikasi pola pelanggaran yang berulang, serta menentukan prioritas pengawasan lanjutan pada stasiun atau penyelenggara dengan tingkat risiko tinggi. Selain itu, hasil laporan menjadi bahan koordinasi internal dalam penyempurnaan mekanisme penagihan dan penguatan sinergi antara fungsi teknis pemeriksaan dan administrasi sanksi.

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya telah diimplementasikan melalui peningkatan integrasi data hasil pemeriksaan dengan sistem pencatatan sanksi serta percepatan proses monitoring penyelesaian *invoice*. Jika terdapat

indikator yang mengalami penyesuaian dalam PK tahun berjalan, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi tetap dilaksanakan dan dicatat sebagai kinerja lainnya dalam rangka menjaga kesinambungan pengendalian spektrum. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi menjadi instrumen penguatan tata kelola dan peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.

6.7 Rekomendasi Perbaikan di Tahun Berikutnya

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, penerbitan sanksi denda administratif telah berjalan efektif, namun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek percepatan proses administrasi, penguatan validasi data pelanggaran, serta konsistensi pemantauan penyelesaian kewajiban. Selain itu, potensi peningkatan kompleksitas pelanggaran akibat perkembangan teknologi perangkat dan dinamika penggunaan spektrum menuntut pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis risiko dalam menentukan prioritas penegakan sanksi.

Untuk tahun berikutnya, direkomendasikan penguatan integrasi data antara hasil monitoring, pemeriksaan, dan sistem penagihan sanksi agar proses penerbitan dan pemantauan *invoice* lebih cepat dan akurat. Diperlukan pula pengembangan mekanisme penilaian risiko pelanggaran guna memprioritaskan tindak lanjut pada pelanggaran berdampak tinggi, serta peningkatan kapasitas petugas dalam aspek hukum administratif dan pengelolaan data. Rekomendasi ini selaras dengan kebijakan nasional DJID dalam memperkuat kepatuhan ISR dan membangun sistem pengawasan spektrum yang tidak hanya reaktif, tetapi

preventif dan berkelanjutan.

6.8 Efisiensi

Pencapaian indikator penyelesaian sanksi denda administratif dilakukan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa penambahan personel khusus. Proses verifikasi pelanggaran, penerbitan *invoice*, dan pemantauan penyelesaian dilaksanakan oleh tim yang sama dengan fungsi pemeriksaan, sehingga satu rangkaian kegiatan pemeriksaan dapat langsung ditindaklanjuti pada aspek administratif. Dengan komposisi tim yang relatif tetap, seluruh target penyelesaian *invoice* dapat dicapai secara maksimal, menunjukkan efisiensi pemanfaatan SDM dan integrasi fungsi teknis-administratif dalam satu siklus kerja.

Dari sisi waktu dan sistem, pemanfaatan aplikasi pelaporan dan pencatatan elektronik memungkinkan percepatan proses validasi data pelanggaran dan pemantauan status pembayaran tanpa perlu kunjungan berulang kelokasi. Integrasi hasil pemeriksaan dengan sistem administrasi sanksi juga mengurangi potensi duplikasi pekerjaan dan mempercepat proses rekapitulasi laporan. Optimalisasi sarana yang telah tersedia tersebut berdampak pada efektivitas proses kerja, meminimalkan kebutuhan koordinasi berulang secara manual, serta memastikan capaian indikator diperoleh melalui peningkatan kualitas proses, bukan melalui penambahan sumber daya.

6.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

1. Berorientasi Pelayanan: Penerimaan sanksi denda administratif dilaksanakan untuk menjaga kualitas layanan komunikasi masyarakat serta memastikan tidak terjadi gangguan yang berdampak pada layanan strategis seperti





pelayaran, penerbangan, dan keselamatan publik. Penegakan sanksi dilakukan secara profesional dan proporsional guna menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan layanan publik.

2. **Akuntabel:** Setiap proses penerbitan *invoice*, verifikasi pelanggaran, hingga penyelesaian pembayaran didokumentasikan melalui sistem resmi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan. Seluruh data administratif terdokumentasi dan dapat ditelusuri, sehingga menjamin transparansi, integritas proses, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan penerimaan negara.
3. **Kompeten:** Petugas meningkatkan kapasitas dalam aspek regulasi ISR, tata kelola administratif sanksi, serta pengelolaan data elektronik. Penguatan kompetensi ini mendukung ketepatan identifikasi pelanggaran, akurasi penetapan sanksi, dan efektivitas pemantauan penyelesaian kewajiban.
4. **Harmonis:** Pelaksanaan sanksi tetap mengedepankan komunikasi yang

konstruktif dengan pemegang izin, menghargai perbedaan kondisi dan latar belakang pelanggar, serta menjaga hubungan kerja yang profesional agar tercipta lingkungan pengawasan yang kondusif.

5. **Loyal:** Kegiatan penegakan sanksi mendukung agenda nasional dalam pengendalian spektrum sebagai sumber daya strategis negara. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan menjaga kredibilitas institusi serta nama baik ASN.
6. **Adaptif:** Tim menyesuaikan mekanisme penagihan dan pemantauan dengan pemanfaatan sistem digital serta merespons dinamika perkembangan teknologi komunikasi yang semakin kompleks.
7. **Kolaboratif:** Koordinasi dilakukan secara sinergis antara fungsi monitoring, pemeriksaan, dan administrasi sanksi, serta dengan pihak terkait untuk memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara konsisten dan efektif.

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Tabel 28. Capaian Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%



7.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Pengukuran kualitas layanan jaringan telekomunikasi seluler merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka pengawasan dan



evaluasi penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Kegiatan pengukuran ini dilakukan untuk menilai tingkat *Quality of Service* (QoS) dan *Quality of Experience* (QoE) pada layanan telekomunikasi, khususnya layanan seluler yang digunakan secara luas oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan serta mampu memberikan kualitas layanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, hasil pengukuran ini juga menjadi dasar dalam proses evaluasi, pengawasan, dan perumusan langkah perbaikan guna meningkatkan mutu layanan telekomunikasi secara berkelanjutan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah nota dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 terkait penugasan pengukuran kualitas layanan di wilayah kerja UPT.

7.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran pengukuran kualitas layanan adalah pengukuran kualitas layanan dilakukan terhadap penyelenggaraan jaringan bergerak seluler di wilayah kerja UPT dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Formula target dari kinerja ini adalah:

$$\text{Capaian PK} : \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang sudah diukur}}{\text{jumlah 80\% kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Dengan rumus tersebut maka target pengukuran kabupaten/kota untuk wilayah Kepulauan Riau sebanyak 80% x 7 kabupaten/kota sehingga target di tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota.

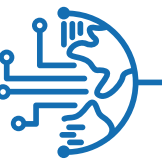
7.3 Capaian target

Hasil pengukuran kualitas layanan dilakukan terhadap penyelenggaraan jaringan bergerak seluler di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dengan capaian sebesar 125% yang berarti bahwa seluruh kabupaten/kota yaitu 7 (tujuh)

kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dapat dilakukan pengukuran dengan baik.

Hasil pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan bergerak di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam secara detail dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan bergerak secara keseluruhan.



Secara keseluruhan kegiatan pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan bergerak

telah dilaksanakan untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 3. Pengukuran Kualitas Layanan Penyelenggara Jaringan Bergerak Secara Keseluruhan

Terdapat kabupaten/kota yang dilaksanakan pengukuran lebih dari satu kali yaitu kota Batam sebanyak 2 kali, kabupaten Bintan sebanyak 2 kali dan sisanya dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk masing-masing kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 kali untuk kota Batam dan kabupaten Bintan ini untuk mengakomodir pengukuran bersama dengan Balai Deteksi Sinyal (BDS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kabupaten dengan kecepatan internet

yang cepat adalah : 1) kabupaten Natuna sebesar 86.07 Mbps lalu disusul; 2) kabupaten Anambas 78.76 Mbps dan 3) kabupaten Lingga sebesar 75.59 Mbps.

Secara keseluruhan rata-rata kecepatan unduh, kecepatan unggah dan latensi untuk seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Rata-Rata Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Pada Provinsi Kepulauan Riau

Rata-rata hasil pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan seluler untuk seluruh wilayah di provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : 1) Rata-rata kecepatan unduh sebesar 61.63 Mbps; 2) Rata-rata kecepatan

unggah sebesar 16.7 Mbps dan 3) Rata-rata latency sebesar 60 ms.

Untuk hasil pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan seluler untuk setiap operator seluler ditampilkan pada gambar berikut

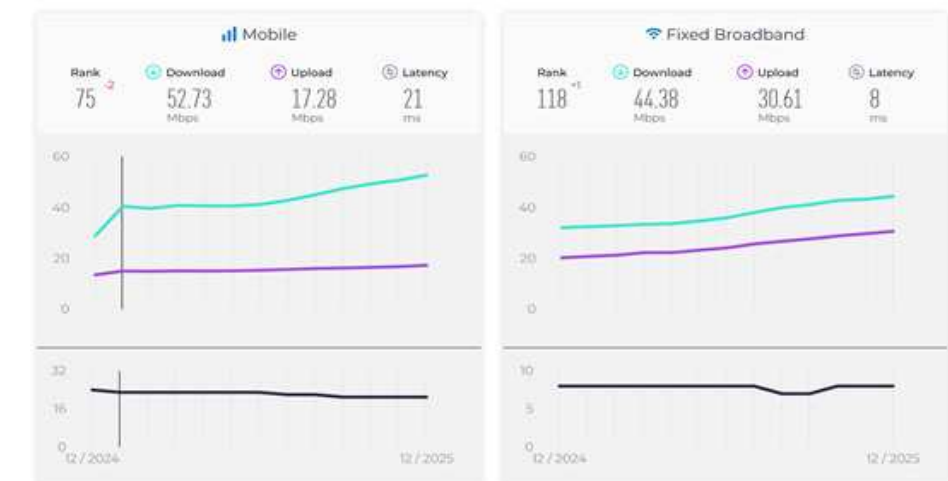


Gambar 5. Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Penyelenggara Jaringan Seluler Setiap Operator Seluler

Untuk wilayah Kepulauan Riau PT. Telekomunikasi Selular menempati posisi teratas untuk rata-rata kecepatan unduh sebesar 85.49 Mbps, sedangkan untuk kecepatan unggah diduduki oleh PT. XL Smart Telecom Sejahtera sebesar 19.04 Mbps.

Kecepatan internet untuk seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut. Kecepatan internet pada gambar tersebut memperlihatkan kecepatan internet untuk layanan seluler (*mobile broadband*) pada sisi kiri dan kecepatan tetap (*fixed broadband*).

← Indonesia Median Country Speeds Updated December 2025



Starting June 2024, location inclusion criteria use the Precision Threshold for mobile and fixed broadband. Results are updated mid-month for the previous three months.

Gambar 6. Kecepatan internet nasional. Sumber : Ookla Research™



Indonesia berada di peringkat ke-75 untuk kecepatan internet dibandingkan dengan negara lainnya. Perbandingan kecepatan internet dari hasil pengukuran dibandingkan

dengan kecepatan internet nasional berdasarkan data dari ookla dapat dilihat pada tabel berikut:

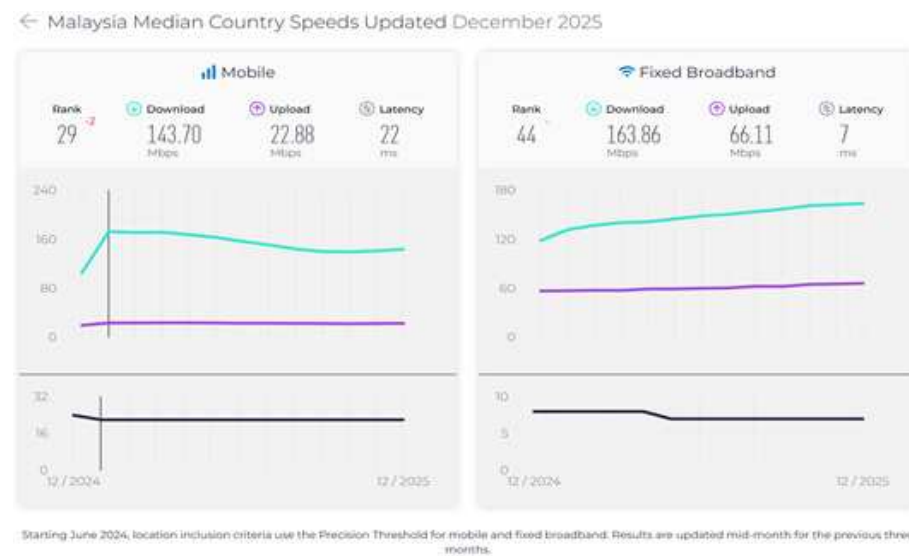
Tabel 29. Perbandingan Kecepatan Internet dengan Nasional

No	Parameter	Ookla (Nasional)	Hasil Ukur (Kepri)
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	52.73	61.76
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	17.28	16.48
3	Latency (ms)	21	60.3

Dari sisi kecepatan unduh hasil ukur untuk wilayah kepulauan riau berada di atas kecepatan nasional dari data hasil ookla namun untuk kecepatan unggah hasil ukur berada di bawah dari kecepatan nasional. *Latency* juga dalam nilai yang cukup besar dibandingkan nilai *latency* nasional yang berarti bahwa delay masih terlalu besar untuk

layanan seluler di kepulauan riau.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia kecepatan internet di Kepulauan Riau dapat didasarkan pada hasil pengukuran Ookla untuk negara Singapura dan Malaysia sesuai gambar berikut.



Gambar 7. Kecepatan internet Malaysia. Sumber : Ookla Research TM

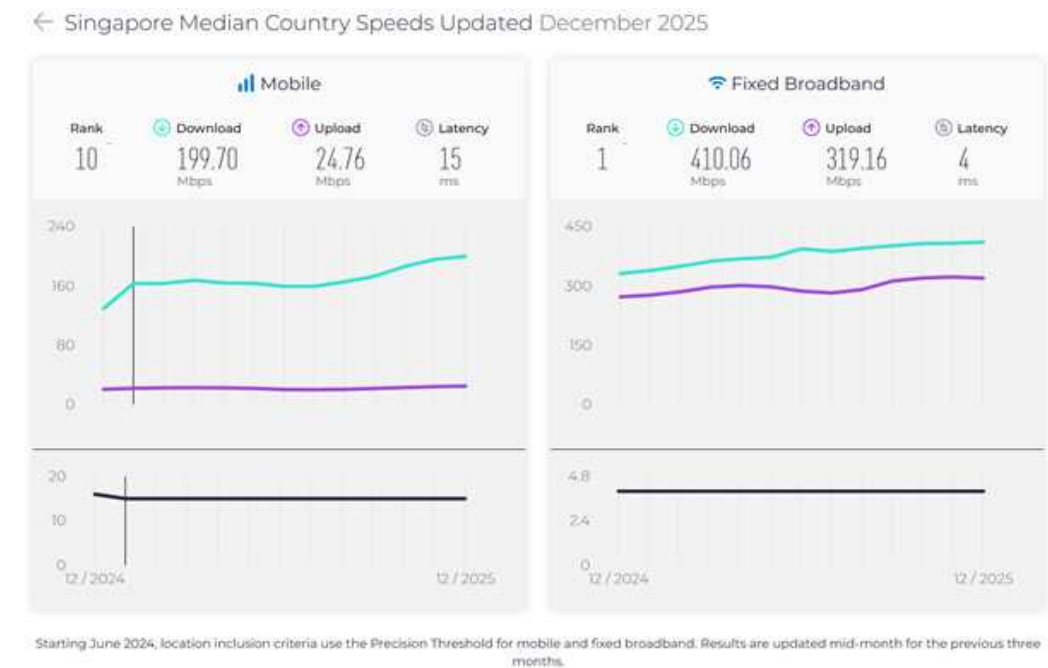


Secara tabulasi kecepatan internet di wilayah Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung

dengan wilayah Kepulauan Riau yaitu Malaysia dan Singapura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan Kecepatan Internet Dengan Negara Tetangga

No	Parameter	Ookla (Malaysia)	Ookla (Singapura)	Hasil Ukur (Kepri)
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	143.7	199.7	61.76
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	22.88	24.76	16.48
3	Latency (ms)	22	15	60.3



Gambar xx. Kecepatan internet Singapura. Sumber : Ookla Research TM

Ratio kesuksesan penggunaan aplikasi Youtube yang merupakan parameter untuk penilaian

user experience (pengalaman pengguna) ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 9. Rasio Kesuksesan Youtube Dan Ping



2. Pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan bergerak di kabupaten/kota
- Hasil pengukuran kualitas layanan penyelenggara jaringan bergerak di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam adalah sebagai berikut:

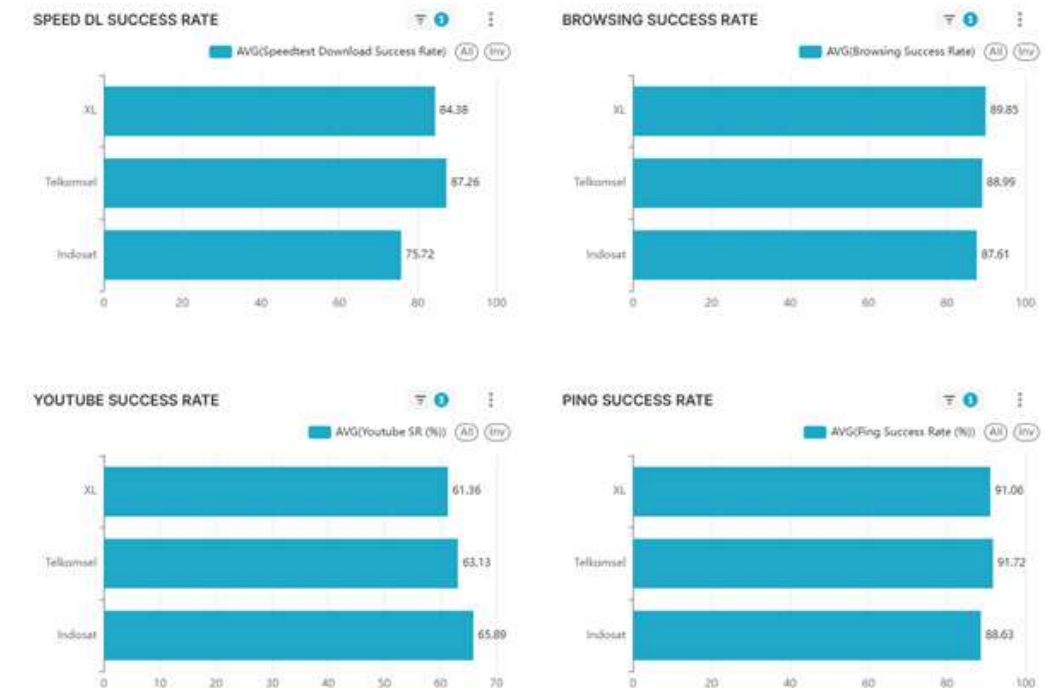
- a. Kota Batam
- Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kota Batam ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah sebesar 49.02 Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 15.36 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kota Batam

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	61.57	32.17	53.68
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	11.93	21	12.97
3	Latency (ms)	73.93	66.54	44.5
4	Rasio sukses Unduh (%)	87.26	84.38	75.72
5	Rasio sukses Browsing (%)	88.99	89.85	87.61
6	Rasio sukses Youtube (%)	63.13	61.36	65.89
7	Rasio sukses Ping (%)	91.72	91.06	88.63



Gambar 10. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kota Batam

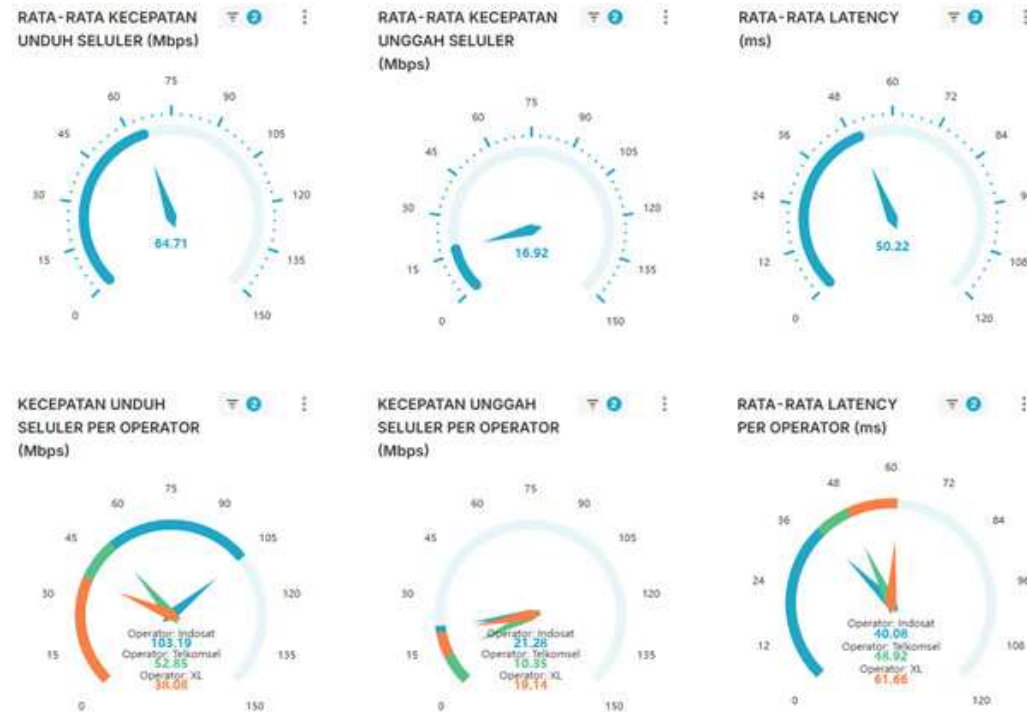


Gambar 11. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler di Kota Batam

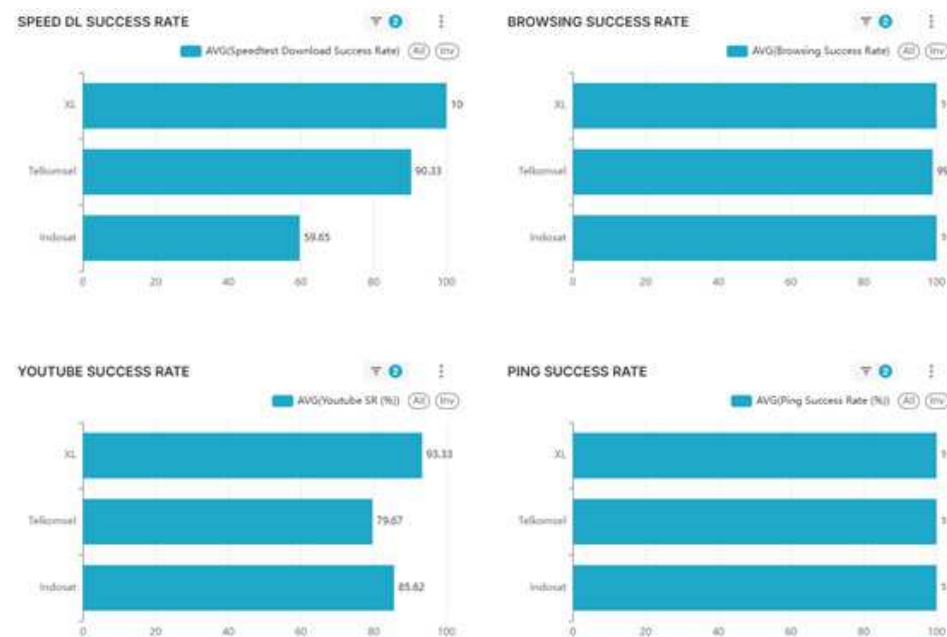
- b. Kota Tanjung Pinang
- Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kota Tanjung Pinang ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah sebesar 64.71 Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 16.92 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kota Tanjung Pinang

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	52.85	38.08	103.19
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	10.35	19.14	21.28
3	Latency (ms)	48.92	61.66	40.08
4	Rasio sukses Unduh (%)	90.33	10	59.65
5	Rasio sukses Browsing (%)	99	100	100
6	Rasio sukses Youtube (%)	79.67	93.33	85.62
7	Rasio sukses Ping (%)	100	100	100



Gambar 12. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kota Tanjung Pinang



Gambar 13. Rasio Kesuksesan Unduh, *Browsing*, Youtube Dan *Ping* Setiap Operator Seluler di Kota Tanjung Pinang

c. Kabupaten Bintan
Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kabupaten Bintan ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah sebesar

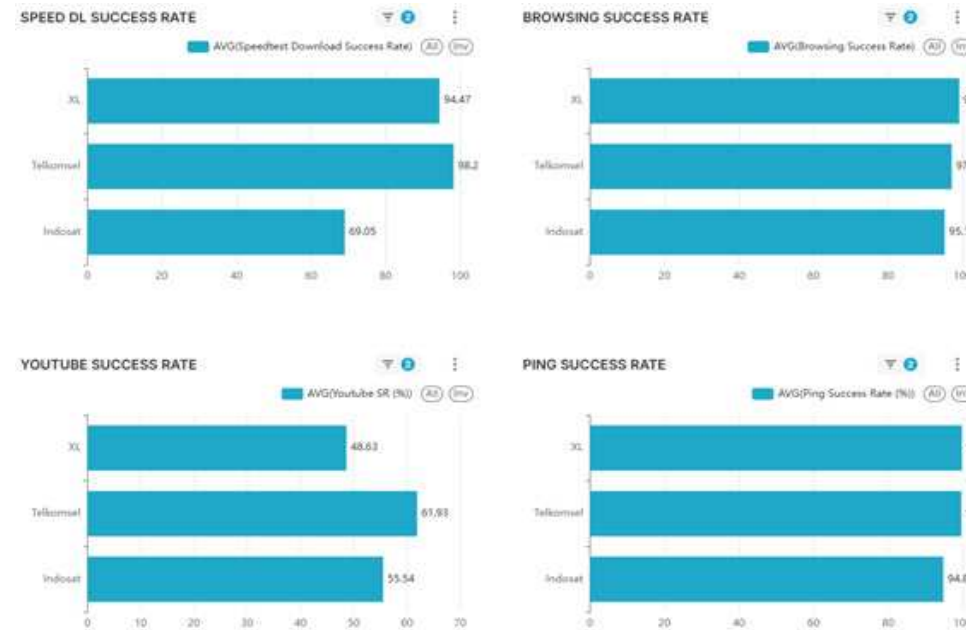
44.74 Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 11.9 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Bintan

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	60.77	31.62	40.1
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	13.66	15.26	6.15
3	Latency (ms)	53.39	65.06	51.67
4	Rasio sukses Unduh (%)	98.24	94.47	69.05
5	Rasio sukses <i>Browsing</i> (%)	97.07	99.08	95.16
6	Rasio sukses Youtube (%)	61.93	48.63	55.54
7	Rasio sukses <i>Ping</i> (%)	99.63	99.75	94.79



Gambar 14. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Bintan



Gambar 15. Rasio Kesuksesan Unduh, *Browsing*, Youtube Dan *Ping* Setiap Operator Seluler di Kabupaten Bintan

d. Kabupaten Karimun

Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kabupaten Karimun ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah sebesar 75.7

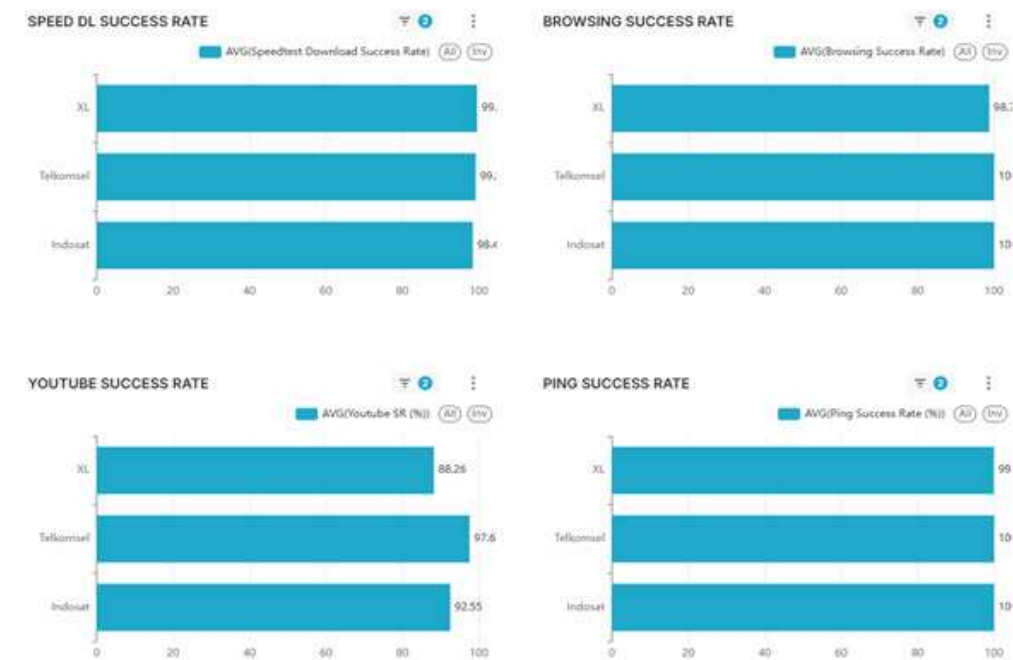
Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 18.51 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Karimun

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	104.91	47.23	74.96
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	16.51	19.14	19.87
3	Latency (ms)	40.63	61.11	43.85
4	Rasio sukses Unduh (%)	99.19	99.56	98.42
5	Rasio sukses <i>Browsing</i> (%)	100	98.74	100
6	Rasio sukses Youtube (%)	97.6	88.26	92.55
7	Rasio sukses <i>Ping</i> (%)	100	99.92	100



Gambar 16. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Karimun



Gambar 17. Rasio Kesuksesan Unduh, *Browsing*, Youtube Dan *Ping* Setiap Operator Seluler di Kabupaten Karimun



e. Kabupaten Lingga

Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kabupaten Lingga ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah

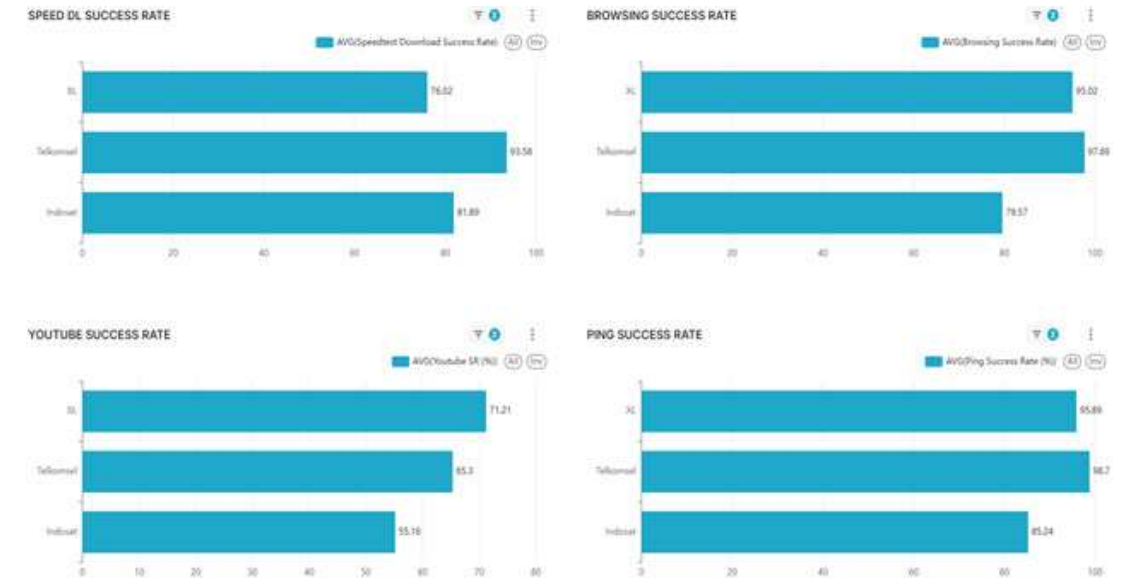
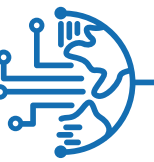
sebesar 68.26 Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 22.34 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Lingga

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	69.3	39.05	96.44
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	14.66	31.24	21.14
3	Latency (ms)	47.53	57.56	34.32
4	Rasio sukses Unduh (%)	93.58	76.02	81.89
5	Rasio sukses <i>Browsing</i> (%)	95.02	97.60	79.57
6	Rasio sukses Youtube (%)	65.30	71.21	55.16
7	Rasio sukses <i>Ping</i> (%)	98.77	95.89	85.24



Gambar 18. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Lingga



Gambar 19. Rasio Kesuksesan Unduh, *Browsing*, Youtube Dan *Ping* Setiap Operator Seluler di Kabupaten Lingga

f. Kabupaten Natuna

Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kabupaten Natuna ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah

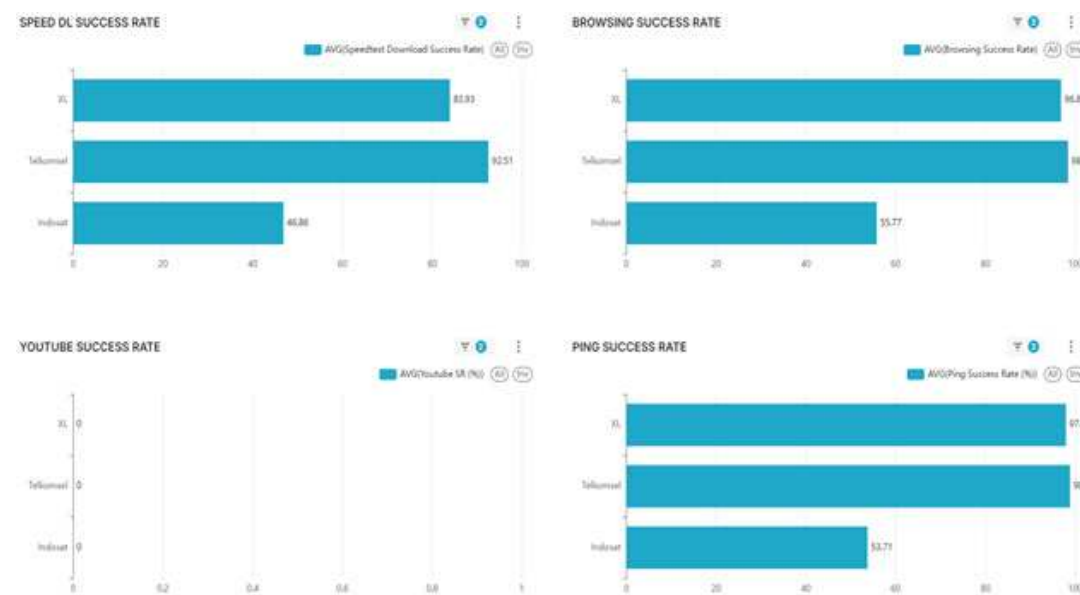
sebesar 78.03 Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 15.02 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Natuna

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	123.49	32.55	68.96
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	18.51	13.86	11.07
3	Latency (ms)	55.43	77.67	37.09
4	Rasio sukses Unduh (%)	92.51	83.93	46.86
5	Rasio sukses <i>Browsing</i> (%)	98.38	96.83	55.77
6	Rasio sukses Youtube (%)	0	0	0
7	Rasio sukses <i>Ping</i> (%)	98.84	97.92	53.71



Gambar 20. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Natuna



Gambar 21. Rasio Kesuksesan Unduh, *Browsing*, Youtube Dan *Ping* Setiap Operator Seluler di Kabupaten Natuna

- g. Kabupaten Anambas
Hasil pengukuran kualitas layanan secara keseluruhan di kabupaten Anambas ditampilkan pada gambar berikut. Kecepatan unduh rata-rata secara agregat adalah

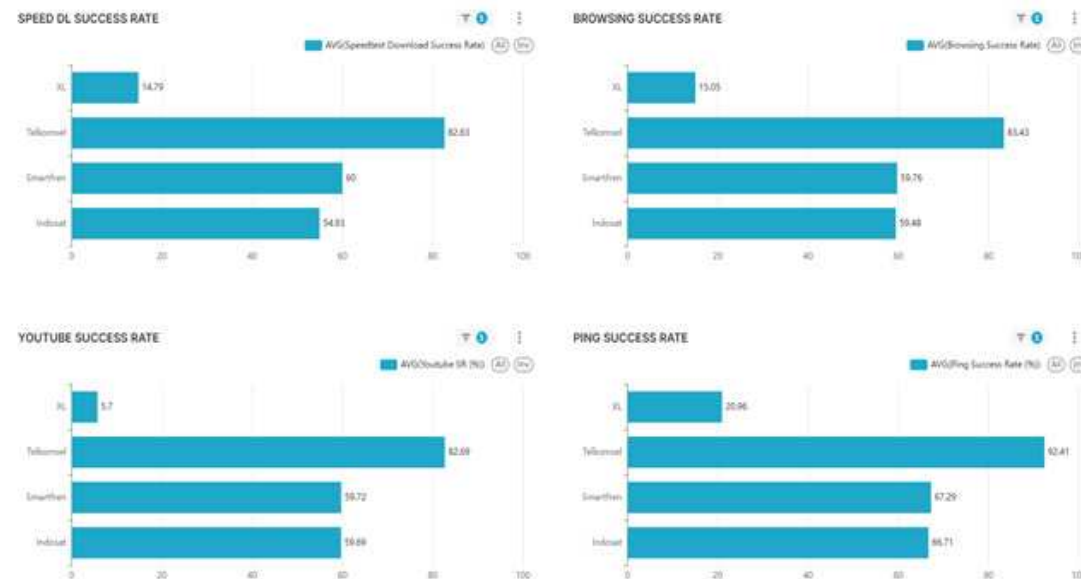
sebesar 102.64 Mbps, dan kecepatan unggah rata-rata agregat sebesar 26.89 Mbps. Perbandingan hasil pengukuran untuk setiap operator di kabupaten Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Anambas

No	Parameter	Telkomsel	XL Smart	IOH
1	Kecepatan Unduh (Mbps)	104.91	47.23	74.96
2	Kecepatan Unggah (Mbps)	16.51	19.14	19.87
3	Latency (ms)	40.63	61.11	43.85
4	Rasio sukses Unduh (%)	82.63	14.79	54.93
5	Rasio sukses <i>Browsing</i> (%)	83.43	15.05	59.48
6	Rasio sukses Youtube (%)	82.69	5.7	59.69
7	Rasio sukses <i>Ping</i> (%)	92.41	20.96	66.71



Gambar 22. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kabupaten Anambas



Gambar 23. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler di Kabupaten Anambas

7.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Untuk capaian perjanjian kinerja pengukuran di setiap kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan baik. Namun perlu analisis lebih mendalam terkait kecepatan akses internet di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

7.5 Faktor kendala/hambatan pada pencapaian target pengukuran kualitas layanan

Ketersediaan anggaran terutama pulsa atau paket data menjadi kendala terutama saat menjalankan posko di event Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

7.6 Dampak Kegiatan

Kegiatan pengukuran ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena ketiak hasil pengukuran tidak sesuai dengan standar kualitas layanan jaringan bergerak maka data yang terkumpul pada Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) akan disampaikan ke penyelenggara jasa internet dalam bentuk tiket perbaikan.

7.7 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja

Tindak lanjut dari pelaporan ini adalah sebagai ukuran akses kecepatan internet di suatu wilayah dan menjadi acuan untuk pengembangan atau perbaikan akses kecepatan internet di suatu wilayah berdasarkan target dari pemerintah.

7.8 Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Perbaikan yang sangat mendesak di tahun 2026 adalah terkait penggantian perangkat handheld yang digunakan sebagai sensor dalam pengukuran.



IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)

Tabel 38. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)	100%	100%	100%

8.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan UNAR (Ujian Negara Amatir Radio) dan IKRAN (Izin Komunikasi Radio Perikanan) merupakan sertifikasi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital kepada para anggota amatir radio dan nelayan. Untuk pelaksanaan UNAR merupakan mandat dari Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 sedangkan untuk pelaksanaan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN yang merupakan bagian dari pelayanan MOTS yang bertujuan untuk melatih sumber daya manusia nelayan/pelaku usaha sektor perikanan pengguna frekuensi radio dalam komunikasi umum di laut agar memiliki keterampilan dan menjaga etika komunikasi di udara. Peserta kegiatan UNAR dapat mendaftar di halaman website <https://iar-ikrap.postel.go.id> dan untuk memperoleh sertifikasi IKRAN dapat mendaftar pada website <https://serena.postel.go.id>.

8.2 Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di wilayah Kepulauan Riau di bagi menjadi 2 kategori yaitu: UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler. UNAR Reguler adalah ujian yang dilaksanakan di kantor Balai Monitor SFR Kelas II Batam, sedangkan UNAR Non Reguler adalah ujian yang dilaksanakan di Kab/ Kota di wilayah Kepulauan Riau, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan ke peserta ujian calon amatir radio atau amatir radio yang akan naik tingkat. UNAR dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Sasaran Kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC/ IKRAN adalah Nelayan, Nakhoda, atau Awak kapal, serta para pelaku usaha sektor perikanan yang belum memiliki Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk mengoperasikan alat komunikasi radio, baik antar kapal maupun antara kapal dengan stasiun radio pantai.

8.3 Capaian target

Indikator kinerja persentase untuk penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Jml keg. UNAR})/6) + ((\text{Jml keg. Sertifikasi SRC/LRC, KRAN})/1)}{2} \times 100\%$$

Adapun pelaksanaan UNAR di Kepulauan Riau 2025 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali baik itu secara reguler dan non reguler tahun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 39. Pelaksanaan UNAR di Balai Monitor SFR Kelas II Batam

Jenis Ujian	Jumlah Peserta	Hasil	
		Lulus	Tidak Lulus
1. Reguler 1	20	11	9
2. Reguler 2	13	7	6
3. Reguler 3	5	1	4
4. Reguler 4	4	3	1
5. Reguler 5	5	5	0
6. Non Reguler	20	15	5

Tabel 40. Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun (2021-2025)

No	Tahun	Jumlah Pelaksanaan
1.	2021	6 kali
2.	2022	4 kali
3.	2023	5 kali
4.	2024	6 kali
5.	2025	6 kali



Grafik 27. Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun (2021-2025)

Untuk pelaksanaan Bimtek Sertifikasi SRC/LRC Tanjungpinang. Adapun jumlah sertifikasi yang dan IKRAN dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di terbit adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Jumlah Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN di Balai Monitor SFR Kelas II Batam

Jenis Ujian	Jumlah Sertifikat yang Terbit
1. Sertifikasi SRC/ LRC	19
2. Sertikasi IKRAN	25

Tabel 42. Capaian Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC IKRAN dan Sosialisasi MOTS dalam 5 Tahun (2021-2025)

No	Tahun	Jumlah Pelaksanaan
1.	2021	2 kali
2.	2022	2 kali
3.	2023	2 kali
4.	2024	2 kali
5.	2025	1 kali



Grafik 28. Capaian Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC IKRAN dan Sosialisasi MOTS dalam 5 Tahun (2021-2025)

8.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT tentunya tidak lepas dari sinergi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dan ORARI Daerah Kepulauan Riau yang secara intens melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat mendapatkan asistensi dan kemudahan informasi terkait pelaksanaan UNAR saat menghubungi loket pelayanan, baik

secara daring maupun luring. Petugas pelayanan Balai Monitor SFR Kelas II Batam juga kooperatif membantu peserta UNAR yang lupa dalam pembuatan akun berupa *username* dan *password*, sehingga memudahkan calon anggota amatir untuk melakukan pendaftaran UNAR. Untuk pelaksanaan Bimtek Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor antara



lain:

1. Koordinasi secara berkelanjutan dengan *Stakeholder* Perikanan setempat, para Pemilik dan Pengurus kapal Perikanan terkait pengurusan Izin Stasiun Radio yang sangat mudah untuk diurus.
2. Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Maritime On The Spot (MOTS) yang dilakukan secara rutin tiap bulannya, dalam kegiatan ini pihak Balai Monitor SFR Kelas II Batam rutin mengunjungi kapal-kapal nelayan dan melakukan tindak lanjut kepada target-target kapal yang berpotensi belum berizin.

8.5 Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja sebelumnya

Walaupun jumlah peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) mengalami penurunan setiap tahunnya, Balai Monitor SFR Kelas II Batam tetap melaksanakan kegiatan UNAR sesuai permintaan dari ORARI Daerah Kepulauan Riau sebagai bentuk komitmen dalam mendukung layanan kepada masyarakat. Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas II Batam terus melakukan sosialisasi terkait penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) sementara bagi peserta yang telah dinyatakan lulus UNAR, serta pentingnya bergabung dalam organisasi guna menghindari pencabutan IAR. Mengingat masih terdapat peserta yang terlambat melakukan pendaftaran ke organisasi sehingga harus mengikuti UNAR kembali pada tahun berikutnya, upaya edukasi kepada peserta akan terus ditingkatkan pada pelaksanaan selanjutnya.

Pelaksanaan sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN di Tanjungpinang merupakan tindak lanjut atas kebutuhan pengurusan ISR bagi nelayan di wilayah Kota Tanjungpinang yang telah mencapai kurang lebih 40 (empat puluh)

ISR. Meskipun peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) tahun ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang karena perbedaan jadwal aktivitas nelayan di darat, Balai Monitor SFR Kelas II Batam tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan menyelenggarakan kegiatan BIMTEK SRC/LRC dan IKRAN pada tahun berikutnya apabila terdapat permintaan kembali dari masyarakat atau pemangku kepentingan terkait.

8.6 Rekomendasi Kedepannya

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam akan meningkatkan sosialisasi pelaksanaan UNAR melalui media sosial resmi serta berkolaborasi dengan ORARI Daerah Kepulauan Riau guna memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan jumlah peserta pada tahun mendatang.

Selain itu, optimalisasi Program Maritime On The Spot (MOTS) akan terus dilaksanakan secara konsisten dengan pendekatan persuasif dan edukatif kepada nelayan. Pelaksanaan Bimtek Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN tetap diintegrasikan dalam kegiatan MOTS guna meningkatkan kepatuhan terhadap kepemilikan ISR dan sertifikasi operator radio maritim.

8.7 Efisiensi

Upaya efisiensi telah dilakukan melalui optimalisasi sumber daya panitia yang tersedia serta perencanaan anggaran pelaksanaan sertifikasi yang lebih cermat dan terukur. Meskipun dilakukan langkah efisiensi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam tetap menjaga kualitas dan standar pelayanan dalam pelaksanaan sertifikasi Operator Radio, baik untuk Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) maupun Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN, sehingga pelayanan kepada

masyarakat tetap berjalan secara optimal dan profesional

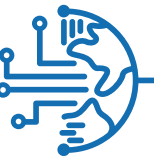
8.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN tidak terlepas dari implementasi budaya BerAKHLAK, yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan
Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh SDM yang terlibat harus berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan prima sehingga mampu memberikan kesan dan testimoni yang baik guna menjaga keberlangsungan UNAR dan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN di masa yang akan datang. Selain itu, panitia juga menerima keluhan dan kritik dari pengguna layanan perizinan sebagai bahan evaluasi.
2. Akuntabel
Panitia dan pengawas ujian melaksanakan tugas secara jujur dan berintegritas sehingga pelaksanaan ujian berjalan dengan tertib dan tidak terjadi kecurangan
3. Kompeten
Panitia dan pengawas ujian memiliki kompetensi, kehandalan, serta pengetahuan mengenai penyelenggaraan UNAR berbasis CAT dan memahami proses perizinan Amatir Radio dan Petugas pelayanan harus memiliki serta terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri dalam berbagai aspek yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik, baik secara teknis, administratif, maupun komunikasi.

3. Harmonis
Petugas pelayanan mampu melayani pemohon izin dengan ramah dan tenang dalam menyampaikan penjelasan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki pemohon izin dan mampu bersinergi dengan ORARI dan RAPI sehingga terwujud tertib perizinan penggunaan frekuensi radio amatir. Dalam memberikan pelayanan, tidak membedakan calon amatir ORARI maupun RAPI.
4. Loyal
Panitia dan pengawas UNAR berpedoman teguh pada tata tertib pelaksanaan UNAR serta berkomitmen mematuhi Pakta Integritas yang telah dibuat dan taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses perizinan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan serta secara rutin melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.
5. Adaptif
Petugas pelayanan tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait peraturan dan alur proses perizinan yang terjadi sewaktu-waktu dan berkontribusi dalam perbaikan pelayanan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi dalam peraturan maupun proses perizinan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah dipahami.
6. Kolaboratif
Menjalin kerja sama yang baik dengan ORARI, RAPI, masyarakat,





serta para pemangku kepentingan guna mewujudkan tertib perizinan penggunaan frekuensi radio amatir dan pelaksanaan UNAR dan Berkoordinasi.

8.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Telah dilakukan *Benchmark* capaian kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas II Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas II Padang pada indikator Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS/IKRAN). Berdasarkan hasil perbandingan, kedua satuan kerja menunjukkan capaian yang sama dengan realisasi masing-masing

sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Kesamaan capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio pada kedua satuan kerja telah terlaksana secara optimal dan sesuai target kinerja yang ditentukan. Hasil *Benchmark* ini menjadi dasar bagi Balai Monitor SFR Kelas II Batam untuk mempertahankan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun berikutnya melalui konsistensi pelaksanaan layanan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi koordinasi dalam penyelenggaraan sertifikasi operator radio secara berkelanjutan.

Tabel 43. Benchmark Capaian Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Persentase %	Keterangan
Persentase (%)	Balmon Batam	100	100	100	Presentase Capaian Balmon Batam dan Balmon Padang sama – sama 100%
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	Balmon Padang	100	100	100	



IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tabel 44. Capaian Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

9.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor penggunaan spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam melaksanakan kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio terhadap wajib bayar yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio.

Penanganan piutang BHP Frekuensi Radio dilakukan melalui kegiatan penyampaian dokumen SPP BHP/ Rincian Tagihan kepada wajib bayar, pemantauan status pembayaran, serta pemberian peringatan secara bertahap.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar terhadap kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, menekan jumlah piutang yang tertunggak, serta mendukung pengelolaan piutang negara yang tertib dan akuntabel. Pelaksanaan penanganan piutang dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun anggaran melalui pemanfaatan sistem *e-licensing* serta berbagai media komunikasi, antara lain surat

elektronik, telepon, aplikasi pesan singkat, dan kunjungan langsung apabila diperlukan.

9.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penyampaian SPP BHP Frekuensi adalah client yang memiliki keterlambatan pembayaran SPP BHP. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penerbitan Surat Teguran (ST) yang dapat mengakibatkan timbulnya piutang, sanksi administratif, maupun sanksi pencabutan izin.

Sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL adalah wajib bayar yang belum dapat melunasi kewajibannya kepada Negara. Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Batam telah melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan piutang dengan KPKNL.

9.3 Capaian target

Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam telah melaksanakan kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio melalui penyampaian dokumen SPP BHP/ Rincian Tagihan dan Surat Tagihan (ST) kepada seluruh wajib bayar yang teridentifikasi memiliki kewajiban pembayaran. Penyampaian dokumen



dilakukan melalui sistem *e-licensing*, surat elektronik, telepon, aplikasi pesan singkat, pengiriman melalui jasa ekspedisi, serta penyampaian langsung kepada wajib bayar.

Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas II Batam juga melaksanakan kegiatan koordinasi

dan pendampingan pelimpahan piutang kepada KPKNL terhadap piutang yang belum dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Seluruh kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan telah dilaksanakan dan dilaporkan secara rutin sesuai dengan periode pelaporan.

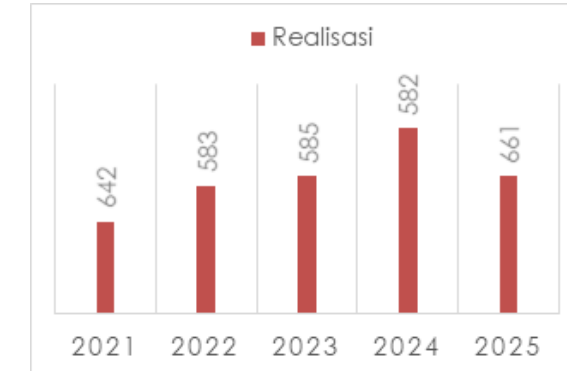
Tabel 45. Penyampaian/Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan Surat Tagihan (ST) Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah SPP dan ST	Target terdistribusi	Realisasi
1.	Januari	43	100%	100%
2.	Februari	49	100%	100%
3.	Maret	36	100%	100%
4.	April	45	100%	100%
5.	Mei	69	100%	100%
6.	Juni	67	100%	100%
7.	Juli	53	100%	100%
8.	Agustus	53	100%	100%
9.	September	47	100%	100%
10.	Oktober	63	100%	100%
11.	November	69	100%	100%
12.	Desember	67	100%	100%
Total		661	100%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Radio pada Tahun 2025 telah tercapai sebesar tersebut, indikator kinerja Persentase (%) 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 46. Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (2021-2025)

No	Tahun	Realisasi terdistribusinya SPP dan ST
1.	2021	642
2.	2022	583
3.	2023	585
4.	2024	582
5.	2025	661



Grafik 29. Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (2021-2025)

9.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

Penanganan piutang BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Melalui indikator ini dapat dilihat sejauh mana Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam mampu melaksanakan upaya pencegahan, penagihan, serta penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio secara optimal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2025, indikator Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh konsistensi pelaksanaan penyampaian dokumen SPP BHP/ Rincian Tagihan kepada wajib bayar, pemantauan pembayaran secara berkala, serta koordinasi pelimpahan piutang kepada KPKNL terhadap piutang yang belum dapat diselesaikan.

Inovasi yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain pemanfaatan sistem perizinan dan penagihan berbasis elektronik

(*e-licensing* dan *e-billing* ISR) yang terintegrasi, sehingga memudahkan wajib bayar dalam mengakses dokumen tagihan dan melakukan pembayaran secara mandiri. Selain itu, penggunaan berbagai kanal komunikasi seperti surat elektronik, telepon, dan aplikasi pesan singkat turut mempercepat penyampaian informasi dan tindak lanjut terhadap wajib bayar.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan piutang antara lain masih adanya wajib bayar yang kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, perubahan data wajib bayar (alamat, kontak, atau penanggung jawab), serta keterbatasan respons dari sebagian wajib bayar. Namun demikian, kendala tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan persuasif dan koordinasi lanjutan sehingga tidak menghambat pencapaian target kinerja.

9.5 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya, seluruh capaian indikator penanganan piutang BHP Frekuensi Radio telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dalam



Perjanjian Kinerja dan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Batam antara lain melalui peningkatan intensitas pemantauan pembayaran BHP Frekuensi Radio, optimalisasi pemanfaatan sistem *e-licensing* dan *e-billing* ISR, serta penguatan koordinasi internal antar tim kerja terkait guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, koordinasi eksternal dengan KPKNL terus ditingkatkan untuk memastikan proses pelimpahan piutang berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib bayar yang ditandai dengan meningkatnya pembayaran sebelum jatuh tempo serta berkurangnya potensi piutang tertunggak. Atas dasar tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Batam akan terus mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun berikutnya guna mendukung optimalisasi penerimaan negara dan tertib administrasi pengelolaan spektrum frekuensi radio.

9.6 Rekomendasi Kedepannya

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain :

1. Memperkuat sistem pemantauan piutang secara berkala untuk mendeteksi potensi keterlambatan pembayaran lebih dini.
2. Mengoptimalkan komunikasi dan edukasi kepada wajib bayar terkait kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio serta konsekuensi keterlambatan pembayaran.

3. Meningkatkan koordinasi dengan KPKNL dalam proses pelimpahan piutang, khususnya untuk piutang yang telah melewati batas waktu penyelesaian sesuai ketentuan.
4. Melakukan pemutakhiran data wajib bayar secara berkala guna memastikan akurasi informasi dan kelancaran proses penagihan.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan

9.7 Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan penyampaian dokumen SPP BHP/Rincian Tagihan serta pemantauan pembayaran didukung oleh sistem perizinan dan penagihan berbasis elektronik yang terintegrasi, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan waktu pelayanan.

Pemanfaatan sistem *e-licensing*, *e-billing* ISR, serta pembayaran Host to Host (H2H) memberikan kemudahan bagi wajib bayar dalam melakukan pembayaran dan bagi Balai Monitor SFR Kelas II Batam dalam memantau realisasi pembayaran secara *real-time*. Hal ini berdampak pada percepatan proses administrasi, peningkatan akurasi data, serta optimalisasi penggunaan anggaran.

9.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio tidak terlepas dari implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK, yakni:

1. Berorientasi Pelayanan.
Melaksanakan penyampaian dokumen SPP BHP/Rincian Tagihan serta memberikan informasi dan pendampingan kepada wajib bayar secara responsif dan jelas guna memastikan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
2. Akuntabel.
Seluruh proses penanganan piutang dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kompeten.
Petugas yang menangani piutang BHP Frekuensi Radio senantiasa meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, mekanisme penagihan, serta pemanfaatan sistem perizinan dan penagihan berbasis elektronik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Harmonis.
Pelaksanaan penanganan piutang didukung oleh kerja sama dan komunikasi yang baik antar pegawai maupun dengan pihak eksternal, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dalam mencapai target kinerja.
5. Loyal
Petugas melaksanakan penanganan piutang dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara serta menjaga kredibilitas institusi.
6. Adaptif
 - a. Memanfaatkan sistem *e-licensing* dan *e-billing* ISR dalam proses pemantauan dan penagihan piutang.
 - b. Menyesuaikan mekanisme komunikasi dengan perkembangan teknologi

informasi guna mempercepat penyampaian informasi kepada wajib bayar dalam pelaksanaan penanganan piutang BHP.

7. Kolaboratif
 - a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan KPKNL dalam proses pelimpahan piutang sesuai ketentuan.
 - b. Membangun komunikasi aktif dengan wajib bayar guna mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran.
 - c. Melakukan pertukaran informasi dan konsultasi apabila terdapat kendala dalam proses penanganan piutang.

9.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

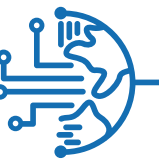
Telah dilakukan *Benchmark* capaian kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas II Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas II Padang pada indikator pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio. Berdasarkan hasil perbandingan, kedua satuan kerja memiliki target kinerja yang sama sebesar 100%, dengan realisasi masing-masing mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio pada kedua satuan kerja telah terlaksana secara optimal sesuai target kinerja yang ditentukan. Hasil *Benchmark* ini menjadi dasar bagi Balai Monitor SFR Kelas II Batam untuk mempertahankan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun berikutnya melalui konsistensi pengawasan pembayaran, optimalisasi koordinasi internal dan eksternal, serta penguatan pengelolaan administrasi penanganan piutang secara berkelanjutan.





Tabel 47. Benchmark Capaian Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	Balmon Batam	100	100	Presentase Capaian
	Balmon Padang	100	100	Balmon Batam dan Balmon Padang sama – sama 100%



IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Tabel 48. Capaian Kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	150%	150%

10.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Batam mempunyai tugas melaksanakan monitoring, pengukuran, validasi, penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Batam juga melaksanakan sosialisasi pelayanan publik secara berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, perundang-undangan dan ketentuan pengelolaan spektrum frekuensi radio.

10.2 Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran kegiatan Sosialisasi layanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Menjangkau khalayak secara luas / secara masif.

2. Masyarakat umum, lebih mengetahui informasi mengenai pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian frekuensi radio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memahami tugas, pokok & fungsi Balai Monitor SFR Kelas II Batam.
3. Beberapa kelompok masyarakat mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh pelayanan publik, baik karena jarak, kendala administratif atau ketidaktahuan mereka terhadap prosedur yang ada.
4. Penggunaan frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran, mengetahui dan memahami proses perizinan penyelenggaraan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sehingga terwujud tertib penggunaan frekuensi radio.

10.3 Capaian target

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025, telah ditetapkan target pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik minimal satu kali kegiatan dengan jumlah Responden sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang dari seluruh layanan.



Adapun metode perhitungan capaian
Perjanjian Kinerja (PK) Sosialisasi

Pelayanan Publik adalah sebagai
berikut :

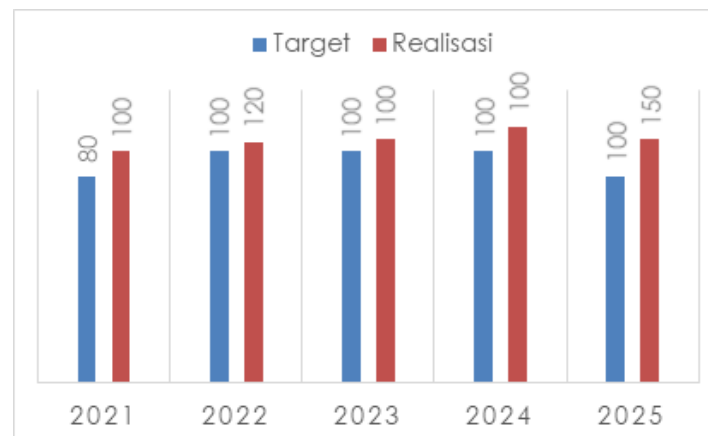
$$((\text{Jumlah Kegiatan}/1) + (\text{Jumlah Peserta minimum 30 orang}/1))/2 \times 100\%$$

Tabel 49. Rekap Sosialisasi Layanan Publik Tahun 2025

Kota	Jumlah Peserta
1. Kabupaten Lingga	50
2. Kota Tanjung Pinang	50

**Tabel 50. Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dalam 5 Tahun
(2021-2025)**

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	80%	100%
2.	2022	100%	120%
3.	2023	100%	100%
4.	2024	100%	100%
5.	2025	100%	150%



Grafik 30. Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dalam 5 Tahun (2021-2025)

10.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Inovasi dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio sangat penting untuk memastikan efektivitas komunikasi dan layanan teknologi informasi. Analisa keberhasilan dalam hal ini dapat dilihat

daripemahamanmasyarakatmengenai tugas pokok dan fungsi instansi yang berwenang dalam pengawasan frekuensi. Dengan diselesaikannya kegiatan sosialisasi, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas, pokok, dan fungsi pengawasan pengendalian



penggunaan spektrum frekuensi radio, proses perizinan frekuensi radio, serta pemanfaatan frekuensi berbahaya dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Batam telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil melampaui target Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi Balai Monitor SFR Kelas II Batam dalam menyebarkan informasi secara masif kepada masyarakat, khususnya pengguna SFR dan APT yang berada di wilayah Kepulauan Riau.

10.5 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Penetapan dan pencapaian target Sosialisasi Pelayanan Publik pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 telah memberikan motivasi kepada Balai Monitor SFR Kelas II Batam untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat dan perangkat telekomunikasi bersertifikat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan terbukti efektif dalam mendukung peningkatan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya, seiring dengan target capaian yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan juga menunjukkan hasil yang efektif dalam mendukung peningkatan perjanjian kinerja serta optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi bersertifikasi di wilayah Kepulauan Riau.

Atas capaian tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Batam akan mempertahankan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik pada tahun berikutnya sebagai upaya berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan di wilayah kerja.

10.6 Rekomendasi Kedepannya

Untuk kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik perlu dipertimbangkan dilaksanakan di Kabupaten Anambas. Kabupaten Anambas salah satu kabupaten yang belum pernah sama sekali dilakukan Sosialisasi Pelayanan Publik penggunaan frekuensi radio dan perizinan frekuensi radio dikarenakan akomodasi ke lokasi sangat jauh dan membutuhkan banyak biaya, sementara untuk tahun ini adanya efisiensi anggaran sehingga sangat sulit untuk melaksanakan Sosialisasi penggunaan frekuensi radio disana.

10.7 Efisiensi

Efisiensi dalam pelayanan publik dapat tercapai melalui sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Sosialisasi pelayanan publik dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas II Batam, juga kebijakan atau regulasi terkait pemanfaatan penggunaan frekuensi. Melalui sosialisasi pelayanan publik, capaian PK mencapai 150% melampaui target yang telah ditetapkan, serta meningkatkan PNPB sebagai hasil pengurusan izin oleh pengguna frekuensi yang sebelumnya belum mengurus perizinan ISR. Hal tersebut merupakan wujud efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Dengan demikian, peningkatan efisiensi publik tidak hanya meningkatkan kualitas



layanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

10.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik, Balai Monitor SFR Kelas II Batam menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan
 - a. Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna frekuensi radio.
 - b. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif terhadap kendala yang dihadapi pemohon izin.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.
2. Akuntabel
 - a. Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggung jawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
 - b. Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
 - c. Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.
3. Kompeten
 - a. Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/kemampuan diri dalam segala hal yang

diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;

- b. Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.
4. Harmonis
Narasumber mampu memberikan materi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan peserta dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.
5. Loyal
Taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses perizinan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan dan secara rutin melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.
6. Adaptif
 - a. Panitia sosialisasi dan petugas tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait peraturan dan alur proses perizinan yang terjadi sewaktu-waktu;
 - b. Berkontribusi dalam perbaikan pelayanan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi dalam peraturan maupun proses perizinan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah dipahami.
7. Kolaboratif
Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak/instansi terkait untuk melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik



10.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Telah dilakukan *Benchmark* capaian kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas II Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas II Padang pada indikator pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil perbandingan, kedua satuan kerja memiliki target kinerja yang sama sebesar 100%, dengan realisasi Balai Monitor SFR Kelas II Batam mencapai 150% dan Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebesar 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik pada Balai Monitor SFR Kelas II Batam telah terlaksana secara optimal dan melebihi target yang ditetapkan. Hasil *Benchmark* ini menjadi dasar bagi Balai Monitor SFR Kelas II Batam untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah melampaui target pada tahun berikutnya, serta terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 51. Benchmark Capaian Kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Persentase %	Keterangan
Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	Balmon Batam	100	150	150	Persentase Capaian Balmon Batam lebih besar dibandingkan Balmon Padang
	Balmon Padang	100	100	100	





**IK-11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey
Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)**

Tabel 52. Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	124%	124%

11.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Selain itu, adanya keterlibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran. Balai Monitor SFR Kelas II Batam secara rutin melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan cara menyebarlink Survei kepada Masyarakat yang sudah pernah merasakan pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Batam. Hasil dari Survei sangat penting dalam perbaikan layanan publik di Balai Monitor SFR Kelas II Batam sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Monitor SFR Kelas II Batam kedepannya.

11.2 Sasaran kegiatan

Sasaran pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam adalah sebagai berikut:

1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Batam secara objektif dan terstruktur.
2. Teridentifikasinya persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, meliputi aspek prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
3. Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemberian masukan, saran, dan penilaian secara langsung.
5. Terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.



6. Mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam sistem dan mekanisme pelayanan di Balai Monitor SFR Kelas II Batam.

11.3 Capaian Target

Capaian target pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) di Balai Monitor SFR Kelas II Batam adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi Responden tercapainya jumlah Responden survei minimal sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 30 Responden.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Tercapainya nilai

IKM minimal 3.4 dari skala 4.

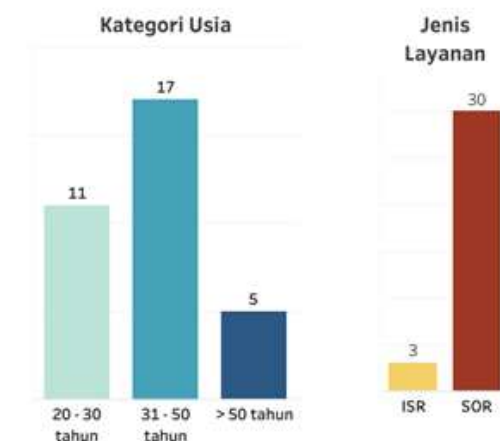
3. Tindak lanjut hasil survei tersusunnya rencana aksi (*action plan*) atas rekomendasi hasil survei dan dilaksanakannya perbaikan pada unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah.
4. Hasil survei dipublikasikan di media sosial Balai Monitor SFR Kelas II Batam kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

Adapun cara menghitung PK Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Adalah sebagai berikut:

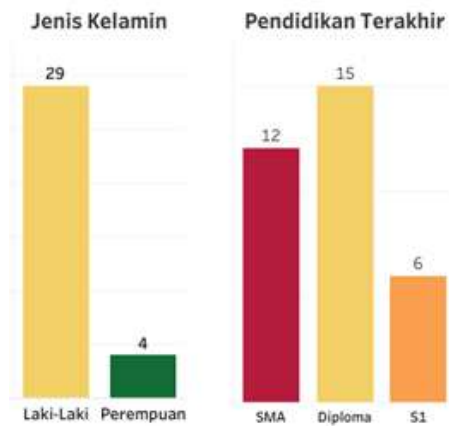
$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Hasil Survey IKM/IPKP}}{3,2} \times 100\%$$

IKM 3.96 IPKP 3.96

IKM	Biaya/tarif	3.94
	Kompetensi Pelaksana	3.97
	Penanganan Pengaduan, Saran dan M..	3.97
	Perilaku Pelaksana	3.97
	Persyaratan	3.94
	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.97
	Sarana dan Prasarana	3.97
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.97
	Waktu Penyelesaian	3.97



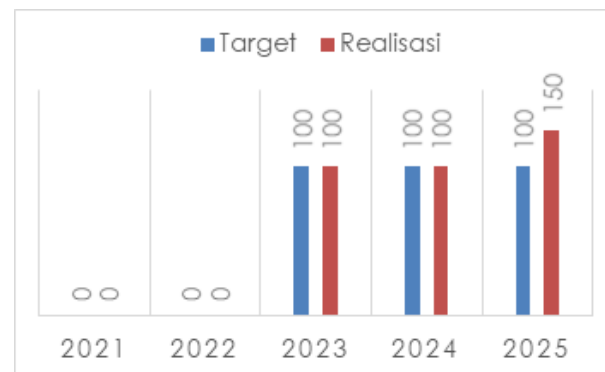
Grafik 31. Hasil Survei IKM/IPKP Berdasarkan Usia dan Jenis Layanan



Grafik 32. Hasil Survei IKM/IPKP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

Tabel 53. Capaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dalam 5 Tahun (2021–2025)

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	-	-
2.	2022	-	-
3.	2023	100%	100%
4.	2024	100%	100%
5.	2025	100%	124%



Grafik 33. Capaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dalam 5 Tahun (2021–2025)



11.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Pelaksanaan Survei IKM dan IPKP di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dilakukan secara digital melalui penyebaran tautan survei dan QR Code kepada pengguna layanan setelah pelayanan selesai. Instrumen survei disusun secara ringkas dan mudah dipahami serta dilakukan monitoring berkala untuk memastikan hasil survei dapat segera ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan layanan. Keberhasilan survei ditunjukkan oleh tercapainya target jumlah Responden dan nilai IKM/IPKP dalam kategori baik atau meningkat dibanding periode sebelumnya. Selain itu, hasil survei telah ditindaklanjuti melalui evaluasi internal dan perbaikan pada unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

Ketidaktercapaian target umumnya disebabkan oleh rendahnya partisipasi Responden, kendala teknis dalam pengisian survei daring, serta masih adanya unsur pelayanan yang dinilai belum optimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan strategi sosialisasi survei kedepan.

11.5 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Laporan kinerja periode sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja Balai Monitor SFR Kelas II Batam, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Hasil evaluasi dan rekomendasi yang terdapat pada laporan sebelumnya ditindaklanjuti melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan, peningkatan

kompetensi petugas, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, serta perbaikan pelaksanaan survei IKM dan IPKP. Selain itu, capaian dan kendala yang teridentifikasi dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi dan penetapan target kinerja periode berjalan guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat. Atas dasar tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Batam akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang prima dan berkelanjutan.

11.6 Rekomendasi Kedepannya

Adapun rekomendasi kedepannya dalam pelaksanaan Survei IKM dan IPKP adalah dengan cara :

1. Menyempurnakan instrumen survei agar lebih sederhana, relevan, dan mudah dipahami Responden.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk integrasi survei dengan sistem pelayanan.
3. Melaksanakan Survei dengan cara mengunjungi beberapa Masyarakat yang sudah pernah merasakan layanan Balai Monitor SFR Kelas II Batam.

11.7 Efisiensi

Pelaksanaan Survei IKM dan IPKP di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara otomatis melalui sistem daring, sehingga mempercepat rekapitulasi hasil dan meminimalisir kesalahan input data. Selain itu, survei dilaksanakan bersamaan dengan proses pelayanan yang sedang berjalan, sehingga tidak memerlukan tambahan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dengan



metode ini, kegiatan survei menjadi lebih efektif, hemat biaya, dan tepat sasaran.

11.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan kegiatan Survei Pelayanan Publik IKM dan IPKP, Balai Monitor SFR Kelas II Batam menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan
Balai Monitor SFR Kelas II Batam dalam menyusun survei yang fokus pada kepuasan masyarakat dan kebutuhan pengguna layanan.
2. Akuntabel
Data survei dicatat dan dianalisis secara transparan, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kompeten
Petugas yang menangani survei memiliki kemampuan dan pemahaman terkait instrumen dan prosedur pelayanan.
4. Harmonis
Mendorong komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat dalam pengumpulan masukan.
5. Loyal
Pelaksanaan survei dilakukan konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 54. Benchmark Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Persentase %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	Balmon Batam	100	124	124	Capaian Balmon Batam lebih besar dibandingkan Balmon Batam
	Balmon Padang	100	119.38	119.38	

6. Adaptif
Instrumen survei dan metode pengumpulan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
7. Kolaboratif
Melibatkan seluruh tim Balmon dalam pemantauan, analisis, dan tindak lanjut hasil survei.

Implementasi nilai BerAKHLAK ini diharapkan meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat, integritas pelaksanaan survei, dan efektivitas tindak lanjut perbaikan layanan.

11.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Batam dan Balmon Padang. Berdasarkan hasil evaluasi, kedua satuan kerja memiliki target kinerja yang sama, yaitu sebesar 3.2 Skala 4. Realisasi Survei IKM dan IPKP Balmon Batam adalah 3.96 (Capaian 124%) dan Balmon Padang 3.82 (Capaian 119.38%). Hasil perbandingan ini menjadi dasar dalam mempertahankan kinerja yang telah melampaui target, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan optimalisasi capaian kinerja pada periode berikutnya.



IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Tabel 55. Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	109%	109%

12.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kepuasan masyarakat, tetapi juga dari tingkat integritas penyelenggara layanan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam berkomitmen untuk menyediakan layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) menjadi instrumen penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas, profesionalisme, dan kepatuhan petugas dalam memberikan layanan, serta sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

12.2 Sasaran kegiatan

Adapun sasaran kegiatan pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) adalah untuk mengukur tingkat persepsi pengguna layanan terhadap integritas petugas pelayanan di Balai Monitor SFR Kelas II Batam. Selain itu untuk mengidentifikasi potensi risiko praktik penyimpangan (gratifikasi, diskriminasi, maladministrasi) dan menilai transparansi, akuntabilitas,

dan kepatuhan terhadap standar pelayanan.

12.3 Capaian Target

Capaian target pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) di Balai Monitor SFR Kelas II Batam adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi survei telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dengan jumlah responden mencapai minimal 30 orang sesuai target yang direncanakan.
2. Nilai Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dengan capaian nilai IIPP/IPAK minimal sebesar 3,6 dari skala 4.
3. Tindak Lanjut Hasil Survei telah meningkatkan pengawasan internal pada area yang masih memiliki skor relatif lebih rendah dan mempertahankan standar pelayanan
5. Publikasi hasil survei telah dilaksanakan melalui media sosial Balai Monitor SFR Kelas II Batam sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam



penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapun cara menghitung PK Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) Adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Hasil Survey IIPP/IPAK}}{3,6} \times 100\%$$

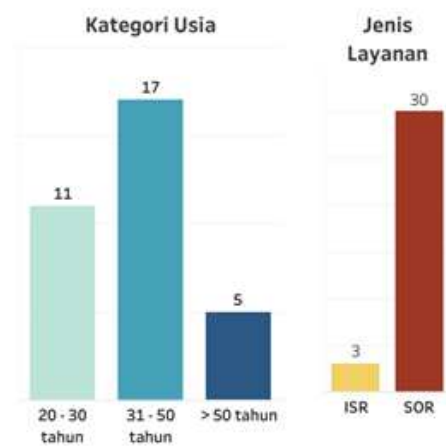
IIPP

3.92

IPAK

3.92

IIPP	Diskriminasi Pelayanan	3.90
	Pelayanan Di Luar Prosedur	3.94
	Penerimaan Imbalan	3.92
	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.92
	Pungutan Liar (Pungli)	3.92



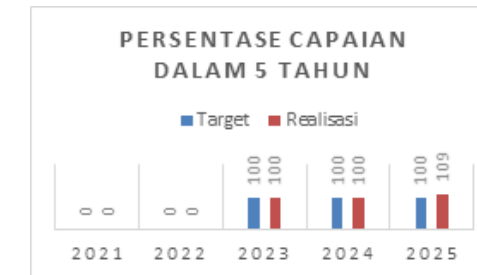
Grafik 34. Hasil Survei IIPP/IPAK Berdasarkan Usia dan Jenis Layanan



Grafik 35. Hasil Survei IIPP/IPAK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

Tabel 56. Capaian Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dalam 5 Tahun (2021-2025)

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	-	-
2.	2022	-	-
3.	2023	100%	100%
4.	2024	100%	100%
5.	2025	100%	109%



Grafik 36. Capaian Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dalam 5 Tahun (2021-2025)

12.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dilaksanakan secara digital melalui penyebaran tautan survei dan QR Code kepada pengguna layanan setelah proses pelayanan selesai. Instrumen survei dirancang secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami guna mendorong partisipasi responden. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan hasil survei dapat segera dianalisis dan ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan layanan.

Keberhasilan pelaksanaan survei ditunjukkan dengan terpenuhinya target jumlah responden serta tercapainya nilai indeks dalam kategori baik atau mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hasil survei juga telah ditindaklanjuti melalui evaluasi internal dan penyempurnaan pada unsur pelayanan yang masih memerlukan peningkatan.

Adapun kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target antara lain rendahnya tingkat partisipasi responden, kendala teknis dalam pengisian survei secara daring, serta masih terdapat aspek pelayanan yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi sosialisasi survei dan meningkatkan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya.

12.5 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Laporan kinerja periode sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja Balai Monitor SFR Kelas II Batam, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK). Hasil evaluasi dan rekomendasi pada laporan sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan, peningkatan kompetensi



petugas, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, serta perbaikan sistem pelaksanaan Survei IIPP/IPAK. Selain itu, capaian dan kendala yang teridentifikasi dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi dan penetapan target kinerja periode berjalan guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta kepuasan masyarakat. Atas dasar tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Batam akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang berintegritas, transparan, dan berkelanjutan.

12.6 Rekomendasi Kedepannya

Adapun rekomendasi ke depan dalam pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) antara lain dilakukan melalui penyempurnaan instrumen survei agar lebih sederhana, relevan, dan mudah dipahami oleh responden. Selain itu, perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi dengan mengintegrasikan pelaksanaan survei ke dalam sistem pelayanan guna meningkatkan efektivitas dan kemudahan pengisian.

Di samping metode daring, pelaksanaan survei juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi masyarakat atau pengguna layanan yang telah menerima layanan Balai Monitor SFR Kelas II Batam, sehingga partisipasi responden dapat meningkat dan hasil survei menjadi lebih representatif.

12.7 Efisiensi

Pelaksanaan Survei Indeks Integritas

Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) di Balai Monitor SFR Kelas II Batam dilaksanakan melalui mekanisme pengumpulan dan pengolahan data secara otomatis berbasis sistem daring, sehingga proses rekapitulasi hasil dapat dilakukan dengan lebih cepat serta meminimalkan potensi kesalahan input data.

Survei ini juga diintegrasikan dengan proses pelayanan yang sedang berlangsung, sehingga tidak memerlukan tambahan waktu maupun sumber daya yang signifikan. Melalui metode tersebut, pelaksanaan survei menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

12.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK), Balai Monitor SFR Kelas II Batam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan
Petugas pelayanan memberikan layanan yang responsif dan berfokus pada kepuasan terhadap masyarakat.
2. Akuntabel
Dalam pelaksanaan Survei pelayanan publik IIPP dan IPAK, Balai Monitor SFR Kelas II Batam menjamin transparansi, pencatatan, dan pertanggungjawaban setiap proses pelayanan.
3. Kompeten
Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat maka petugas pelayanan berusaha meningkatkan kemampuan dan profesionalisme

petugas melalui pelatihan dan pembinaan.

4. Harmonis
Dalam melaksanakan Survei di Balai Monitor SFR Kelas II Batam berusaha mendorong kerja sama yang baik antara petugas dan masyarakat.
5. Loyal
Semua petugas pelayanan berusaha konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai standar pelayanan.
6. Adaptif
Menyesuaikan metode pelayanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
7. Kolaboratif
Melibatkan seluruh unit dan pemangku kepentingan dalam perbaikan layanan dan pengambilan keputusan.

Implementasi nilai BerAKHLAK ini mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Balai Monitor SFR Kelas II Batam.

12.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Telah dilakukan *Benchmark* capaian kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas II Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas II Padang pada indikator pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK). Berdasarkan hasil perbandingan, kedua satuan kerja memiliki target kinerja yang sama sebesar 3,6 skala 4, dengan realisasi Balai Monitor SFR Kelas II Batam sebesar 3,92 dan Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebesar 3,73. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Survei IIPP dan IPAK pada Balai Monitor SFR Kelas II Batam telah terlaksana secara optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil *Benchmark* ini menjadi dasar bagi Balai Monitor SFR Kelas II Batam untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah melampaui target pada tahun berikutnya, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung terciptanya pelayanan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 57. Benchmark Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Persentase %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	Balmon Batam	100	109	109	Capaian Balmon Batam lebih besar dibandingkan Balmon Batam
	Balmon Padang	100	103.61	103.61	



IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Tabel 58. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%

13.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

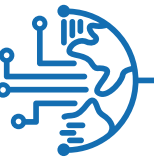
Pembenahan data koordinat stasiun radio *Microwave Link* merupakan kegiatan penyesuaian dan koreksi terhadap data koordinat lokasi stasiun yang tercantum dalam dokumen perizinan, apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi aktual di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses verifikasi dan validasi data berdasarkan hasil pengukuran serta pengecekan langsung di lokasi stasiun.

Tujuan dari pembenahan data koordinat ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh data koordinat yang tercantum dalam perizinan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga pada proses analisis teknis (*technical analysis*, TA) dapat diperoleh data yang akurat, valid, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Dasar dari pembenahan data koordinat ini adalah penugasan dalam Perjanjian Kinerja dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital sesuai Nota Dinas Nomor 431/DJID.4/PR.04.07/03/2025 tanggal 04 Maret 2025. Direktorat Layanan Infrastruktur Digital melaksanakan program pembenahan data koordinat ini melalui pembuatan *Master Data Reference Site* (MDRS) yang mengkodekan 1 (satu) tower dengan kode unik tertentu sehingga tidak ada duplikasi penamaan tower telekomunikasi.

13.2 Sasaran Kegiatan

Pembenahan data koordinat ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dengan sasaran kegiatan mengikuti mekanisme sebagai berikut :



Tabel 59. Mekanisme Perhitungan Capaian Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Uraian Pekerjaan	Target	Mekanisme Perhitungan Capaian
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	Site ISR Microwave Link yang diverifikasi telah ditindaklanjuti: 100%	a. UPT melakukan evaluasi hasil verifikasi <i>site ISR Microwave Link</i> yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. b. "Jumlah <i>site ISR</i> yang tidak sesuai" adalah jumlah <i>site</i> hasil verifikasi UPT yang tidak sesuai dengan data ISR. Verifikasi ISR dapat merujuk pada hasil kegiatan pemeriksaan, pengukuran atau evaluasi ISR yang dilaksanakan oleh UPT. c. "Jumlah <i>site ISR</i> tidak sesuai yang telah ditindak lanjuti" adalah "Jumlah <i>site ISR</i> yang tidak sesuai" hasil verifikasi UPT telah ditindaklanjuti oleh Pemegang ISR, melalui perubahan data ISR atau penghentian ISR. d. Direktorat Layanan Infrastruktur Digital melaksanakan layanan perizinan sebagai tindak lanjut perbaikan data ISR. e. UPT melaporkan hasil verifikasi <i>site ISR</i> dan tindak lanjutnya per Triwulan. Dalam hal pemegang ISR belum menindaklanjuti hasil verifikasi UPT, maka UPT tetap dianggap memenuhi indikator kinerja dengan ketentuan menyampaikan laporan hasil evaluasi per Triwulan.

Rumusan perhitungan capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ PrimaAksi} = \frac{\text{Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindalanjuti}}{\text{Jumlah site ISR yang tidak sesuai}} \times 100\%$$

13.3 Capaian Target

Kegiatan pembenahan data koordinat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam meliputi dua periode waktu berikut yaitu Semester I merupakan pembenahan data koordinat dari data yang dipetakan melalui analisis dekstop dan sisa data pembenahan data koordinat yang belum selesai pada tahun 2024. Sementara itu untuk periode semester II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam menggunakan data dari aplikasi MySpectra Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dengan memetakan stasiun-stasiun radio yang belum tertaut pada MDRS. Secara keseluruhan capaian pembenahan data koordinat telah dilaksanakan sebanyak 100% dengan data capaian pembenahan koordinat sebagai berikut :

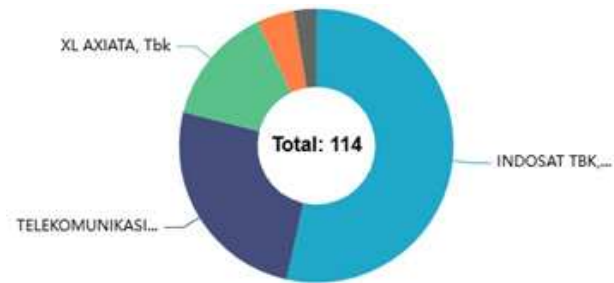
Tabel 60. Capaian Pembenahan Data Koordinat

Periode	Target	Site ISR yang tidak sesuai (target)	Site ISR yang telah ditindaklanjuti (realisasi)	% Realisasi	% Capaian	Keterangan
TW-1	100%	0	0	100%	100%	Persiapan dan analisis target
TW-2	100%	114	114	100%	100%	Microwave Link
TW-2	100%	18	18	100%	100%	Broadcast
TW-3	100%	1397	1397	100%	100%	Microwave Link
TW-4	100%	1342	1342	100%	0%	Microwave Link
TOTAL	100%	2871	2871	100%	100%	



Data laporan pembenahan data koordinat secara detil adalah sebagai berikut :

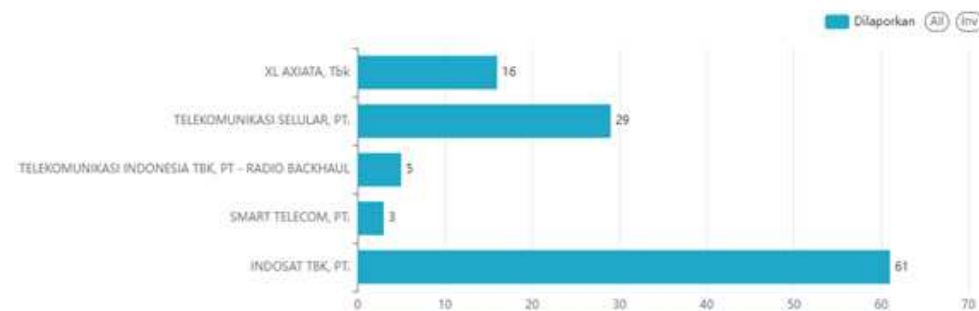
1. Data Pembenahan Koordinat Semester I



Grafik 37. Data Pembenahan Koordinat Semester I

Berdasarkan data pembenahan koordinat Semester I per operator seluler, total *site* yang dilaporkan berjumlah 114 *site*, dengan rincian sebagai berikut: Indosat Tbk : 61 *site* atau sebesar 53,51% dari total *site* yang dilaporkan, Telekomunikasi Selular (Telkomsel) : 29 *site* atau sebesar 25,44% dari total *site* yang dilaporkan, XL Axiata Tbk : 16 *site* atau sebesar 14,03% dari total

site yang dilaporkan, Telekomunikasi Indonesia Tbk – Radio Backhaul : 5 *site* atau sebesar 4,39% dari total *site* yang dilaporkan, Smart Telecom : 3 *site* atau sebesar 2,63% dari total *site* yang dilaporkan. Indosat Tbk menjadi kontributor terbesar pembenahan koordinat SEM I, yaitu lebih dari 50% total laporan.



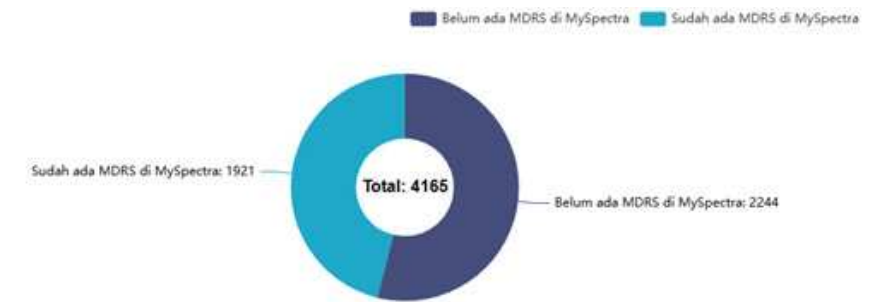
Grafik 38. Data Pembenahan Koordinat yang Telah Dilaporkan

PT. Indosat Tbk memiliki data ISR yang perlu dilakukan pembenahan yaitu sebanyak 61 data, PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan 29 data, PT. XL Axiata, Tbk dengan 16 data, Telekomunikasi Indonesia (Radio Backhaul) dan PT. Smart Telecom masing-masing 5 dan 3 data.

Seluruh proses pembenahan data koordinat selama semester I ini telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada direktorat layanan infrastruktur digital untuk ditindaklanjuti oleh setiap operator seluler dalam pembenahan data koordinatnya.



2. Data Pembenahan Data Koordinat Semester II

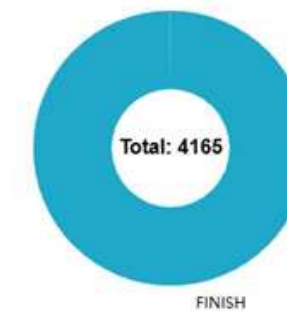


Grafik 39. Data Pembenahan Koordinat Semester II

Terdapat total 4.165 data ISR *Microwave Link*, sebagian besar data tersebut belum melekat atau memiliki MDRS. Secara spesifik, sebanyak 2.244 data (54%) tercatat belum melekat ke suatu MDRS di aplikasi Myspectra (aplikasi database perizinan), sementara 1.921

data (46%) sudah memiliki MDRS. Hal ini menunjukkan bahwa proses penggunaan MDRS ke MySpectra masih berjalan dan hampir mencapai setengah dari target keseluruhan.

3. Progres Pembenahan Data Koordinat MDRS



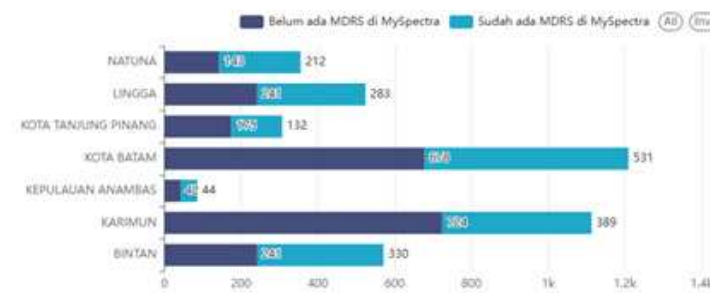
Grafik 40. Data Pembenahan Koordinat MDRS

Dari total 2.244 data ISR yang belum melekat pada MDRS tertentu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam telah melaksanakan proses pembenahan dengan memetakan stasiun-stasiun radio *Microwave Link* untuk merujuk pada MDRS tertentu

sesuai lokasi aktualnya. Sementara itu untuk stasiun radio *Microwave Link* yang belum memiliki rujukan MDRS, maka penyelenggara jaringan komunikasi *Microwave Link* harus membuat MDRS baru.



4. Status MDRS Setiap Kabupaten/Kota



Grafik 41. Data Pembinaan Koordinat MDRS Kabupaten/Kota

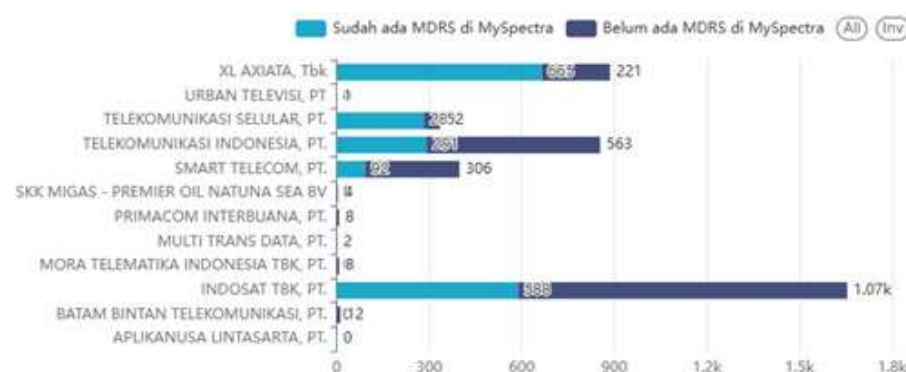
Tabel 61. Data Pembinaan Koordinat MDRS Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Belum ada MDRS	Sudah ada MDRS	Total
1	Batam	678	531	1209
2	Bintan	241	330	571
3	Karimun	724	389	1113
4	Kepulauan Anambas	42	44	86
5	Lingga	241	283	524
6	Natuna	143	212	355
7	Tanjung Pinang	175	132	307

Karimun memiliki total data terbanyak (1.113 data), Kota Batam (1.209 data) dengan rincian mayoritas data sudah dipetakan ke MDRS tertentu dan yang belum memiliki rujukan MDRS agar melakukan pembuatan MDRS baru. Semua data yang belum memiliki MDRS untuk setiap

kabupaten/kota sudah dipetakan ke MDRS tertentu dan dilaporkan ke Direktorat Layanan Infrastruktur Digital serta penyelenggara sistem telekomunikasi *Microwave Link*.

5. Status MDRS Setiap Pengguna Sistem Komunikasi *Microwave Link*



Grafik 42. Status MDRS Pengguna Sistem Komunikasi *Microwave Link*

PT. Indosat TBK (588 sudah ada, 1.070 belum ada), sedangkan XL AXIATA, Tbk (665 sudah ada, 221 belum ada). Telekomunikasi Selular, PT (285 sudah ada, 2 belum ada), Telekomunikasi Indonesia, PT (291 sudah ada, 563 belum ada) dan Smart Telecom, PT (92 sudah ada, 306 belum ada) yang masih memiliki banyak data yang belum terinput. Sementara itu, Batam Bintan Telekomunikasi, PT (1 sudah ada, 12 belum ada), Primacom Interbuana, PT (0 sudah ada, 8 belum ada), Mora Telematika Indonesia Tbk, PT (0 sudah ada, 8 belum ada), SKK Migas - Premier Oil Natuna Sea BV (0 sudah ada, 4 belum ada), Multi Trans Data, PT (0 sudah ada, 2 belum ada), Urban Televisi, PT (1 sudah ada, 0 belum ada), dan Aplikanusa Lintasarta, PT yang belum memiliki data sama sekali (0 sudah ada, 0 belum ada).

13.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Keterbatasan anggaran yang tersedia karena adanya efisiensi penggunaan anggaran dapat disiasati dengan melakukan *desktop analysis* terkait posisi atau koordinat dari suatu stasiun radio. Disamping itu salah satu operator seluler yaitu PT. Telekomunikasi Seluler memiliki fasilitas GPS internal yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui data aktual suatu stasiun radio.

13.5 Faktor kendala/hambatan pada pencapaian target pembinaan koordinat

Beberapa faktor kendala dalam pembinaan data koordinat adalah sebagai berikut :

1. Terdapat stasiun radio yang sudah tidak aktif sementara masih terdaftar memiliki ISR sehingga saat pengecekan di lapangan tidak ditemukan data penggunaan;

2. Saat melakukan *desktop analysis* tidak ditemukan penampakan infrastruktur tower telekomunikasi dalam aplikasi Google Earth atau Google Maps;
3. Jumlah request (permintaan) update/modifikasi dalam sehari untuk setiap operator penyelenggara sistem komunikasi *Microwave Link* terbatas.

13.6 Dampak Kegiatan

Dengan kegiatan pembinaan data koordinat maka akan memberikan *outcome* berupa efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Efisiensi ini dapat terjadi karena data yang bersih (clean data).

13.7 Tindak Lanjut

Data pembinaan koordinat stasiun radio *Microwave Link* yang telah dipetakan ke suatu MDRS tertentu dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara jaringan komunikasi *Microwave Link* untuk dilakukan modifikasi perizinan melalui MySpectra.

13.8 Rekomendasi Perbaikan

Perbaikan kedepannya adalah koordinasi yang lebih intens dengan penyelenggara jaringan komunikasi *Microwave Link* tidak hanya untuk penyediaan backbone seluler namun juga untuk layanan lainnya.





SASARAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara instrumental dinyatakan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang salah satunya terfokus pada reformasi birokrasi dan tata kelola.

IK-1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025

Tabel 62. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	86.95	86.19	99.13%

1.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA juga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring (OM)*-SPAN yang dijadikan ukuran dan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital juga dituntut untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien di dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi yang diemban, yang dibuktikan dengan Nilai Kinerja Anggaran yang dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, sebagai berikut :

mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

1.2 Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran kegiatan ini adalah untuk mencapai dan mendapatkan nilai kinerja anggaran yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yaitu dengan target sebesar 86.95, namun didalam pelaksanaannya capaian target kinerja anggaran tahun 2025 ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam mendapat realisasi



Capaian Kinerja Anggaran sebesar 86.19 dari target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan

1.3 Capaian target

Didalam melaksanakan dan mencapai indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien selama 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 63. Capaian Target Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas II Batam

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	86	95.68	86.95	89.97	87	90.66	90.66	91.99	86.95	86.19

Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek Konteks. Nilai Kinerja Anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel sebagai berikut:

1. Capaian *Output*
2. Efisiensi
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
4. Penyerapan Anggaran



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER																
NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek
1	12Desember	137	059	694708	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,97 15 14,25	97,49	91,75 20 18,35	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	95,88	100,00 25 25,00	100,00
														77,60	80,00%	0,00
																96,99

Gambar 24. Nilai Capaian IKPA pada Aplikasi MONEVPA

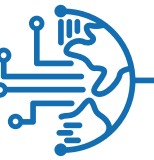
No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	059.09.694708	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM	75,00	96,99	86,00

Gambar 25. Nilai Capaian Kinerja pada Aplikasi e-monev SMART

- a. Perencanaan dan Program Tahun Anggaran 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam mendapatkan anggaran sebesar Rp 14.120.101.000 yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian program kerja sebagai berikut :

Tabel 64. Rincian Program Kerja Balai Monitor SFR Kelas II Batam

No	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1.	U35	Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan Riau	24 Layanan	Rp. 164,472,000
	U37	Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan Riau	5 Layanan	Rp. 273,440,000
	U38	Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut / Sungai Wilayah Kepulauan Riau	28 Layanan	Rp. 726,264,000
	U41	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan Riau	2 Layanan	Rp. 52,136,000
	U44	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut / Sungai Wilayah Kepulauan Riau	3 Layanan	Rp. 174,810,000
2.	078	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT, terdiri dari :	1 Layanan	Rp. 5,876,583,000,-
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp. 648,000,000,-
		2. Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi		Rp. 2,696,964,000,-
		3. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran		Rp. 549,260,000,-
		4. Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan		Rp. 1,982,359,000,-
3.	CAN.101	Perangkat Monitoring UPT	4 Unit	Rp. 192,500,000
4.	CCL.101	Pemeliharaan Alat Monitoring UPT	1 Unit	Rp. 121,000,000
5.	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	Rp. 160,200,000
6.	994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	Rp. 6,185,481,000
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp. 2,954,644,000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp. 3,230,837,000,-
7.	951	Layanan Sarana Internal	7 Unit	Rp. 192,000,000,-
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT		Rp. 192,000,000,-



- b. Pelaksanaan Anggaran
Pagu Anggaran awal tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sesuai DIPA No. SP DIPA-059.03.2.653970/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar

Rp14.120.101.000,- yang terdiri dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni Sebesar Rp 5.335.133.000,- dan PNBP sebesar Rp 8.784.968.000,- dengan komposisi belanja sebagai berikut :

Tabel 65. Komposisi Belanja Balai Monitor SFR Kelas II Batam

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)
1	Pegawai	2.954.644.000	
2	Barang	10.780.957.000	2.222.439.000
3	Modal	384.500.000	

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Komdigi Nomor 1861/SJ/KU.01.01/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 hal Mekanisme Percepatan Usulan Revisi Restrukturisasi Organisasi Kemenkomdigi TA 2025, sehingga terjadi pergantian kode Satuan Kerja (Satker) pada seluruh satuan kerja di Kemenkomdigi. Hal ini menyebabkan perubahan kode Satker pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dari kode Satker 653970 menjadi 694708. Oleh karena itu, pembahasan mengenai anggaran pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dibagi menjadi 2 dengan kode satker lama yaitu

653970 dan kode satker baru yaitu 694708.

- 1) Kode Satuan Kerja Lama (653970)
Pagu Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam TA 2025 awal pada kode Satker 653970 sesuai DIPA No. SP DIPA-059.03.2.653970/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp14.120.101.000,- yang terdiri dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni Sebesar Rp5.335.133.000,- dan PNBP sebesar Rp8.784.968.000,-. dengan komposisi belanja awal sebagai berikut :

Tabel 66. Komposisi Belanja Awal DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)
1	Pegawai	2.954.644.000	
2	Barang	10.780.957.000	2.222.439.000
3	Modal	384.500.000	



Dalam pelaksanaan anggarannya, DIPA tahun 2025 ini mengalami revisi sebanyak

7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 67. Revisi DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)

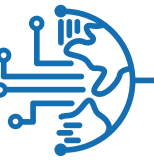
No	Pagu Anggaran (Rp)	Tanggal Revisi DIPA	Keterangan Revisi
1	14.120.101.000	05-Feb-25	hal 3 DIPA TW I
2	13.981.861.000	22-Feb-25	Revisi DJA sesuai Nota Dinas Sesdit Infadigi Nomor 247/DJID.1/PR.01.02/02/2025 perihal Penyampaian Efisiensi Anggaran DIPA Ditjen Infrastruktur
3	13.981.861.000	7 maret 2025	Pemuktahiran KPA
4	13.981.861.000	15-Apr-25	Hal 3 DIPA TW II
5	13.981.861.000	15 Mei 2025	Pemuktahiran KPA
6	13.981.861.000	19 Mei 2025	Pemuktahiran KPA (pergeseran Antar Belanja Pegawai)
7	4.955.599.000	8 Juli 2025	Revisi DJA : penyesuaian sisa anggaran untuk SOTK Baru Sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Komdigi No: Nomor: 1861/SJ/KU.01.01/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 hal Mekanisme Percepatan Usulan Revisi Restrukturisasi Organisasi Kemenkomdigi TA 2025

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Kemenkomdigi Nomor 247/DJID.1/PR.01.02/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Penyampaian Efisiensi Anggaran DIPA Ditjen Infrastruktur Digital TA. 2025, Balmon Kelas

II Batam mendapatkan tambahan efisiensi anggaran berupa blokir anggaran sebesar Rp1.532.405.05.000, sehingga total blokir sebesar Rp3.754.844.000,-dengan rincian komposisi belanja menjadi sebagai berikut :

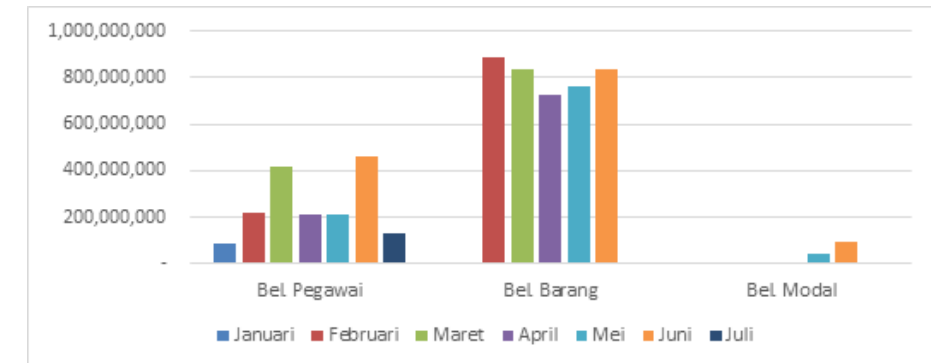
Tabel 68. Komposisi Belanja Akhir DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)
1	Pegawai	2.954.644.000	
2	Barang	10.780.957.000	3.647.184.000
3	Modal	246.260.000	107.660.000

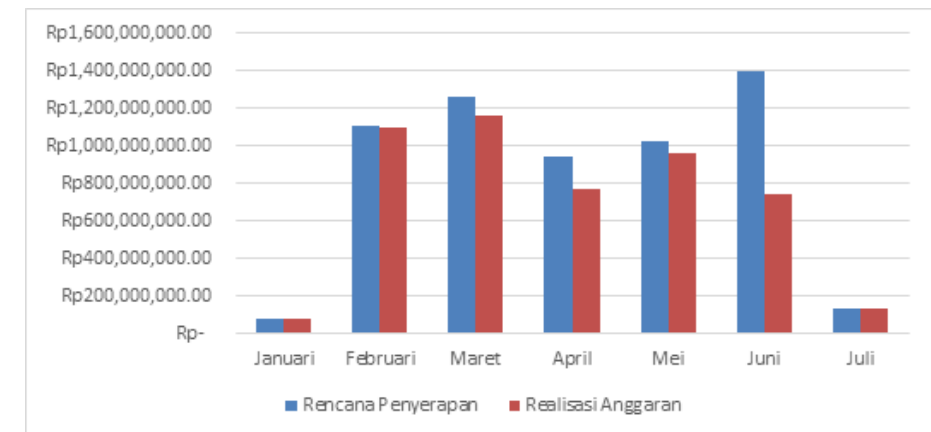


Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (*disbursement plan*) tahun 2025

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 43. Rencana Penyerapan Anggaran DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970) Tahun 2025



Grafik 44. Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970) TA. 2025

Berdasarkan grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan di atas dapat diketahui ada beberapa bulan dengan rencana dan realisasi dengan nilai yang sama serta ada beberapa bulan antara rencana dan realisasi anggaran yang mempunyai deviasi yang cukup tinggi.

Rencana dan realisasi anggaran untuk kode satker lama (653970) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas II Batam untuk tahun 2025 hanya sampai bulan Juli saja dikarenakan pada bulan Juli 2025 sudah terbit DIPA dengan kode satker baru.

- 2) Kode Satuan Kerja Baru (694708) Pagu Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam TA 2025 pada kode Satker 694708 sesuai DIPA No. SP DIPA-059.09.2.694708/2025 tanggal 08 Juli 2025 sebesar Rp9.026.262.000,- yang terdiri dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni Sebesar



Rp2.261.792.000,- dan PNPB
sebesar Rp6.764.470.000.-.

dengan komposisi belanja awal
sebagai berikut :

Tabel 69. Komposisi Belanja Awal DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708)

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)
1	Pegawai	1.047.011.000	
2	Barang	7.7770.991.000	3.647.184.000
3	Modal	208.260.000	107.660.000

Dalam pelaksanaan anggaran-
nya, DIPA tahun 2025 ini
mengalami revisi sebanyak 8

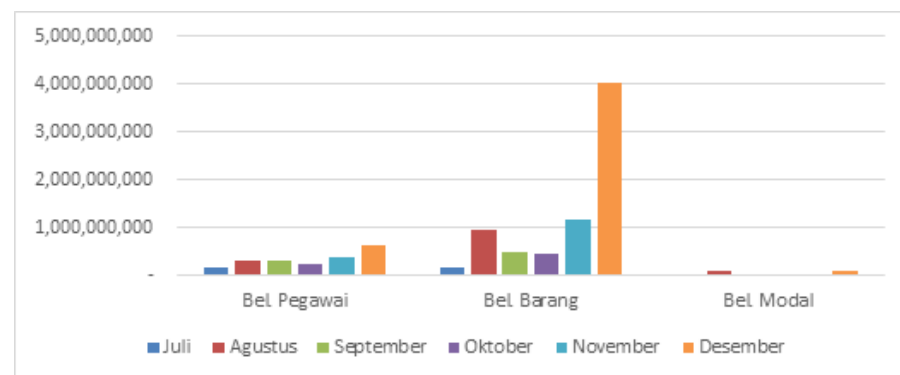
(delapan) kali dengan rincian
sebagai berikut :

Tabel 70. Revisi DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708)

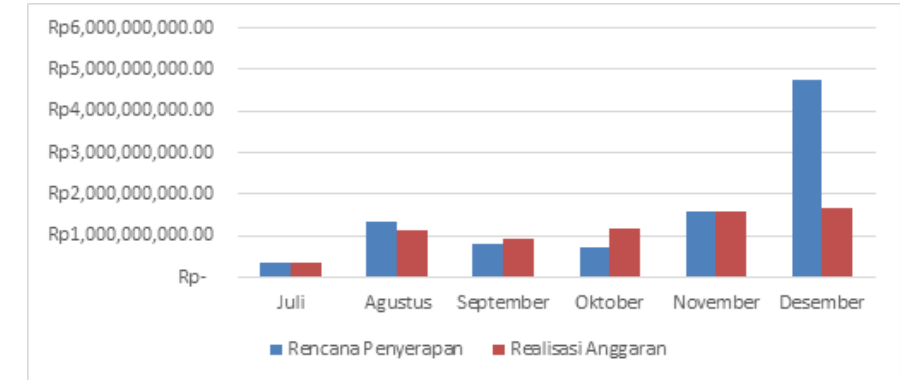
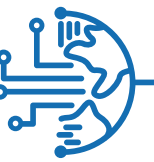
No	Pagu Anggaran (Rp)	Tanggal Revisi DIPA	Keterangan Revisi
1	9.026.262.000	13 Juli 2025	Hal 3 DIPA TW 3
2	9.026.262.000	14 Agustus 2025	Pemuktahiran KPA
3	9.026.262.000	01 Oktober 2025	Hal 3 DIPA TW 4
4	9.965.320.000	28 Oktober 2025	Revisi DJA : Penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp939.058.000
5	9.965.320.000	29 Oktober 2025	Pemuktahiran KPA
6	8.363.127.000	20 November 2025	Revisi DJA : Relaksasi Rp 677.575.000 dan Realokasi Rp1.602.193.000 sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi Nomor 2937/ DJID.1/KU.01.02/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 hal Revisi Relaksasi Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital TA 2025
7	8.363.127.000	30 November 2025	Pemuktahiran KPA
8	8.363.127.000	9 Desember 2025	Pemuktahiran KPA

Eksekusi atau realisasi rencana
penggunaan anggaran (dis-

bursment plan) tahun 2025
dapat dilihat pada grafik di
bawah ini :



Grafik 45. Rencana Penyerapan Anggaran DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708) Tahun 2025



Grafik 46. Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan Kode Satuan Kerja Baru (694708) TA. 2025

Berdasarkan grafik perbanding-
an rencana penyerapan dengan
realisasi penyerapan di atas
dapat diketahui pada bulan Juli
dan November 2025 rencana
dan realisasi mempunyai
nilai yang sama, sedangkan
pada bulan September dan
Oktober 2025, realisasi melebihi
dari rencana anggaran yang
telah ditetapkan. Sedangkan
pada bulan Agustus 2025
rencana lebih tinggi daripada
realisasi anggaran. Pada bulan
Desember 2025 rencana dibuat
lebih tinggi daripada anggaran
dikarenakan pada sistem RPD
Kanwil DJPB diharuskan untuk

memaksimalkan penyerapan
anggaran sampai dengan
akhir tahun anggaran 2025.
Dari semua usaha yang telah
dilakukan bersama tersebut,
pada tahun anggaran
2025, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Tipe A1 Batam
memberikan Penghargaan
kepada Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II
Batam sebagai Peringkat 1
kategori Satuan Kerja dengan
Penyerapan Anggaran Terbaik
Tahun 2025 Pagu Kecil.

3) *Benchmark* Capaian Kinerja
dengan UPT Lainnya

Tabel 71. Benchmark Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan UPT Lainnya

Indikator Kinerja	Balmon Batam		Balmon Mataram		Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas II Batam Tahun 2025	86.95	86.19	86.95	86.00	Nilai Kinerja Anggaran pada Balmon Batam dan Balmon Mataram tidak mencapai target yang telah ditentukan

Perbandingan capaian kinerja
Balmon Batam dengan Balmon
Mataram, dapat diketahui
untuk total capaian kinerja dari
Balmon Batam dan Balmon

Mataram tidak mencapai
target yang telah ditentukan
dikarenakan terdapat
penggantian kode satker dari
059.03.653970 menjadi kode



satker 059.09.694708 pada DIPA. Hal yang bisa dijadikan contoh dari Balmon Mataram adalah meningkatkan nilai IKPA karena Balmon Mataram mendapatkan penghargaan Capaian IKPA Terbaik pada Tahun 2025.

D. Dampak Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Tahun Anggaran 2025, pada prinsipnya semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar namun masih terdapat kendala dan permasalahannya di dalam pelaksanaan anggaran diantaranya terjadinya *cut off* anggaran pada DIPA lama dan terbitnya DIPA baru seperti yang sudah disebutkan di atas yang mengakibatkan kurang optimalnya capaian kinerja dan anggaran yang dapat dilaksanakan.

1.4 Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

Pencapaian hasil maksimal terhadap hasil nilai kinerja anggaran sangat penting didapatkan oleh setiap satker yang merupakan amanat Direktur Jenderal Infrastruktur Digital yang dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga semua Unit Pelaksanaan Teknis harus mendapatkan nilai kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan. Di dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala yang di hadapi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam di dalam mencapai nilai maksimal terhadap capaian variabel yang telah ditetapkan yaitu variabel capaian *output*, variabel efisiensi, variabel konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan variabel penyerapan anggaran, utama

nya dalam melaksanakan variabel konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang masih sering belum sesuai antara rencana penarikan dana yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan penarikan dana yang dilakukan yang setiap triwulan, serta variabel penyerapan anggaran yang masih belum maksimal.

1.5 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Untuk mencapai Nilai Kinerja Anggaran yang lebih baik, perlu dilakukan kajian dan analisa serta mempelajari hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian kinerja anggaran sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah dilakukan koordinasi dan konsolidasi di internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam maupun koordinasi dengan instansi-instansi eksternal di luar Kementerian Komunikasi dan Digital seperti KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal Nilai Kinerja Anggaran khususnya IKPA.

1.6 Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada tahun berikutnya, Balai Monitor SFR Kelas II Batam perlu memperkuat perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur, terutama dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Selain itu, percepatan proses pengadaan dan penyelesaian kontrak sejak awal tahun menjadi kunci agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih merata dan tidak menumpuk di akhir tahun. Monitoring internal secara berkala juga perlu ditingkatkan melalui sistem early

warning untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan serta deviasi sejak dini.

Di sisi lain, peningkatan kualitas data dan kepatuhan administrasi melalui rekonsiliasi rutin dengan KPPN serta evaluasi bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi pelaporan dan meminimalkan kesalahan. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan koordinasi dan konsultasi secara aktif, sehingga setiap kendala teknis dapat segera diselesaikan dan berdampak pada optimalisasi capaian nilai IKPA secara keseluruhan.

1.6 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang baik, tidak bisa dilepaskan dari faktor solid tidak nya sebuah unit kerja. Hal tersebut telah terlaksana dengan baik didalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban yang dibuktikan dengan realisasi penyerapan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam pada tahun anggaran 2025 sebesar 99,12%. Penerapan budaya nilai kerja Berakhlak dapat berjalan dengan baik dengan metode :

1. Berorientasi Pelayanan, memastikan anggaran yang dipakai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat;
2. Akuntabel, melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan anggaran;

3. Kompeten, tercapainya target nilai kinerja anggaran tidak lepas dari kerjasama dari pimpinan dan semua tim kerja sehingga bisa menghasilkan nilai kinerja anggaran yang memuaskan;
4. Harmonis, selalu melibatkan tim kerja yang solid dan mampu membina kerjasama yang baik dan rasa saling percaya satu sama lain;
5. Loyal, menjaga integritas dan layalitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran;
6. Adaptif, baik pimpinan maupun tim kerja selalu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan aplikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai nilai kinerja anggaran;
7. Kolaboratif, untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang optimal telah dilakukan koordinasi internal antara tim kerja dan koordinasi eksternal dengan tim Infrastruktur Digital dan KPPN Batam.

1.7 Efisiensi

Untuk mencapai target kinerja anggaran yang ditetapkan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam didukung oleh 43 (empat puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Dengan Sumber Daya Manusia tersebut, kinerja secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana bahkan melampaui dari target yang ditetapkan.



Tabel 72. Efisiensi Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif	Persentase (%) Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas II Batam	Rp 4,955,599,000 (DIPA Kode Satker 653970)	Rp 4,955,509,661 (DIPA Kode Satker 653970)	Rp 89,339 (DIPA Kode Satker 653970)
			Rp 6,888,051,000 (DIPA Kode Satker 694708)	Rp 6,827,372,570 (DIPA Kode Satker 694708)	Rp 60,678,430 (DIPA Kode Satker 694708)

IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sampai dengan bulan Desember adalah 100.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Tabel 73. Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2025	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

Berikut adalah formulasi perhitungan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai

Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam :

Tabel 74. Formulasi Perhitungan Nilai UAKPA Tahun 2025

IK-2	Target	Penjelasan Target
Januari	5%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024; 2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
Februari	15%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Keuangan TA 2024.
Maret	5%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
April	5%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Menerima dan melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Komdigi, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

IK-2	Target	Penjelasan Target
Mei	15%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d April TA 2025.
Juni	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025.
Juli	15%	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang dilakukan oleh Biro Keuangan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024; 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025.
Agustus	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.
September	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.
Oktober	5%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.
November	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.
Desember	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025.

Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Tabel 75. Benchmark Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan UPT Lainnya

Indikator Kinerja	Balmon Batam		Balmon Mataram		Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	97	100	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA pada Balmon Batam dan Balmon Mataram telah mencapai target yang telah ditentukan

Tidak ada perbandingan capaian kinerja Balmon Batam dengan Balmon Mataram dikarenakan Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit

Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sama-sama mencapai 100 dan sesuai dengan Formulasi Penghitungan.





KINERJA LAINNYA

- a. Penatausahaan dan Rumah Tangga Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Komdigi, Ditjen Infrastruktur Digital dan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

Kepulauan Riau serta para Penyelenggara/ pengguna Spektrum Frekuensi Radio.

1. Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 718 surat.
2. Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sebanyak 837 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 459 surat.

Tabel 76. Total Surat Masuk, Surat Keluar, dan Surat Tugas Tahun 2025

Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Tugas
Januari	39	108	35
Februari	54	54	47
Maret	58	36	34
April	61	48	31
Mei	59	67	30
Juni	50	60	14
Juli	73	95	47
Agustus	62	71	37
September	69	73	47
Oktober	70	93	46
November	65	41	53
Desember	58	91	38
Jumlah	718	837	459

- b. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya

yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Berikut adalah Neraca Barang Milik Negara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Posisi Per tanggal 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025:

Tabel 77. Neraca BMN Balmon SFR Kelas II Batam Tahun 2025

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
117111	Barang Konsumsi	70.046.355,
131111	Tanah	16.041.514.000,
132111	Peralatan dan Mesin	50.561.399.111,
133111	Gedung dan Bangunan	11.750.627.295,
134113	Jaringan	319.481.927,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44.253.806.133,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.596.106.494,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(215.430.922,)
162151	Software	7.065.494.510,
162161	Lisensi	50.000.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	171.765.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(171.765.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6.757.125.895,)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(50.000.000,)
Total		32.986.093.754,

1. Tanah dan Bangunan
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam memiliki aset tanah dan bangunan di dua lokasi berikut :
 - a) Lokasi 1 : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Sekupang, Batam

Tabel 78. Data Tanah Dan Bangunan Lokasi 1

Uraian	Luas
Luas Tanah	9.999 m2
Luas Bangunan	
- Gedung Kantor	938 m2
- Rumah Negara Tipe C	80 m2
- Rumah Negara Tipe D	54 m2
- Bangunan Gedung Kantor Lama / Mess	36 m2
- Bangunan Bengkel / Hangar 2 Unit	36 m2
- Gedung Garasi / Pool Permanen	278 m2
- Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	56 m2
- Bangunan Pos Jaga	5 m2

Lokasi 2 : Jl. Natuna, Kel. Tiban Indah, Kec, Sekupang, Batam

Tabel 79. Data Tanah Dan Bangunan Lokasi 2

Uraian	Luas
Luas Tanah	876 m2
Luas Bangunan	
Rumah Negara Tipe C	70,16 m2
Rumah Negara Tipe D	210,48 m2

2. Stasiun Monitoring dan Ruang Monitoring Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam memiliki 1 Ruang Monitoring Fixed di Kantor Balmon Batam. Dipergunakan untuk monitoring rutin stasiun tetap dan kegiatan posko.
3. Slave Stasiun (*Master Control*, *Slave*, dan *Transportable*) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam memiliki 4 Slave Stasiun di 4 Lokasi dan *Transportable* di 2 Lokasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 80. Data Slave Stasiun Tahun 2025

No	Lokasi	Wujud Aset / Status	Keterangan
1.	Kantor Balmon Kelas II Batam Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Sekupang Batam	Kantor Balmon Kelas II Batam	<i>Master Control</i> dan <i>Fixed</i> Stasiun <i>Slave</i>
2.	Pelabuhan Ferry Nongsapura Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Batam	Lahan / Sewa	<i>Fixed</i> Stasiun <i>Slave</i>
3.	RSUD Tanjung Uban Jl. Indun Suri – Simpang Busung No. 1, Tanjung Uban, Kab. Bintan	Lahan / Sewa	<i>Fixed</i> Stasiun <i>Slave</i>
4.	Kantor Pos Meral Tanjung Balai Karimun Jl. Sei Raya, Kab. Karimun	Lahan / Sewa	<i>Fixed</i> Stasiun <i>Slave</i>
5.	Kantor Pos Ranai Natuna Jl. Datuk Kaya Wan. Moh. Benteng	Ruangan / Sewa	<i>Transportable</i> Stasiun
6.	Kantor Pos Tanjung Pinang Jl. Brigjen Katamso No. 47 Tanjung Pinang	Ruangan / Sewa	<i>Transportable</i> Stasiun

4. Kendaraan Operasional Monitoring

Tabel 81. Data Kendaraan Operasional Monitoring

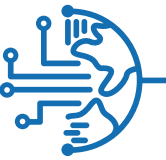
No	Jenis Kendaraan	Merk / Type / Warna	No. Pol	Tahun Perolehan	Kondisi
1.	Mobil Unit Monitoring	Ford / Everest / Titanium Silver	BP 1043 C	2011	Baik
2.	Mobil	Toyota / Kijang / Innova Reborn / Hitam Metalik	BP 1142 C	2024	Baik

5. Kendaraan Operasional Rutin
- a) Kendaraan Roda Empat

Tabel 82. Data Kendaraan Operasional Roda Empat

No	Jenis Kendaraan	Merk / Type / Warna	No. Pol	Tahun Perolehan	Kondisi
1.	Mobil	Toyota / Kijang Innova / Hitam Metalik	BP 1071 CY	2011	Baik
2.	Mobil	Toyota / Kijang / Kuning	BP 1087 C	2004	Baik
3.	Mobil	Toyota / Kijang Innova / Abu-abu Metalik	BP 1251 A	2006	Baik
4.	Mobil	Toyota / Kijang Innova/ Hitam Metalik	BP 1427 C	2012	Baik
5.	Mobil	Nissan / Navara/ Abu-abu Metalik	BP 8150 AY	2015	Baik
6.	Mobil	Toyota / Kijang / Innova Reborn / Hitam Metalik	BP 1607 C	2020	Baik





b) Kendaraan Roda Dua

Tabel 83. Data Kendaraan Operasional Roda Dua

No	Jenis Kendaraan	Merk / Type / Warna	No. Pol	Tahun Perolehan	Kondisi
1.	Motor	Honda / Mega Pro / Hitam	BP 2215 C	2010	Baik
2.	Motor	Honda / Vario / Hitam	BP 2270 C	2019	Baik
3.	Motor	Honda / Vario / Putih	BP 2271 C	2019	Baik
4.	Motor	Yamaha / Nmax / Hitam	BP 4060 C	2020	Baik



- c) Pembangunan Zona Integritas
Hasil penginputan pada aplikasi e-Zico Balai Monitor SFR Kelas II Batam, dengan rincian sebagai berikut:
- 100% atau 113 dari 113 item berhasil dijawab.
 - Nilai 100% pada bukti dukung menandakan bahwa dokumen/berkas pendukung yang diperlukan untuk setiap isian sudah seluruhnya diunggah dan sesuai ketentuan

- c) Balai Monitor SFR Kelas II Batam menunjukkan dalam penginputan aplikasi e-Zico dengan pencapaian 100% pada semua komponen utama. Hal ini menggambarkan konsistensi, ketelitian, serta komitmen unit dalam memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan.

Menu LKE : BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM - 2025
(Ajukan Eselon 1)

Export Excel

Satker
Dijawab : 100% (113/113)
Bukti Dukung : 100% (113/113)
Nilai : 99.20

A. PENGUNGKIT
B. HASIL

Gambar 26. Hasil Penginputan pada Aplikasi e-Zico

- d) Kepegawaian
Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Batam memiliki sumber daya manusia sejumlah 44 (empat puluh empat) pegawai yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
- 1) Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 6 (enam) pegawai Balai Monitor SFR kelas II Batam yang Memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 3 (tiga) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) secara reguler, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut:

Tabel 84. Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai

NO	PERIODE	JUMLAH PEGAWAI
1	Januari 2025	2 (Dua) Orang
2	Februari 2025	2 (Dua) Orang
3	Maret 2025	1 (Satu) Orang
4	April 2025	1 (Satu) Orang
5	Juli 2025	1 (Satu) Orang
6	Desember 2025	4 (Empat) Orang

Tabel 85. Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai

NO	PERIODE	JUMLAH PEGAWAI
1	April 2025	1 (Satu) Orang
2	Juni 2025	1 (Satu) Orang
3	November 2025	1 (Satu) Orang

Didalam mendukung tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan yaitu dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dan melakukan pengawasan

dan pengendalian terhadap penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam memiliki Sumber Daya

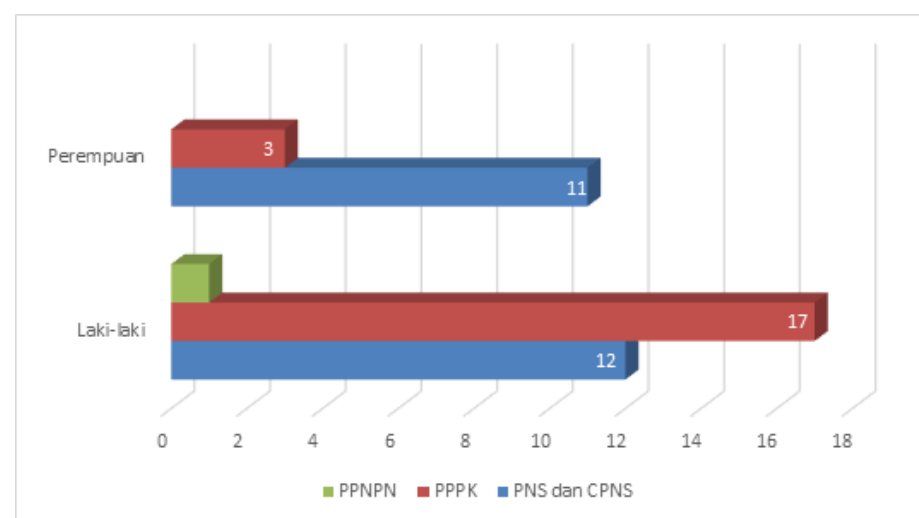


Manusia baik dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dengan status Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri (PPNP), dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 86. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

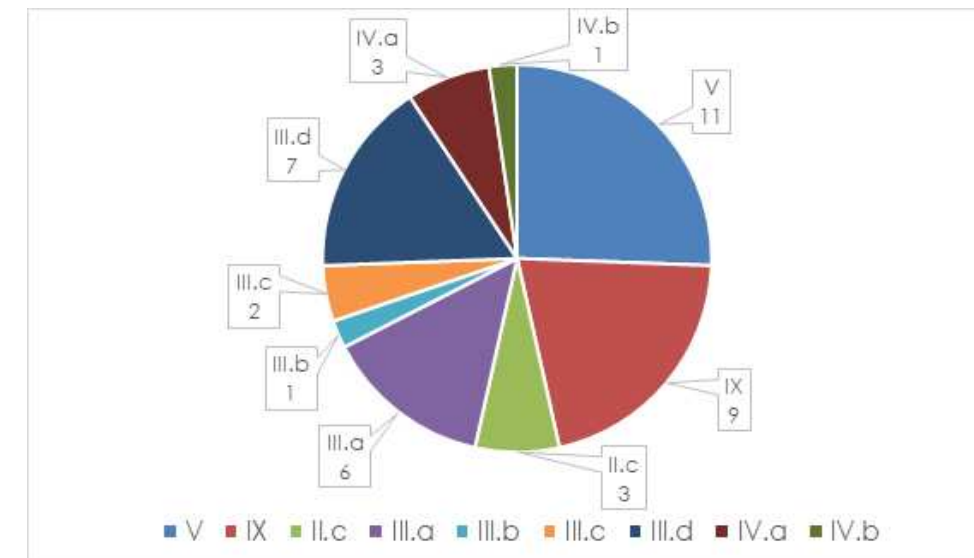
No	Unit Kerja	Status	Jenis Kelamin				Total
			Laki Laki		Perempuan		
			Orang	Sub Total	Orang	Sub Total	
1	Balai Monitor	PNS dan CPNS	12	30	11	14	44
	Spektrum Frekuensi	PPPK	17		3		
	Radio Kelas II Batam	PPNPN	1		0		



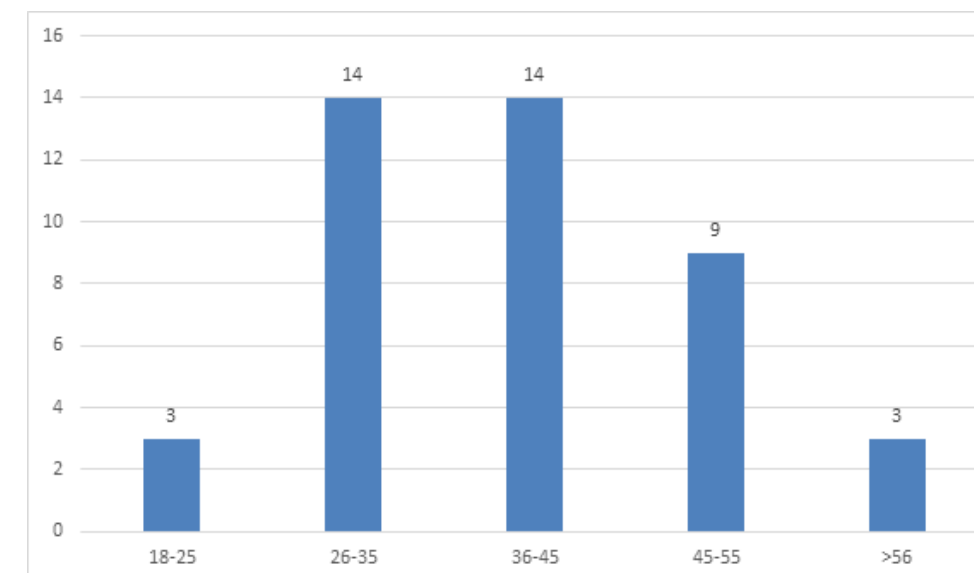
Grafik 47. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 87. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Status	Pangkat								Total	
			V	IX	II.c	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a		IV.b
1	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam	ASN (PNS, CPNS, dan PPPK)	11	9	3	6	1	2	7	3	1	43



Grafik 48. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 49. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Tabel 88. Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan

NO.	JENJANG JABATAN	2025
1	Jabatan Fungsional Ahli Madya	1
2	Jabatan Fungsional Ahli Muda	5
3	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	6
4	Jabatan Fungsional Penyelia	1
5	Jabatan Fungsional Mahir	2
6	Jabatan Fungsional Terampil	2
Jumlah		17

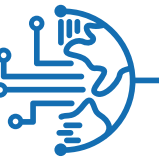
Tabel 89. Data PPNPN

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	Security	1 Orang
TOTAL		1 Orang

- 2) Pengembangan Kompetensi
Pada tahun 2025, seluruh pegawai
Balai Monitor Spektrum Frekuensi
- radio Kelas II Batam telah mengikuti
pengembangan kompetensi deng-
an detail sebagai berikut :

Tabel 90. Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Balmon Batam

NO	NAMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	JUMLAH PESERTA
1	Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR Yang diselenggarakan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital tanggal 31 Juli 2025	2025-07-31	2025-07-31	1 Orang
2	Pelatihan Penggunaan Alat Ukur Grounding Sistem berupa : Digital Earth Tester KYORITSU 4105A, Earth Clamp Tester KYORITSU 4200, High Voltage Insulation Tester Megger KYORITSU 3125A, Insulating And Arrester Tester OBO ISOLAB	2025-09-18	2025-10-18	16 Orang
3	Sosialisasi ASN Digital BKN Untuk PPPK Tahap II Dan PPPK Paruh Waktu	2025-10-15	2025-10-15	13 Orang
4	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada PPPK Tahap II dan Paruh Waktu Tahun 2025	2025-10-16	2025-10-17	9 Orang
5	SOSIALISASI SISTEM DETEKSI DINI	2025-07-15	2025-07-15	1 Orang
6	dasar-dasar implementasi artifisial	2025-10-10	2025-10-10	1 Orang
7	PERTAHANAN DIGITAL 101 UNTUK INDIVIDU DAN UMKM	2025-10-10	2025-10-10	1 Orang
8	Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Perkantoran Online	2025-10-19	2025-10-19	1 Orang
9	Cara Berpikir Logis untuk Mengatasi Masalah (Jenjang SMA)	2025-11-08	2025-11-08	2 Orang
10	Fasilitasi Pandu Literasi Digital segmen Masyarakat Umum Literasi Digital	2025-11-09	2025-11-09	2 Orang
11	Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir Digital	2025-11-15	2025-11-15	2 Orang
12	E-Learning Microsoft Excel Level Intermediate Batch II	2025-11-20	2025-11-29	2 Orang
13	Orientasi Lanjutan bagi CPNS dan PPPK Tahap I Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Materi Kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi, Keamanan Informasi, dan Tata Naskah Dinas	2025-05-14	2025-05-15	13 Orang
14	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada CPNS dan PPPK Tahun 2025	2025-05-22	2025-05-23	20 Orang
15	Sosialisasi Disiplin Pegawai Kepada CPNS Dan PPPK T.A 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital	2025-06-12	2025-06-12	6 Orang



NO	NAMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	JUMLAH PESERTA
16	Sosialisasi Karir Jabatan Fungsional Kepada CPNS T.A 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital	2025-06-13	2025-06-13	4 Orang
17	Konsep Pemrograman	2025-09-12	2025-09-14	2 Orang
18	Pengenalan Kolaborasi Menggunakan Tools Gratis Penyimpanan Berbasis Cloud	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
19	Kenali Tanda-Tandanya dan Lindungi Data Pribadi	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
20	Introduction to Cloud Computing	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
21	Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2025-09-12	2025-09-14	4 Orang
22	Introduction to Cyber Security and Career Awareness	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
23	Ancaman Pembobolan Akun Pribadi dan Pencegahannya	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
24	Pentingnya Menjaga Keamanan Digital: Perlindungan Diri di Dunia Maya	2025-09-12	2025-09-14	2 Orang
25	Mengamankan Diri dari kejahatan Siber	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
26	Tips Melindungi Diri Dari Ancaman Phising dan Malware di Era Digital	2025-09-12	2025-09-14	2 Orang
27	Ethical Hacker For Dummies	2025-09-12	2025-09-14	2 Orang
28	AI Engineer for Millennial	2025-09-12	2025-09-14	1 Orang
29	Digital Infrastructure in Collaboration with the International Telecommunication Union	2025-02-17	2025-02-18	1 Orang
30	ToT Metode Pembelajaran	2025-08-12	2025-08-14	1 Orang
31	Pelatihan Teknis TV Digital Tahun 2025	2025-08-25	2025-08-29	2 Orang
32	Sosialisasi Disiplin Pegawai Kepada CPNS Dan PPPK T.A 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital	2025-06-12	2025-06-12	1 Orang
33	Launching dan Training of Trainers Aplikasi SERENA Versi 2.0	2025-06-17	2025-06-17	2 Orang
34	APT - Network Management & Monitoring	2025-06-17	2025-06-19	1 Orang
35	Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-06-24	2025-06-24	1 Orang
36	E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	2025-04-17	2025-04-24	1 Orang
37	Bimbingan Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Terpadu T.A. 2027	2025-12-02	2025-12-04	2 Orang
38	Pemanfaatan Aplikasi Editing Video untuk Konten Produk	2025-01-28	2025-01-28	2 Orang
39	Etis Bermedia Sosial Berbasis Nilai Lokal	2025-01-28	2025-02-28	1 Orang
40	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pelayanan Infrastruktur Digital	2025-01-31	2025-01-31	3 Orang
41	Generative AI untuk Pendidikan Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-05	2025-02-05	1 Orang
42	Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-05	2025-02-05	5 Orang
43	Seberapa Penting Menjaga Data Pribadi dan Pelindungannya Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-05	2025-02-05	1 Orang
44	Dasar-dasar Keamanan AI Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-05	2025-02-05	1 Orang
45	Seberapa Aman Informasi Anda dari Ancaman Digital Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-05	2025-02-05	1 Orang
46	Introduction to Cyber Security and Career Awareness Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-09	2025-02-09	1 Orang
47	Introduction To Cloud Computing Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-09	2025-02-09	1 Orang
48	Menskalakan AI di Organisasi Anda Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-09	2025-02-09	1 Orang
49	Pengenalan Internet of Things: Konsep, Teknologi, dan Aplikasinya Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-14	2025-02-14	1 Orang
50	Tips Melindungi Diri Dari Ancaman Phising dan Malware di Era Digital Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-14	2025-02-14	1 Orang
51	Ancaman Pembobolan Akun Pribadi dan Pencegahannya Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-14	2025-02-14	1 Orang
52	Peran ASN Dalam Membangun Citra Lembaga Melalui Konten Kreatif Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-15	2025-02-15	1 Orang
53	Membangun Personal Branding di Media Sosial Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-15	2025-02-15	1 Orang



NO	NAMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	JUMLAH PESERTA
54	Menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-15	2025-02-15	1 Orang
55	Wawasan Karir dalam Bidang Data Analytics Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
56	Pengenalan Kolaborasi Menggunakan Tools Gratis Penyimpanan berbasis Cloud Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
57	Fondasi Penulisan Berita Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
58	Seni Public Speaking Untuk Pemimpin Muda Berkarakter Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
59	Pemanfaatan Aplikasi Chat Bagi Wirausahawan Pemula Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
60	Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
61	Pengenalan Data Science dan Pemanfaatannya di Berbagai Sektor Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-16	2025-02-16	1 Orang
62	E-Learning Microsoft Excel Level Intermediate Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-20	2025-03-13	5 Orang
63	E-Learning Microsoft Power Point Level Intermediate Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-02-20	2025-03-13	3 Orang
64	Jejak Digital: Warisan yang Anda Tinggalkan di Dunia Maya	2025-03-01	2025-03-01	1 Orang
65	Membangun Lab Virtual & Dasar Linux	2025-03-01	2025-03-01	1 Orang
66	Memahami Aspek Pengembangan Produk AI	2025-03-01	2025-03-01	1 Orang
67	Menjadi Pengguna Media Sosial yang Bijak dan Kritis	2025-03-01	2025-03-01	1 Orang
68	Optimasi Instagram dengan Insight	2025-03-02	2025-03-02	2 Orang
69	Memahami Perbedaan Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi	2025-04-13	2025-04-13	1 Orang
70	Image Recognition dan Speech Recognition Mengubah Interaksi Kita dengan Teknologi	2025-04-13	2025-04-13	1 Orang
71	Pengenalan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Perlindungan Karya dan Inovasi Digital Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-04-13	2025-04-13	1 Orang
72	AI Engineer for Milenial	2025-05-22	2025-05-22	1 Orang
73	E-Learning Microsoft Excel Level Advance Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-05-27	2025-06-26	3 Orang
74	E-Learning Microsoft Power Point Level Advance Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-05-27	2025-06-26	2 Orang
75	Bimbingan Teknis Penyusunan Policy Brief	2025-07-17	2025-07-23	1 Orang
76	Generative AI untuk Peningkatan Kinerja ASN Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-08-11	2025-08-15	2 Orang
77	Pengantar Mindset Digital 1 : Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir Digital	2025-08-16	2025-08-16	1 Orang
78	Anti Korupsi Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-09-15	2025-09-19	1 Orang
79	Pemanfaatan AI di Pemerintahan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-10-06	2025-10-09	1 Orang
80	Sosialisasi Kepatuhan SFR & APT Strategi Pengelolaan PNBP Sanksi Administratif tanggal 21 Oktober 2025	2025-10-21	2025-10-21	1 Orang
81	Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 202	2025-12-17	2025-12-19	1 Orang
82	Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kompetensi Nonklasikal	2025-06-13	2025-06-13	10 Orang
83	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	2025-05-19	2025-05-26	1 Orang
84	PELATIHAN SMART & EFFECTIVE LEADERSHIP Seni Memimpin dengan Cerdas dan Berdampak	2025-10-14	2025-10-17	1 Orang
85	Internet Of Things (13 CPD Hours)	2025-06-16	2025-06-17	1 Orang



NO	NAMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	JUMLAH PESERTA
86	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-08-25	2025-09-12	1 Orang
87	Komunikasi Strategis Untuk ASN Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-08-26	2025-08-26	1 Orang
88	Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2025-09-12	2025-09-12	1 Orang
89	Pelatihan Kepemimpinan dan Ideologi Kebangsaan	2025-10-21	2025-10-21	7 Orang
90	Sosialisasi Pedoman Standar Pelayanan	2025-10-10	2025-10-10	2 Orang
91	Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Micro Skill	2025-02-03	2025-12-30	2 Orang
92	Pengenalan Data Science dan Pemanfaatannya di Berbagai Sektor Micro Skill	2025-04-28	2025-04-28	1 Orang
93	Sosialisasi Kalibrasi Perangkat SMFR	2025-10-02	2025-10-02	1 Orang
94	Pemanfaatan AI di Pemerintahan	2025-05-14	2025-05-17	3 Orang
95	Sosialisasi Kepatuhan Internal	2025-08-06	2025-08-08	2 Orang
96	Training Course (On Internet Of Things)	2025-06-09	2025-06-30	1 Orang
97	Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik	2025-07-03	2025-07-03	1 Orang
98	Komunikasi Strategis Untuk ASN	2025-07-07	2025-07-07	1 Orang
99	Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial	2025-07-08	2025-07-08	1 Orang
100	Branding Institusi Untuk Instansi Pemerintah	2025-07-09	2025-07-09	1 Orang
101	Introduction To Cloud Computing Micro Skill	2025-05-22	2025-05-22	1 Orang
102	Dasar - Dasar Keamanan AI	2025-06-12	2025-06-12	1 Orang
103	Generative AI untuk Pendidikan	2025-06-12	2025-06-12	1 Orang
104	E-Learning Microsoft Power Point Level Basic Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-01-15	2025-02-12	1 Orang
105	Keprotokolan dalam Kehumasan	2025-05-19	2025-05-22	1 Orang
106	Pelatihan Implementasi AI Level Intermediate	2025-06-24	2025-06-25	1 Orang
107	Pelatihan Implementasi AI Level Intermediate	2025-06-24	2025-06-25	1 Orang
108	Refresment PPNS	2025-08-11	2025-08-15	1 Orang
109	E-Learning Microsoft Excel Level Basic Batch II	2025-10-13	2025-11-03	1 Orang
110	E-Learning Microsoft Power Point Level Basic Batch II	2025-10-13	2025-11-03	1 Orang
111	E-Learning Microsoft Power Point Level Intermediate Batch II	2025-11-03	2025-11-23	1 Orang
112	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel	2025-03-17	2025-03-17	1 Orang
113	Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui e-LHKPN	2025-02-24	2025-02-24	2 Orang
114	PPK Negara Tersertifikasi (PNT)	2025-03-04	2025-03-05	1 Orang
115	Implementasi E-Katalog Versi 6 Melalui Metode Mini Kompetisi dan Negosiasi	2025-03-13	2025-03-13	1 Orang
116	Teknik Lobby, Negosiasi, dan Diplomasi Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-03-17	2025-03-21	2 Orang
117	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III Tahun 2025	2025-04-22	2025-04-28	1 Orang
118	Bimbingan Teknis Penyeragaman Penetapan Denda Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi Pada Dinas Tetap Berdasarkan Izin Kelas	2025-04-29	2025-05-02	1 Orang
119	Workshop Kearsipan dan Kehumasan - Tantangan SDM Kearsipan dan Kehumasan di Era Digitalisasi	2025-10-30	2025-10-31	3 Orang
120	AI for Government of Indonesia Training	2025-07-09	2025-07-09	1 Orang
121	Pelatihan Dasar CPNS 2025	2025-11-17	2025-11-21	1 Orang
122	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026	2025-12-22	2025-12-24	1 Orang
123	Komunikasi Strategis Untuk ASN Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-11-06	2025-11-06	1 Orang
124	Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Perkantoran Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-12-08	2025-12-08	1 Orang
125	E-Learning Modul Coretax Registrasi dan Manajemen Akses bagi Instansi Pemerintah (Open Access)	2025-06-01	2025-12-31	1 Orang



NO	NAMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	JUMLAH PESERTA
126	Pengantar Mindset Digital 1 : Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir Digital Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-06-18	2025-06-18	1 Orang
127	Sosialisasi Antikorupsi dan Sosialisasi Benturan Kepentingan dan WBS	2025-08-07	2025-08-07	1 Orang
128	Sosialisasi Bidang SDM dan Organisasi Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Pola Karir ASN	2025-11-18	2025-11-18	1 Orang
129	Peningkatan Awareness Manajemen Resiko Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025	2025-11-21	2025-11-21	1 Orang
130	E-Learning Microsoft Excel Level Basic Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2025-01-15	2025-02-12	1 Orang
131	Komunikasi Krisis Untuk ASN Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2025-07-07	2025-07-07	1 Orang



Bab IV

Penutup



Dari hasil analisa dan pengukuran terhadap capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2025 :

1. Pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisasi dengan baik dan lancar;
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam masih perlu dilakukan pengembangan kemampuan kompetensi terhadap pegawai, baik secara administrasi maupun secara teknis;

3. Capaian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025, dapat dilaksanakan dan dicapai meliputi :
 - a. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi;
 - b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien.



Dokumentasi

1. Kunjungan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital



2. Penghargaan Balai Monitor SFR Kelas II Batam Tahun 2025



3. Kegiatan Posko Monitoring Idul Fitri 1446 H Tahun 2025



4. Kegiatan Penertiban Nasional Tahun 2025



5. Kegiatan Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data ISR Tahun 2025



6. Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio



7. Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Pegawai Tahun 2025



8. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2025



9. Pelaksanaan Kegiatan Maritime on the Spot (MOTS) Tahun 2025



10. Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-80 Tahun 2025



11. Pelaksanaan Kegiatan Hari Bhakti Postel ke-80 Tahun 2025



12. Posko Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026

